

MEMBANGUN

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

(manual fasilitasi)

editor:
Wibowo A. Djatmiko
Rachmat Firmansyah



an LATIN
9
B

Pustaka Latin

B2[illegible]0036
19.09.15
Latin

634.9
DJA
M/1

Membangun Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

(Manual Fasilitasi)

berdasarkan pengalaman lapangan
LATIN dan KANOPI di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Editor:
Wibowo A. Djatmiko
Rachmat Firmansyah

Kontributor:
Ajun Juhantara
Arif Aliadi
Beni Sarbini
Budi Rahardjo
Jarno
Ma'mun Samsudin
Nana Juana
Novie Murdianasari
Nurhayati
Rachmat Firmansyah
Wibowo A. Djatmiko

LEMBAGA ALAM TROPIKA INDONESIA (LATIN)
Desember 2002

Membangun Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Manual Fasilitasi)

Editor:
Wibowo A. Djatmiko
Rachmat Firmansyah

Kontributor:
Ajun Juhantara
Arif Aliadi
Beni Sarbini
Budi Rahardjo
Jarno
Ma'mun Samsudin
Nana Juana
Novie Murdianasari
Nurhayati

Desain dan Tata Letak
Dito Sugito

Kutipan
Djatmiko, Wibowo A. (Editor)
Membangun Pegelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Manual Fasilitasi). Editor: Wibowo A. Djatmiko/ Rachmat Firmansyah.-
–cet. 1—Bogor:
Penerbit: LATIN, 2002.
81+vi hal. 160 X 240mm

©Pustaka **LATIN, 2002**

Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)
Jl. Sutra No. 1
Bogor Barat, Bogor 16115
Tel: (0251) 420522-25 Fax: (0251) 626593
Email: latin@latin.or.id
Website: www.latin.or.id

Didukung oleh:
THE FORD FOUNDATION

Daftar Isi

PENDAHULUAN 1

ORIENTASI DESA, *Ma'mun Samsudin* 7

PENGENALAN PHBM, *Nana Juana* 17

MEMBANGUN KESEPAKATAN DESA
MELALUI METODE WORKSHOP, *Rachmat Firmansyah* 23

MEMBENTUK DAN MEMBANGUN
FORUM PHBM DESA, *Novie Murdianasari* 33

MEMBANGUN KELEMBAGAAN
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH), *Beni Sarbini* 41

PEMETAAN HUTAN DESA
SECARA PARTISIPATIF, *Nurhayati* dan *Jarno* 51

PENDATAAN
PENGGARAPAN LAHAN HUTAN, *Ajun Juhantara* 73

lampiran 99
TEKNIK PEMETAAN HUTAN DESA, *Jarno* dan *Nurhayati*

Kata Pengantar

Tanah longsor dan banjir yang akhir-akhir ini melanda beberapa daerah di Indonesia bisa jadi adalah cermin dari rusaknya keseimbangan ekosistem, terutama hutan. Keberadaan atau kerusakan hutan tidak dapat dipungkiri lagi menjadi satu faktor penentu terjadinya bencana tanah longsor dan banjir.

Namun, siapa yang sekarang tidak tertarik dengan hutan kita. Sejak tahun 1998, ketika Soeharto turun, tidak ada lagi satu pihak pun yang mampu bertindak sebagai pengelola hutan. Pemerintah sekali pun tidak mampu, apalagi pengusaha. Serbuan masyarakat ke hutan, entah yang didukung oleh cukong maupun tidak, tidak dapat dibendung oleh siapa pun. Akhirnya, hutan berada pada situasi "tanpa pengelolaan". Pada situasi ini yang berlaku adalah hukum "siapa cepat dia dapat". Tidak hanya masyarakat, pengusaha pun berlomba untuk menebang pohon yang belum waktunya ditebang, karena kuatir didahului oleh pihak lain. Belum lagi pemerintah daerah, yang sekarang mempunyai otoritas yang lebih kuat untuk mengelola hutan di daerahnya sendiri. Semua orang memandang hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa segera dicairkan menjadi uang tunai.

Pada situasi seperti itulah, di Jawa lahir inisiatif PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), yang gagasan awalnya mula-mula diinisiasi Perum Perhutani di tahun 1999. Dengan paradigma Community-based Forest Management, gagagan PHBM diharapkan dapat mengatasi krisis pengelolaan hutan di Jawa. Namun, banyak pihak yang meragukan kesungguhan Perum Perhutani untuk menerapkan gagasan PHBM mengingat sudah ada program-program sosial lain yang telah digulirkan oleh Perum Perhutani, yang dianggap gagal mengatasi persoalan kehutanan di Jawa.

Di tengah keraguan banyak pihak, buku Manual PHBM ini diterbitkan. Maksudnya bukan untuk menjawab keraguan atau melegitimasi gagasan Perum Perhutani, namun buku ini adalah bagian dari upaya pencarian atau eksplorasi untuk menemukan cara terbaik mengembangkan gagasan PHBM sebagai solusi atas krisis kehutanan di Jawa. Bagi LATIN dan KANOPI upaya pencarian telah dilakukan sejak tahun 2000, melalui berbagai aktivitas pendampingan masyarakat dan pengembangan kolaborasi multipihak di Kabupaten Kuningan.

Mulanya, buku ini ditulis hanya untuk kepentingan pelatihan pendamping masyarakat yang akan bekerja di desa-desa sekitar hutan yang ada di Kabupaten Kuningan. Namun sejalan dengan diskusi yang terjadi untuk memperbaiki buku ini, maka disadari bahwa manual PHBM haruslah menjadi manual yang dinamis. Segala isi dan tahapan yang ada di dalam buku ini merupakan ekstraksi dari pengalaman lapang dalam periode tahun 2000 –

2001, yang ditulis dengan lebih sistematis. Dan kami berniat untuk memperbaikinya terus-menerus berdasarkan pengalaman baru yang dijumpai di lapang. Karena itu, buku Manual PHBM ingin diterbitkan dan disebarluaskan tidak hanya bagi kepentingan para pendamping masyarakat di Kuningan, melainkan juga di tempat lain. Harapannya, para pengguna buku ini dapat menyesuaikan penerapan Manual PHBM ini dengan kondisi setempat, serta dapat memberi masukan untuk perbaikan buku ini.

Dalam kesempatan ini pula, disampaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada para pendukung terbitnya Manual PHBM ini, yaitu VSO melalui program SPARK yang telah mendukung penulisannya, serta Ford Foundation yang mendukung penerbitannya.

Bogor, Desember 2002

Arif Aliadi
Direktur Eksekutif LATIN

Pendahuluan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu pendekatan baru yang gagasan awalnya mula-mula diinisiasi Perum Perhutani di tahun 1999. Pendekatan pengelolaan hutan yang berlandaskan konsep berbagi bersama masyarakat ini digulirkan untuk menjawab persoalan dan konflik pengelolaan yang semakin rumit antara Perhutani dengan masyarakat, khususnya di desa-desa yang berdekatan dengan hutan. Jika pada masa lalu paling jauh masyarakat setempat hanya diberi kesempatan menjadi peserta program tumpangsari, menanam tanaman pertanian tertentu di sela-sela benih pohon hutan yang baru ditanam, dengan PHBM ini para petani hutan akan dapat berbagi hasil baik tanaman pertanian maupun tanaman hutan apabila dipanen nantinya.

Sedikit banyak gagasan PHBM ini merupakan revolusi dalam pendekatan pengelolaan hutan, dari awalnya yang bersifat *state-based forest management* (pengelolaan hutan yang berbasis negara) menjadi bersifat *community-based forest management* (pengelolaan hutan berbasis komunitas). Komunitas setempat, dalam hal ini masyarakat desa-desa yang berdekatan atau berbatasan dengan hutan, ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem produksi kehutanan. Dengan demikian, *by concept*, masyarakat setempat adalah stakeholder, pemegang peran penting yang tidak boleh ditinggalkan dalam keseluruhan proses pengelolaan hutan. Mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan hingga pemanenan dan pemanfaatan hasil-hasilnya. Sebagai implikasinya ialah saling berbagi (*sharing*) tadi, baik berbagi dalam penyediaan sumberdaya, maupun berbagi dalam menikmati hasil.

Implikasi yang lebih jauh dari konsep berbasis komunitas ialah bahwa pengelolaan hutan akan juga diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan tradisi komunitas setempat. Akibatnya, jenis-jenis tanaman hutan atau tanaman kerasnya, dan jenis-jenis tanaman pertaniannya akan ditentukan bersama antara petani hutan dengan Perhutani (atau, pengelola hutan yang lain).

Program PHBM yang dilansir Perhutani ini memberi indikasi bahwa model-model pengelolaan hutan terdahulu sudah tidak relevan dilaksanakan di era sekarang. Sistem pengelolaan semula yang segalanya terpusat di tangan Perhutani (baca: negara) telah gagal memelihara, melindungi, dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari di Jawa. Terbukti dari banyaknya desa-desa miskin yang menerus di sekitar hutan, menurunnya

daya produksi hutan, meningkatnya eskalasi konflik pengelolaan hutan, hingga merebaknya penjarahan kayu dan penduduk̀an lahan hutan untuk bertani.

Persoalan-persoalan inilah yang mau tidak mau telah mengubah strategi dan pendekatan pengelolaan hutan Perhutani. Jika dulu masyarakat desa hutan selalu dipinggirkan, namun sekarang kondisinya berbeda, mereka mulai dilirik secara serius dan muncul kesadaran bahwa masyarakat desa hutan merupakan ujung tombak atau pelaku penting dalam proses pengelolaan sumber daya hutan. Tanpa peranan masyarakat, seorang KRPH (mantri hutan) tak akan mampu mengemban tanggung jawab atas ratusan hektar kawasan hutan.

Namun demikian PHBM bukanlah konsep yang telah paripurna. Mengikuti sifat alami ekosistem hutan dan komunitas yang bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, pola-pola implementasi PHBM harus dicari melalui proses-proses belajar antara berbagai stakeholder di lapangan. Dengan demikian pencarian itu harus dipandang sebagai proses interaktif antara masyarakat dengan para pihak lainnya (Perhutani, pemerintah daerah, pengusaha lokal dan lain-lain) dalam mengembangkan proses-proses kolaborasi dalam pengelolaan hutan.

Dikaitkan dengan krisis pengelolaan hutan di Jawa saat ini, PHBM perlu dijadikan sebagai media bagi proses-proses pembelajaran masyarakat dan para pihak lain untuk pemulihan proses-proses produksi dan reproduksi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses-proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan efektif, hanya jika memenuhi beberapa prinsip sebagai prasyarat dasar, seperti tumbuhnya rasa saling percaya (*trust*) dan kesepahaman, kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan proses-proses kebersamaan. Di samping itu PHBM sebagai sebuah proses belajar bagi semua pihak harus mampu dijamin keleluasaannya, tanpa diganggu oleh kebijakan yang sifatnya top down dan atau oleh tindakan anarkis masyarakat.

Dalam proses pembelajaran tersebut, konstruksi dasar yang harus dibangun adalah fundamen yang menjamin dicapainya keadilan dan kesinambungan pengelolaan sumberdaya hutan pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui proses-proses kolaboratif. Jelas bahwa substansi yang perlu dikembangkan dalam PHBM ini tidak saja menyangkut perubahan dalam sistim pengelolaan sumberdaya hutan, tetapi lebih dari itu harus merupakan bagian dari proses-proses demokratisasi, khususnya di antara para pihak pelaku PHBM itu sendiri.

Kemudian untuk memastikan kelangsungan proses tersebut harus ada kejelasan tahapan dalam penyiapan desa (titik sentral),

Kabupaten Kuningan adalah salah satu wilayah yang sedang mengimplementasikan PHBM. Kabupaten Kuningan harus memandang bahwa PHBM merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang berpijak pada prinsip kolaborasi dan mendudukkan kembali peran masyarakat melalui pemberian kuasa atas hak-hak kelolanya.

Tujuan pembuatan manual

Kabupaten Kuningan telah memiliki dua dokumen penting tentang PHBM. Pertama, MoU (Nota Kesepahaman) antara Direktur Utama Perhutani dengan Bupati Kuningan

yang ditandatangani pada tanggal 2 Pebruari 2001 yang lalu. Kedua, *Langkah-Langkah dan Rencana Strategis Implementasi PHBM Kuningan* sebagai hasil dari lokakarya multi stake-holder di kabupaten Kuningan pada tanggal 3-5 April 2001. Namun, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) tersebut, sementara desa-desa hutan yang jumlahnya 121 desa telah lama menunggu. Sikap menunggu desa-desa inilah yang harus segera direspon.

Disadari dan dipahami bahwa begitu gong implementasi PHBM dipukul, bukan berarti seluruh desa-desa hutan itu secara serentak mengimplementasikannya. Akan tetapi semuanya akan dijalani dengan selangkah demi selangkah sesuai dengan rencana strategis yang telah disepakati. Demikian pula, desa-desa tersebut harus melakukan persiapan-persiapan yang mantap bagi implementasi PHBM tersebut. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana harus dipersiapkan ? Dalam konteks inilah manual ini dituliskan, agar bisa dijadikan sebagai rujukan bagi para fasilitator dan para petugas teknis yang akan membantu dalam implementasi PHBM di lapangan.

Jelas bahwa implementasi PHBM perlu dipercepat dan diperkuat dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas. Karena itu diharapkan pula bahwa manual ini dapat digunakan sebagai pembanding bagi pihak-pihak lain yang ingin turut memfasilitasi proses penerapan PHBM di Kuningan: ornop, penyuluh kehutanan dan pertanian, petugas lapangan kehutanan, tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat dan lain-lain.

Melalui manual ini, para penulis ingin berbagi pengalaman lapangan dalam bekerja bersama masyarakat desa. Sebagai ekstraksi dan kristalisasi pengalaman-pengalaman lapangan, jelas manual ini tidak sempurna dan belum tentu mampu memenuhi kebutuhan lokal. Penulisan manual sekaligus bertujuan menguji gagasan yang dituangkan, apakah cukup memadai sebagai pegangan dasar. Sekaligus dengan penulisan ini hendak dijaring kemungkinan-kemungkinan dan saran perbaikan yang lebih kongkrit dari pengalaman aplikasi lapangan.

Sasaran yang dituju

Sebagaimana diuraikan di atas, sasaran pengguna yang diharapkan adalah para pekerja lapangan yang akan berproses bersama masyarakat mengembangkan PHBM. Para pekerja lapangan ini bisa pegiat ornop yang terlibat dalam PHBM, penyuluh kehutanan atau pertanian di desa, petugas-petugas kehutanan di tingkat desa, pamong desa, atau tokoh-tokoh pemuda dan masyarakat yang berminat.

Sebelum mengimplementasikan manual ini, disarankan agar calon pengguna mendalami konsep-konsep dan pengertian PHBM; termasuk prinsip-prinsipnya. Dan khusus untuk penerapan manual pemetaan partisipatif secara praktis, diperlukan pemahaman matematis sederhana; cukup untuk memahami perhitungan-perhitungan konversi dari jarak miring ke jarak datar.

Bagaimana manual dibangun ?

Apa yang tertuang dalam manual ini merupakan hasil pengalaman bersama LATIN

dengan KANOPI dalam memfasilitasi proses implementasi PHBM di dua desa di Kabupaten Kuningan, yaitu Cileuya (Kecamatan Cimahi) dan Sukasari (Kecamatan Ciwaru). Proses bersama masyarakat selama kurang lebih setahun itulah yang kemudian dituliskan sebagai manual pelaksanaan kegiatan.

Penulisan manual dikerjakan dalam suatu lokakarya penulisan (lokatulis) di Bogor selama satu minggu. Melalui diskusi-diskusi yang juga melibatkan pihak luar selama lokatulis, manual ini dibangun dan dihaluskan. Akan tetapi jelas masih jauh dari sempurna, dan memang tidak dimaksudkan untuk menjadi sempurna dan final. Variasi dan dinamika yang tinggi di pedesaan tidak mungkin dapat dicakup dengan sempurna oleh sebuah manual.

Yang dapat dilakukan kemudian adalah menyelesaikan manual sebaik-baiknya dan menyebar luaskannya agar dapat diuji segera di lapangan. Dan meskipun berharap manual ini dijadikan rujukan, bukan berarti tertutup terhadap koreksi dan pembaharuan. Justru manual ini dipersiapkan untuk menjadi terbuka dan mampu mengakomodasi perkembangan situasi dan kondisi lokal.

Bagaimana manual ini digunakan ?

Topik utama manual ini adalah PHBM, akan tetapi bisa juga digunakan pada topik-topik lain yang secara prinsipil memiliki kesamaan dengan PHBM. Intinya, manual ini ingin mengajak para penggunanya untuk mengembangkan kegiatan pengelolaan hutan secara partisipatif, yang melibatkan banyak warga desa atau petani hutan.

Bagian-bagian manual ini sifatnya tidak berdiri sendiri. Tiap-tiap bab (kegiatan) memiliki keterkaitan satu sama lain, dan mungkin saling tumpang tindih. Demikian pula dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan bisa jadi dapat dipertukarkan urutannya, atau dapat dikerjakan secara simultan. Namun ada pula kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan lebih dulu daripada yang lainnya.

Kegiatan-kegiatan penyiapan desa untuk mengimplementasikan PHBM sebenarnya dibagi ke dalam sembilan bab kegiatan, namun yang dituliskan dalam manual ini baru 7 (tujuh) kegiatan. Dua bab lagi yang belum tercantum adalah Perencanaan Desa dan Penyusunan Peraturan Desa karena kegiatan di lapangan belum selesai hingga ke tahap tersebut. Ketujuh bab yang telah disusun terdiri atas :

- *Orientasi Desa.* Sebelum memulai suatu program atau kegiatan di desa, fasilitator perlu mengenali situasi, sifat-sifat dan kondisi desa yang akan dilayaninya dengan baik. Bagian ini memberikan panduan kepada fasilitator untuk melakukan observasi awal atas kondisi umum desa. Bagaimana menemui orang, siapa yang harus ditemui, kapan ditemui, apa saja yang perlu digali dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat desa dan seterusnya.
- *Pengenalan Program PHBM.* Program dalam hal ini bukan berarti bahwa fasilitator datang dengan segudang program yang akan diperkenalkan kepada masyarakat desa. Pengenalan program yang dimaksud dalam manual ini adalah mengenalkan gagasan dasar, membangun dan mendorong keterlibatan masyarakat di dalam mengembangkan PHBM sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di tiap-tiap desa. Keterlibatan masyarakat desa umumnya, dan petani-petani hutan khususnya ini sangat penting untuk dibangun seawal

mungkin, sehingga program PHBM yang dikembangkan kelak sungguh-sungguh merefleksikan kebutuhan lokal.

- ***Membangun Kesepakatan Desa Melalui Metoda Workshop.*** Basis bagi suatu perencanaan kolaboratif adalah kesepakatan bersama di antara para stakeholder. Bagian ini berisi panduan bagaimana menyelenggarakan sebuah pertemuan lokakarya desa untuk membangun kesepakatan dan perencanaan bersama dalam mengelola sumberdaya alam yang ada di desa.
- ***Membentuk dan Membangun Forum PHBM Desa.*** Dalam pengembangan suatu kegiatan bersama, diperlukan adanya suatu media komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat. Forum PHBM di desa merupakan salah satu media tempat para pihak itu berbagi informasi, bernegosiasi dan berdiskusi membangun kesepakatan-kesepakatan dan perencanaan yang lebih lanjut. Forum juga merupakan tempat para pihak, terutama kelompok-kelompok tani hutan melakukan refleksi dan membahas perkembangan serta persoalan-persoalan yang ditemui dalam proses implementasi PHBM.
- ***Membentuk dan Membangun Kelompok Tani Hutan.*** Petani-petani hutan merupakan ujung tombak dalam PHBM, yang dalam keseharian bergulat mengurusi dan memelihara tanaman di lahannya. Kelompok-kelompok tani hutan (KTH) berfungsi sebagai organisasi petani tingkat paling bawah, beranggotakan petani-petani yang lahannya berhampiran, dan berfungsi untuk memperkuat petani baik secara sosial, politik, maupun teknik pengelolaan hutan.
- ***Pemetaan Hutan Desa Secara Partisipatif.*** Untuk kepentingan kejelasan dan kepastian dalam perencanaan pengelolaan hutan yang lebih rinci, perlu dibuat peta-peta hutan yang jelas; yang mencakup semua lahan hutan yang akan dikelola masyarakat di desa. Klasifikasi penggunaan lahan, pemilikan atau penguasaannya, serta tanda-tanda batasnya, adalah hal-hal yang perlu termuat dalam peta. Oleh karena itu, pemetaan ini perlu dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder di desa.
- ***Pendataan Penggarapan Lahan Hutan.*** Setelah peta hutan tersedia, perlu dilengkapi dengan data petani yang menggarapnya: siapa, di mana, berapa luas, jenis apa saja yang ditanam dan seterusnya. Data ini dapat pula dilengkapi dengan informasi-informasi lain yang relevan, semisal praktek-praktek pengelolaan hutan yang biasa dilakukan warga setempat, tingkat produksi tanaman tertentu, nilai ekonomi yang dapat diperoleh, dan lain-lain.

Dalam menggunakan manual ini, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, di antaranya :

(1) Beberapa kegiatan harus dilakukan lebih dulu daripada yang lain. Sebagai misal, pengenalan program PHBM tidak bisa dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan orientasi desa; masyarakat dan para pihak terkait di desa tidak bisa membangun kesepakatan tentang PHBM sebelum memiliki pemahaman lebih dulu mengenai program PHBM itu sendiri, dan seterusnya.

(2) Metoda teknis yang digunakan tidak harus sama seperti yang tercantum dalam manual, sebab masih banyak metoda lain yang bisa digunakan, dan penggunaan

metoda ini harus mempertimbangkan kondisi lokal. Misalnya dalam membangun kesepakatan desa, tidak harus metoda workshop (lokakarya) yang digunakan. Dapat saja digunakan pertemuan-pertemuan yang sudah biasa dilakukan masyarakat, atau metoda lain yang dipandang cocok dengan situasi desa setempat sehingga hasilnya diharapkan lebih baik.

(3) Fleksibilitas penggunaan metoda itu diharapkan tidak menjadikan output yang ingin dihasilkan dari setiap kegiatan menjadi kabur atau bahkan tidak tercapai, melainkan justru harus lebih mengoptimalkan hasilnya.

(4) Bagian per bagian, manual ini bisa digunakan oleh fasilitator baik secara perorangan maupun secara berkelompok atau tim. Namun dalam pelaksanaannya, banyak kegiatan yang akan membutuhkan kerja tim. Sehingga diharapkan bahwa para fasilitator yang akan bekerja bersama di suatu desa terlebih dulu dapat membangun kerjasama tim, yang prosesnya tidak dijelaskan dalam manual ini.

(5) Dipahami bahwa realitas masyarakat desa memiliki dinamika yang sangat kaya, maka manual ini akan bergantung pada penggunanya (fasilitator) untuk selalu menambahkan instrumen-instrumen berdasarkan pengamatan dan pengalaman di lapangan.

Orientasi Desa

Oleh: Ma'mun Samsudin

A. Pengantar

Ada sebuah cerita nyata tentang seorang fasilitator yang akan melakukan pendampingan di suatu desa hutan. Begitu yakinnya sehingga dia langsung tinggal di rumah seseorang yang menurutnya dikenal sebagai tokoh masyarakat. Hari demi hari terus berlalu. Setiap kali ia mengundang masyarakat untuk mensosialisasikan program yang akan ditawarkan, yang hadir hanya satu atau dua orang saja. Ia akhirnya merasa bosan dan jengkel sendiri sehingga program pendampingan yang akan dijalankannya menjadi gagal. Selidik punya selidik, ternyata ia tinggal di tempat yang salah. Orang yang dianggapnya tokoh masyarakat – tempat ia menumpang– ternyata bukan orang yang disukai masyarakat sehingga ia *disakompetdaunkeun* (Sunda: diperlakukan sama) seperti tuan rumahnya oleh masyarakat.

Berkaca pada cerita di atas, proses orientasi desa merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh seorang fasilitator sebelum mulai mengembangkan programnya di desa. Sebagai proses awal/ pembuka dalam pelaksanaan program implementasi PHBM, orientasi desa merupakan tahap yang tak dapat ditinggalkan. Terlebih lagi pada masa sekarang ini, saat kondisi masyarakat desa hutan umumnya lebih sensitif, selalu menaruh curiga kepada pendatang yang tidak dikenal yang masuk ke desanya. Ini terutama dikarenakan posisi masyarakat desa hutan yang lemah dan hampir selalu ditempatkan sebagai pihak yang mengganggu dan merusak hutan.

B. Pengertian

Orientasi desa adalah kegiatan untuk mengenali situasi dan kondisi lingkungan setempat, sebelum memulai suatu program kegiatan di desa. Melalui kegiatan ini fasilitator dapat mengenali karakter desa dan masyarakatnya, kondisinya pada saat program akan dimulai, serta dapat mengatur rencana kerja dan strategi pendekatannya secara lebih baik.

C. Tujuan

Orientasi desa ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memahami karakteristik sosial budaya masyarakat dan para pihak terkait di desa dalam rangka membangun proses-proses yang bersifat *bottom up*.
2. Mengidentifikasi hubungan dan besarnya pengaruh masing-masing pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan di desa

Para-pihak terkait

Para pihak terkait (*stakeholders*) dalam pengelolaan hutan di desa:

- Kepala desa & aparat desa
- KRPH/mantri hutan
- PKL, PPL, PYK
- Lembaga ekonomi desa/ koperasi
- BPD
- dll.

dan memetakannya.

3. Membangun kepercayaan, keterbukaan, dan suasana keakraban agar seluruh elemen masyarakat dan para pihak terkait di desa mau menerima kehadiran fasilitator dan lembaganya sebagai pihak luar yang baru datang.
4. Menumbuhkan kepercayaan dan mandat dari masyarakat kepada fasilitator dan lembaganya untuk melakukan proses fasilitasi selanjutnya dalam rangka penyiapan implementasi PHBM.
5. Mengawali proses-proses membangun kerjasama (kolaborasi) antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait lainnya di desa dalam konteks PHBM.
6. Mengoptimalkan hasil, memperkecil resiko kegagalan, serta mempermudah pelaksanaan fasilitasi di desa.

Sedangkan manfaat dari orientasi desa ini adalah:

1. Bagi masyarakat adalah sebagai media silaturahmi untuk saling kenal mengenal, tukar pengalaman dan informasi.
2. Sedangkan bagi fasilitator, selain manfaat tersebut juga diharapkan manfaat lainnya, yaitu:
   - *Sebagai media untuk memupuk kepercayaan (mandat) dari masyarakat kepada fasilitator untuk melakukan proses fasilitasi selanjutnya.*
   - *Sebagai bahan untuk merencanakan strategi dalam fasilitasi proses-proses selanjutnya, dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya serta hubungan dan kekuatan pengaruh pihak-pihak yang terkait di desa.*

D. Sasaran

Sasaran dari orientasi ini adalah seluruh elemen masyarakat dan para pihak terkait di desa, termasuk kelompok atau pihak-pihak yang kontroversial. Seluruh elemen tanpa dibatasi oleh perbedaan-perbedaan seperti agama, ras, adat, sikap politik, pendidikan, tingkat ekonomi, dll. Kelompok kontroversial yaitu elemen masyarakat yang bersikap antipati terhadap pihak lain, misalnya terhadap Perhutani, pemerintah desa, atau LSM, sebagai akibat dari perbenturan sikap dengan pihak-pihak tersebut.

Dalam kerangka PHBM sasaran ini harus bersifat menyeluruh agar manfaat, fungsi, dan kelestarian sumberdaya hutan betul-betul dimiliki dan menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang ada di desa. Tidak hanya dibebankan dan menjadi urusan salah satu atau beberapa pihak saja (misalnya KTH dan KRPH)[1].

E. Metoda

Metoda yang digunakan adalah anjangsana, diskusi-diskusi perorangan (*face to face*)

---

1 KTH : Kelompok Tani Hutan
KRPH : Kepala Resort Pemangkuan Hutan atau Mantri Hutan

2 Ini tidak berarti *pertama* secara harfiah. Bisa jadi, dan seringnya demikian, orang pertama yang ditemui fasilitator justru bukan kepala desa. Melainkan orang-orang lain yang kwat jalan pertemuan, perkenalan tak langsung atau dikenalkan kepada fasilitator, dan kemudian dipilih sebagai 'tuan rumah' sementara oleh fasilitator untuk masuk ke desa.

dan diskusi kelompok yang semuanya dilakukan secara santai dan informal. Artinya, diskusi-diskusi ini dapat dilakukan di mana saja (di rumah, kebun, sawah, hutan, warung, pinggir jalan, pos kamling) dan kapan saja (siang, sore, atau malam, di sela-sela waktu istirahat, dll.) menurut keperluannya.

F. Tahap-tahap Kegiatan

1. Perkenalan

Perkenalan ini penting dilakukan untuk membangun hubungan awal dengan seluruh komponen masyarakat dan para pihak terkait di desa. Perkenalan ini bertujuan membangun kepercayaan dan keterbukaan masyarakat terhadap fasilitator. Karena itu pertama-tama dilakukan secara orang per orang, terutama kepada para tokoh kunci di desa.

> Tidak ada materi khusus yang perlu disampaikan dalam perkenalan ini. Artinya bebas ngobrol apa saja, yang penting terjalin hubungan awal yang baik. Namun lebih baik apabila materinya bisa diarahkan pada tujuan program, yakni PHBM.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- Ketika pertama kali datang ke desa maka orang pertama yang perlu dikunjungi fasilitator adalah Kepala Desa[2]. Fasilitator diharapkan untuk memperkenalkan diri kepada Kepala Desa, menyampaikan maksud dan tujuan kegiatannya, dan selanjutnya secara lisan meminta izin untuk melakukan silaturahmi dengan masyarakat yang ada di desanya itu. Dalam kesempatan ini fasilitator dapat menanyakan siapa saja tokoh-tokoh di tiap-tiap dusun di desa tersebut yang perlu dikunjungi selanjutnya.
- Kunjungan berikutnya dilakukan kepada para kepala dusun. Seperti ketika berkunjung ke kepala desa, fasilitator diminta untuk memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan program dan meminta izin untuk melakukan silaturahmi lebih lanjut dengan masyarakat yang ada di dusunnya. Jangan lupa pula untuk menanyakan siapa tokoh-tokoh di dusun tersebut yang perlu dikunjungi.
- Kunjungan setelah itu adalah kepada elemen-elemen masyarakat lainnya seperti ketua-ketua KTH, koperasi desa atau lembaga-lembaga ekonomi desa yang lain, tokoh-tokoh agama/ pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan lain-lain.
- Yang juga penting adalah kunjungan kepada pihak-pihak terkait lainnya seperti PKK, PKL, PPL, BPD, KRPH/mantri, dan lain-lain.

Dari hasil perkenalan ini, fasilitator diharapkan mempunyai gambaran awal tentang calon-calon yang akan dijadikan sebagai tokoh kunci (*key person*) dalam implementasi PHBM nantinya. Bisa jadi ada perbedaan penunjukan tokoh di antara para pihak yang

dihubungi ini. Misalnya tokoh pemuda menurut kepala desa adalah A, tetapi menurut masyarakat umumnya adalah B. Adanya perbedaan penilaian atau perbedaan pandangan ini bisa jadi karena adanya perbedaan kepentingan atau sudut pandang antara masyarakat dengan Kepala Desanya.

Untuk menentukan siapa orang-orang (tokoh-tokoh) pertama yang harus dikunjungi, bisa pula dijajagi melalui desa-desa tetangga.
Di sini tokoh-tokoh tersebut akan dilihat sebagaimana penilaian pihak luar desa.

2. **Pengenalan tokoh-tokoh kunci**
Cara dan posisi yang diperankan fasilitator dalam proses ini tidak jauh berbeda dengan cara dan posisi dalam tahap perkenalan awal, namun lebih terfokus pada orang-orang yang akan dijadikan tokoh kunci bagi implementasi PHBM di tiap-tiap dusun. Dengan dikenalinya para calon tokoh kunci tersebut secara lebih mendalam dan lebih tajam, diharapkan tidak terjadi salah pilih. Namun demikian meskipun terfokus pada para calon tokoh kunci, fasilitator tidak boleh mengabaikan sasaran lainnya guna menunjang tercapainya harapan di atas.

Semakin sering terjadi interaksi (komunikasi dan diskusi) dan semakin banyak orang (pihak) yang terlibat dalam interaksi tersebut, maka semakin objektif pula proses penentuan tokoh kunci itu.

Berdasarkan pada kedua proses di atas lazimnya fasilitator sudah bisa menentukan siapa calon-calon yang akan dijadikan sebagai tokoh kunci di suatu desa. Namun, apabila belum bisa ditentukan secara pasti siapa yang cocok untuk dijadikan tokoh kunci maka pendekatan-pendekatan itu harus terus dilakukan.

Meskipun tidak ada kriteria khusus dalam menentukan tokoh kunci ini, tetapi bisa dilihat misalnya dari besar-kecilnya pengaruhnya terhadap orang lain, sikap yang responsif dan memiliki antusias tinggi terhadap pembicaraan, penuh perhatian, penuh semangat, dan yang penting adalah mampu memediasi dan memotivasi anggota masyarakat lainnya sehingga mau terlibat aktif dalam pengembangan program.

3. **Pendekatan personal (personal approach)**
Setelah tokoh-tokoh kunci ditentukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan personal, khususnya kepada para tokoh kunci dan umumnya kepada seluruh elemen masyarakat yang ada dengan tujuan lebih menumbuhkan keakraban dan mencairkan kecanggungan-kecanggungan yang masih ada antara fasilitator dengan masyarakat desa. Harapannya, pada akhirnya fasilitator tidak dipandang lagi sebagai tamu di desa melainkan sudah sebagai *partner* (kawan atau mitra).

4. **Pendekatan kelompok dan pemetaan para pihak**

Pendekatan kelompok ini dilakukan pada kelompok-kelompok masyarakat dengan tujuan selain sebagai upaya pengakraban diri, juga sebagai media untuk memperluas kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, khususnya dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

Kelompok-kelompok yang mungkin memiliki kepentingan dalam pengelolaan hutan di desa:
Pemda, Pemdes, Perhutani, KTH, koperasi, pondok pesantren, BPD, kelompok adat, PKK, karang taruna, dan lain-lain.

Sebagai *partner*, peran tokoh kunci sangat diharapkan mampu memotivasi kelompok-kelompok yang ada di dusun dan mampu memediasi pertemuan-pertemuan antara fasilitator dengan kelompok tersebut.

Selain pendekatan kelompok, yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah pemetaan para pihak, yang umumnya terwakili dalam kelompok-kelompok.

Tidak ada peranan khusus yang harus dilakukan fasilitator dalam pertemuan-pertemuan ini. Namun intinya adalah bagaimana fasilitator dapat menstimulasi kelompok-kelompok ini untuk mengungkapkan posisi dan hubungannya dengan pihak-pihak lain. Fasilitator bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana penilaian kelompok terhadap pihak-pihak lain yang dianggap berkepentingan dengan pengelolaan hutan di desa, misalnya kepala desa atau Perhutani.

Cara lainnya fasilitator dapat mengajak kelompok untuk melakukan refleksi tentang pengelolaan hutan di desa. Misalnya apa yang dirasakan, apa masalah-masalah yang dihadapi, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut, dan apa harapannya terhadap pengelolaan hutan desa? Dari jawaban-jawabannya, fasilitator bisa mendapatkan gambaran mengenai karakter sosial budaya masyarakat setempat, faksi-faksi yang ada serta hubungan dan kekuatan pengaruh masing-masing pihak yang ada di desa.

Harus diperhatikan bahwa fasilitator jangan mendominasi pembicaraan selama diskusi. Upayakan agar anggota-anggota kelompok yang lebih banyak berbicara dan bercerita.

5. **Analisis informasi**

Banyak informasi yang dapat diperoleh fasilitator dari proses-proses yang dijalani di atas. Informasi-informasi yang penting ini selanjutnya perlu dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai karakter sosial budaya masyarakat desa serta hubungan dan kekuatan pengaruh masing-masing pihak.

i. Analisis sosial budaya

Analisis sosial budaya adalah suatu cara untuk mengamati dan menilai karakter sosial budaya masyarakat berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh.

Pada langkah 2 s/d 4, materi diskusi bisa mengenai hubungan dan kekuatan pengaruh masing-masing pihak (personal atau pun kelompok), misalnya bagaimana sikap Perhutani, Kepala Desa dan pihak-pihak lain terhadap kepentingan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Sebaliknya dapat pula dibahas bagaimana respon masyarakat terhadap program-program yang datang dari pihak-pihak lain. Materi yang lain adalah pengenalan PHBM sepintas kilas (pengenalan yang lebih lanjut akan dibahas dalam Modul 2. Pengenalan Program PHBM) atau isu-isu lain tentang hutan guna mengetahui pengalaman, masalah, dan harapan para pihak terhadap hutan.

Yang harus diperhatikan dalam menggali informasi adalah:

1. Metoda, teknik atau cara
2. Sumber informasi
3. Manfaat (kegunaan) informasi

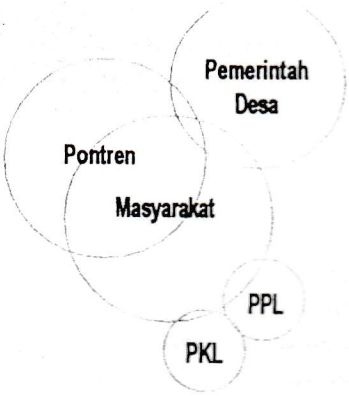
Objek yang dianalisis adalah bagaimana cara dan kebiasa-an hidup (adat), siklus kegiatan, mata pencaharian, cara mengambil keputusan dan orang yang terlibat dalam mengambil keputusan, cara berkelompok, cara melakukan komunikasi, nilai-nilai yang jadi pegangan, dan sebagainya. Semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin tajam pula analisis yang dihasilkan. Metoda, teknik atau cara analisis adalah melalui pengamatan dan penilaian terhadap informasi dan sumber informasi.

Sebagai contoh, pada waktu terjadi komunikasi dengan masyarakat, fasilitator bisa mengetahui bagaimana cara mereka menyampaikan pendapat, cara merespon, nilai-nilai yang dipegang, dll. Selain itu karakter sosial budaya masyarakat bisa diketahui pula melalui analisis hubungan dan kekuatan pengaruh pihak-pihak yang ada di desa.

ii. <u>Analisis hubungan dan kekuatan pengaruh</u>

Analisis ini adalah cara untuk mengamati dan menilai hubungan dan kekuatan pengaruh masing-masing pihak di desa berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh. Objek yang dianalisis adalah seberapa jauh hubungan dan seberapa besar kekuatan pengaruh masing-masing pihak yang ada di desa.

Metoda, teknik atau cara analisis adalah dengan memetakan hubungan dan kekuatan pengaruh masing-masing pihak. Pemetaan ini bisa dilakukan pada hubungan dan kekuatan pengaruh individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Pemetaan dimaksud bukanlah memberikan penilaian secara mutlak, melainkan penilaian relatif dengan cara perbandingan yang dituangkan dalam bentuk Diagram Venn (lihat gambar).



Gambar 1
Diagram Venn yang menunjukkan beberapa komponen di masyarakat desa dan keeratan hubungan di antaranya.

Lingkaran-lingkaran pada diagram di atas menunjukkan besar pengaruh tiap-tiap komponen masyarakat. Semakin besar ukuran lingkaran digambarkan, semakin besar pula kekuatan atau pengaruhnya, begitupula sebaliknya. Sementara, jarak antar lingkaran menunjukkan kedekatan hubungan antar komponen itu. Semakin jauh jarak antar lingkaran maka semakin jauh pula hubungannya, dan sebaliknya.

Diagram Venn di atas memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat lebih dekat dengan pondok pesantren (pontren) dari pada dengan pemerintah desa; apalagi dibandingkan dengan PKL dan PPL. Begitu pula kekuatan pengaruh pondok pesantren terhadap masyarakat lebih besar dari pada pemerintah desa. Bisa jadi ini berarti bahwa nilai-nilai agama yang dibawa pondok pesantren (atau tokoh pemimpinnya) lebih mendominasi budaya atau perilaku masyarakat di desa tersebut, tokohnya lebih dihormati dan pendapatnya lebih didengarkan.

Hubungan masyarakat dengan pemerintah desa lebih kecil bila dibandingkan dengan pondok pesantren. Hal ini bisa berarti bahwa hubungan dengan pemerintah hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat administratif, misalnya urusan KTP, sertifikat tanah, dll. Hubungan masyarakat dengan PKL dan PPL cukup dekat tetapi PKL dan PPL tidak bisa mempengaruhi masyarakat. Lagipula nampak tidak ada hubungan yang dekat (misalnya kerjasama) antara PKL dan PPL.

6. Penentuan strategi fasilitasi

Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan akan digunakan oleh fasilitator untuk menyusun strategi fasilitasi selanjutnya. Strategi fasilitasi yang dimaksud adalah metoda, teknik, atau cara apa yang akan digunakan fasilitator dalam proses pendampingan masyarakat dan para pihak terkait di desa. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya serta hubungan dan kekuatan pengaruh masing-masing pihak sehingga program dapat dikembangkan dengan hasil yang optimal, resiko kegagalannya kecil, serta pelaksanaan fasilitasinya dapat dipermudah.

Metoda-metoda ini misalnya menyangkut teknik atau cara apa yang akan digunakan dalam mengenalkan program PHBM, apabila budaya atau kebiasaan masyarakatnya sulit untuk berkumpul, atau bisa berkumpul tetapi waktu yang tersedia sangat terbatas, dan lain-lain.

G. Waktu Pelaksanaan

Pada dasarnya tidak ada standar waktu berapa lama proses ini harus dilakukan, sebab banyak faktor-faktor penentunya. Faktor-faktor itu di antaranya:

- Apakah fasilitator sudah dikenali sebelumnya oleh masyarakat setempat atau belum.
- Keterampilan dan pengetahuan yang dipunyai fasilitator, terutama misalnya keterampilan dalam melakukan pendekatan dan pengenalan diri kepada masyarakat.
- Frekuensi interaksi, yakni tingkat keseringan melakukan komunikasi dan diskusi dengan masyarakat. Faktor ini dipengaruhi pula oleh beberapa hal, misalnya tingkat kesibukan masyarakat, kebiasaan setempat, jarak tempuh ke lokasi pertemuan, dll.
- Dinamika yang ada di masyarakat, misalnya adanya proses-proses politik lokal (pemilihan kepala desa), kesibukan sosial-budaya-religi atau ekonomi masyarakat (upacara adat, bulan puasa, masa panen), situasi konflik, dll.

Bedasarkan pengalaman lapangan, dalam kondisi normal orientasi desa ini bisa dilakukan dalam waktu sekitar 2-4 minggu.

H. Indikator Keberhasilan

Beberapa indikator keberhasilan dari kegiatan orientasi desa ini misalnya:

- Adanya penerimaan dari masyarakat kepada fasilitator khususnya dan lembaga pendamping (lembaga asal fasilitator) umumnya untuk bekerja di desa. Adanya kepercayaan (mandat) dari masyarakat kepada fasilitator dan lembaganya untuk melakukan proses fasilitasi seterusnya.
- Fasilitator berhasil mengenali tokoh-tokoh kunci (*key persons*) pada tiap dusun.
- Fasilitator mengenali karakteristik sosial budaya masyarakat, posisi para pihak terkait (khususnya menyangkut pengelolaan hutan di desa), serta dapat memetakan hubungan dan kekuatan para pihak tersebut.

Tips untuk Fasilitator

1. Fasilitator harus memahami dan terampil dalam melakukan teknik-teknik pengenalan diri dan pendekatan masyarakat.
2. Fasilitator harus mampu meyakinkan dan menumbuh-kan kepercayaan masyarakat bahwa ia dan lembaga-nya berada di pihak masyarakat.
3. Fasilitator yang harus mendatangi kelompok sasaran, dan bukan sebaliknya. Sedapat mungkin diskusi atau pertemuan dilakukan di tempat sasaran. Jika perlu, diskusi dapat dilakukan di kebun pada saat beristira-hat, dan tempat-tempat lain yang kondusif.
4. Fasilitator sedapat mungkin mengikuti dinamika yang ada di masyarakat. Fasilitator

tidak boleh memaksakan kehendak, misalnya saja dalam penentuan waktu dan tempat pertemuan. Lebih baik masyarakat yang menentukan sementara fasilitator mengikutinya, sekalipun pertemuan tersebut dilakukan pada waktu dan tempat yang mungkin tidak menyenangkan. Namun demikian fasilitator boleh saja 'menawar' atau mendiskusikan alternatif-alternatif yang bisa disepakati bersama.

Teknik-teknik pendekatan masyarakat

1. Memperhatikan etika dan kebiasaan sasaran.
2. Berlaku sopan dan ramah-tamah dan bersahabat.
3. Bicara yang jelas, lugas, tepat sasaran dan mampu mencairkan suasana (misalnya diselingi canda).
4. Bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti.
5. Tidak mengundang kecurigaan.
6. Informal.

5. Fasilitator dianjurkan untuk membangun komunikasi atau diskusi dengan cara yang santai dan informal. Suasana santai dan informal ini memungkinkan sumber informasi lebih lancar dan lebih banyak berbicara.
6. Fasilitator dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan sopan. Lebih baik jika menggunakan bahasa lokal yang dipakai sehari-hari (misalnya bahasa Sunda di Jawa Barat).
7. Fasilitator diminta menunjukkan keseriusan, keuletan, dan selalu bersemangat dalam setiap kegiatan atau diskusi bersama masyarakat.
8. Fasilitator yang baik tidak akan mengobral janji. Janji-janji yang tidak terpenuhi akan membuat kecewa masyarakat, dan mengurangi kepercayaan kepada fasilitator dan lembaganya.

Pengenalan PHBM

Oleh: Nana Juana

A. Pengantar

PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) merupakan satu pendekatan pengelolaan hutan yang baru di Indonesia. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan oleh pihak Perhutani sekitar tahun 1999. Perhutani menggulirkan PHBM sebagai upaya untuk memperbaiki citra diri dan kinerjanya karena telah dianggap gagal dalam mengelola salah satu aset yang dimiliki negara, yaitu sumberdaya hutan. Pola-pola pengelolaan yang terdahulu dianggap tidak berhasil meningkatkan atau menjaga kelestarian hutan serta gagal menyejahterakan masyarakat di sekitarnya.

Karena merupakan hal baru maka belum banyak pihak yang tahu, seperti apa dan bagaimana sistem PHBM itu sebenarnya. Oleh sebab itu, tahap pengenalan PHBM ini merupakan hal yang penting dilakukan, khususnya bagi masyarakat sekitar hutan yang akan menjadi pelaku utama dalam implementasi sistem PHBM. Proses pengenalan PHBM kepada masyarakat ini harus dilakukan secara benar dan terus menerus. Maksudnya agar masyarakat tidak salah memahami pengertian dan segala informasi mengenai PHBM. Selain itu agar mereka bisa benar-benar menjiwai dalam pelaksanaannya karena PHBM sesuai dengan kebutuhannya.

B. Pengertian

Pengenalan PHBM adalah suatu proses untuk menyampaikan segala informasi dan pengetahuan tentang sistem pengelolaan hutan yang akan dilakukan secara bersama (PHBM) kepada seluruh komponen masyarakat di desa. Proses pengenalan PHBM ini merupakan salah satu bagian dari tahap penyiapan masyarakat desa sebelum mengimplementasikan sistem PHBM.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang PHBM kepada seluruh komponen masyarakat di desa, baik yang akan mendapat manfaat secara langsung maupun tidak dari pelaksanaan kegiatan sistem PHBM ini.

D. Output

Output yang diharapkan melalui kegiatan ini yaitu PHBM dapat menjadi wacana umum di tingkat desa. Selain itu, PHBM dapat dipahami secara sama serta menjadi suatu pola pengelolaan hutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat mau melaksanakan PHBM dengan penuh kesadaran dan tanpa keterpaksaan karena dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhannya, misalnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

E. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh lapisan masyarakat dan para pihak di desa, baik yang terkait langsung dengan pengelolaan hutan di desa mupun tidak. Di antaranya adalah kelompok-kelompok tani hutan (KTH), lembaga pemerintahan desa, badan perwakilan desa (BPD), lembaga-lembaga ekonomi desa/koperasi, pamong desa dan pemuka-pemuka masyarakat, PKK, karang taruna, dan lain-lain. Kelompok informal lain di masyarakat yang dapat dijadikan sasaran kegiatan pengenalan PHBM, misalnya kelompok pedagang, kelompok tukang ojeg, kelompok peternak, dan lain-lain.

F. Metoda

Metoda yang dapat dipakai dalam kegiatan pengenalan ini bisa dengan cara *ngobrol* santai/dialog/ diskusi interaktif secara personal ataupun melalui pertemuan-pertemuan masyarakat, formal maupun informal. Dapat juga dengan memakai metoda yang lain, misalnya melalui perantara tokoh ulama yang biasa melakukan ceramah dalam pengajian-pengajian di masyarakat. Unsur media dapat digunakan untuk memperlancar penyampaian materi dalam pengenalan program PHBM ini, misalnya dengan *leaflet*/brosur, poster, berita dan iklan radio, dan lain-lain.

Guna mempermudah proses penerimaan dan pemahaman oleh masyarakat, proses pengenalan PHBM hendaknya disampaikan dengan bahasa yang sederhana, yaitu bahasa sehari-hari masyarakat setempat dan menggunakan metoda-metoda yang menyenangkan serta menarik perhatian, misalnya dengan bantuan alat-alat peraga. Selain itu, kegiatan ini sebaiknya tidak dilakukan hanya dengan satu atau dua kali kunjungan saja, tetapi harus merupakan proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Sampaikanlah informasi tentang PHBM dalam situasi yang santai, informal, tapi lugas serta tetap mengindahkan etika, kesopanan, dan suasana persahabatan.

G. Tahap-tahap Kegiatan

1. Penyiapan alat dan bahan

Peralatan yang dimaksud disini adalah alat-alat peraga yang dapat digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman masyarakat. Misalnya kertas plano, kertas meta plan, spidol, selotip, gambar-gambar yang relevan dengan topik yang akan didiskusikan, permainan-permainan/*game*, ataupun media lainnya. Beberapa permainan dapat digunakan untuk mencairkan suasana dan mengakrabkan hadirin, beberapa yang lain untuk membangkitkan gagasan dan memudahkan pemahaman. Bahan yang perlu disiapkan fasilitator adalah materi-materi yang menyangkut PHBM seperti Buku *Ngamumule Leuweung*–Rencana Strategis Sistem PHBM Kuningan; Pokok-pokok Implementasi Sistem PHBM Kuningan; Prinsip, Kriteria, dan Indikator Sistem PHBM Kuningan; dan lain-lain.

2. Penyiapan tim fasilitator

Tim fasilitator maksudnya adalah kelompok yang akan memfasilitasi kegiatan pengenalan PHBM. Tim antara lain berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak terkait, sebagai moderator dalam pertemuan-pertemuan, maupun

sebagai pihak yang akan menyampaikan segala informasi tentang PHBM. Tim ini sebaiknya terdiri dari orang-orang yang telah diidentifikasi dalam proses orientasi desa, misalnya tokoh-tokoh kunci yang punya cukup pengaruh di mata masyarakat serta dapat membantu menyampaikan informasi PHBM kepada masyarakat lain. Selain itu, tim fasilitator dapat pula terdiri atas unsur LSM, petugas dinas/instansi terkait, seperti PKL, PPL, dan KRPH.

Sebelum tim fasilitator ini dibentuk, tentu saja orang-orang yang akan masuk ke dalam tim harus menyamakan persepsi dan memahami dulu segala sesuatu tentang PHBM. Dalam hal ini, inisiator pertama dapat melakukan proses pengenalan PHBM, baik secara personal maupun melalui diskusi bersama dengan pihak-pihak yang akan menjadi tim fasilitator.

3. Penyampaian materi / informasi PHBM

a. Secara personal

Proses terpenting dalam kegiatan pengenalan sistem PHBM tentu saja adalah proses penyampaian materi atau informasi tentang PHBM itu sendiri kepada seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara penyampaian informasi atau pengetahuan tentang PHBM ini adalah melalui pertemuan secara personal (orang per orang). Penyampaian secara personal ini dilakukan oleh fasilitator dengan cara *anjang sana* ke rumah-rumah penduduk, menemui para penggarap di lahan garapannya, aparat desa di balai desa, tokoh agama di masjid/musholla dusun, dan lain-lain.

Agar materi PHBM bertambah wacana dan muatannya maka fasilitator mengupayakan untuk tidak hanya menyampaikan secara satu arah. Tapi fasilitator harus pandai juga menggali pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat masyarakat tentang pengelolaan hutan yang baik, terutama yang berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokal yang spesifik. Salah satu caranya, misalnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada masyarakat yang difasilitasi.

Guna memudahkan dan mengefektifkan kinerja proses pengenalan PHBM ini maka sebaiknya penyampaiannya dilakukan secara tim, seperti disampaikan pada tahapan kegiatan sebelumnya. Setiap personal anggota tim fasilitator saling berbagi tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan materi pengenalan PHBM kepada pihak-pihak di desa. Bila perlu, tim fasilitator ini semakin bertambah keanggotannya dengan melibatkan juga orang-orang setempat yang telah cukup memahami dan bisa didengar suaranya oleh masyarakat lain.

b. Melalui pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat

Metoda lain untuk penyampaian dan penggalian materi atau pengetahuan tentang PHBM adalah dengan cara pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat. Misalnya dengan memanfaatkan pertemuan kelompok yang telah ada (rutin diadakan), seperti pengajian, rapat desa, rapat karang taruna, dan lain-lain. Ataupun dengan mengadakan pertemuan-pertemuan yang baru di tingkat kelompok masyarakat.

i) Pertemuan informal

Pertemuan informal ini maksudnya adalah pertemuan di kelompok

masyarakat yang diadakan tidak secara resmi, baik rutin maupun tidak. Waktu dan tempatnya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan kelompok masyarakat yang akan berkumpul. Misalnya pertemuan kelompok petani penggarap di ladang/sawah pada saat istirahat siang, pertemuan kelompok ojeg di pangkalan, pertemuan antar 4-5 orang tetangga rumah yang berdekatan pada saat selesai makan malam (ba'da Isya), pengajian mingguan/bulanan ibu-ibu atau bapak-bapak, dan lain-lain.

ii) Pertemuan formal

Pertemuan formal adalah pertemuan yang biasanya diadakan secara resmi, misalnya dengan menggunakan surat undangan resmi dan telah rutin diadakan. Di antara pertemuan-pertemuan formal yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan informasi pengenalan PHBM adalah pertemuan arisan PKK, rapat karang taruna, rapat dusun/desa, dan lain-lain. Fasilitator melalui metoda pertemuan kelompok ini, baik secara sendiri ataupun secara tim dapat mengenalkan PHBM kepada semua lapisan masyarakat. Dari masyarakat ini, fasilitator dapat pula menggali gagasan-gagasan baru tentang pengelolaan hutan kolaboratif yang baik, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan lokal mereka. Baik dari masyarakat yang secara langsung berinteraksi dengan hutan maupun tidak. Guna tercipta proses yang *bottom up* maka fasilitator dapat membangun proses pertemuan kelompok ini dari tingkatan yang terendah di desa. Misalnya mulai dari pertemuan antar tetangga terdekat atau tingkat RT, tingkat dusun, dan terakhir meningkat ke pertemuan tingkat desa.

4. Evaluasi bersama

Tahap kegiatan ini perlu dilakukan oleh tim fasilitator untuk melihat perkembangan, kekurangan, dan hasil dari tahap pengenalan PHBM yang telah dilakukan. Evaluasi ini bisa dilakukan secara rutin ataupun temporari berdasarkan kebutuhan. Dengan evaluasi ini juga, tim fasilitator dapat menentukan rencana strategis selanjutnya, termasuk mencoba dan mengembangkan metoda-metoda baru untuk menyampaikan materi PHBM.

H. Waktu Pelaksanaan

Pada dasarnya tidak ada waktu standar berapa lama proses pengenalan PHBM harus dilakukan. Hanya berdasarkan pengalaman, pengenalan ini setidaknya dilakukan 10 kali pertemuan atau dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Namun proses pemahamannya sendiri kepada masyarakat dapat dilakukan terus menerus agar masyarakat tidak salah memahami pengertian dan segala informasi mengenai PHBM. Selain itu agar masyarakat menjiwai pelaksanaannya sehingga PHBM sesuai dengan kebutuhannya.

I. Faktor-faktor Penghambat

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi/menghambat keberhasilan proses pengenalan PHBM ini, di antaranya:

1. Sikap-sikap negatif fasilitator, seperti mementingkan kelompok tertentu saja, tidak sabar menghadapi kritikan, ragu-ragu dalam penyampaiannya, arogansi, serta memandang lemah masyarakat.
2. Dinamika keseharian di masyarakat, seperti tidak bisa berkumpul siang hari karena adanya kesibukan/aktivitas sehari-hari.
3. Karakter dan tingkat pemahaman kelompok sasaran yang akan difasilitasi yang berbeda-beda.
4. Dukungan aparat desa yang lemah, baik tingkat dusun maupun tingkat desa.

Tips bagi Fasilitator dalam Pengenalan PHBM

- Memahami konsepsi dan informasi tentang PHBM, sebab bila tidak bisa menjadi 'bumerang'.
- Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti dalam penyampaiannya.
- Memanfaatkan media lembaga/kelompok yang ada di masyarakat, misalnya: kelompok pengajian, kelompok arisan ibu-ibu PKK, kelompok karang taruna, dll. Fasilitator dapat berbaur dengan masyarakat tersebut untuk menyampaikan program PHBM. Proses pengenalan melalui pertemuan kelompok ini merupakan media yang paling efektif dalam mengakomodir kepentingan antar pihak.
- Tidak hanya terpaku pada pertemuan kelompok formal, tapi dapat juga melalui kegiatan informal. Fasilitator mencoba untuk melihat secara langsung kegiatan sehari-hari komunitas masyarakat, misalnya dengan menemui masyarakat yang sedang bekerja di ladang atau hutan. Yang perlu diingat di sini bahwa fasilitator jangan melihat aktivitasnya masyarakat, apalagi sampai ada omongan yang kurang berkenan atau perasaan gengsi/malu untuk menemuinya. Bila perlu bisa bergabung dalam pekerjaan masyarakat, seperti menyangkul, menyabit rumput, dll.
- Pendekatan melalui tokoh kunci, yaitu orang yang disegani, dihormati, berwibawa, serta menjadi panutan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengikutsertakannya dalam pengenalan selanjutnya, penyusunan rencana dan pelaksanaan PHBM.
- Jangan cepat putus asa dalam memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran, walaupun tingkat pemahaman masyarakat kurang dan kadang-kadang ada penolakan dari masyarakat.
- Harus siap berargumentasi dengan kelompok masyarakat yang tingkat pengetahuannya di atas rata-rata dari yang lainnya, misalnya kelompok masyarakat yang vokal/kritis.

- Jangan meninggalkan masyarakat, bersikap anti pati, serta membenci kelompok masyarakat yang menolak. Fasilitator sedapat mungkin harus bisa mendekati kembali, memberikan pemahaman yang lebih mendalam, serta menanyakan alasan masyarakat tidak menerima.
- Jangan menjanjikan sesuatu kepada masyarakat. Apalagi memberikan harapan kepada masyarakat, bahwa usulan masyarakat akan direalisasikan segera. Karena dengan demikian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung akan ada ketergantungan terus terhadap fasilitator.
- Memperhatikan penampilan yang formal akan membuat masyarakat yang diajak berbicara merasa segan, takut, serta hanya mengangguk-angguk saja (*sumuhun dawuh*, Bahasa Sunda, red.) dan tidak memberikan tanggapannya. Hal ini dapat menimbulkan tanda tanya pada diri fasilitator, apakah meraka itu talah paham ataukah tidak.
- Jangan berpihak atau mementingkan kelompok tertentu, hal ini akan mengakibatkan kecemburuan dari yang lain.

Membangun Kesepakatan Desa Melalui Metode Workshop

Oleh: Rachmat Firmansyah

A. Pengantar

Musyawarah desa merupakan sebuah media awal bagi para pihak di desa untuk berkolaborasi dalam implementasi sistem PHBM. Musyawarah tersebut diselenggarakan untuk membangun dan menegosiasikan secara mendalam tentang pilihan-pilihan rencana kegiatan yang strategis dalam mengimplementasikan sistem PHBM. Masyarakat desa dan atau melalui fasilitasi pihak-pihak lain sebaiknya melakukan sendiri persiapan forum musyawarah desa tersebut. Pihak lain di sini bisa dari aparat pemerintahan ataupun dari lembaga independen seperti LSM, pesantren, perguruan tinggi. Mereka berfungsi sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan supervisor.

Siapapun inisiator yang tampil dalam mempersiapkan desa untuk siap melaksanakan sistem PHBM, prosesnya haruslah dibangun secara *bottom up*. Kita hendaknya memfokuskan perhatian bahwa rakyatlah yang merupakan pelaku utama dalam sistem PHBM. Di luar daripada itu, para pihak yang lain adalah para pendukung yang akan memfasilitasi dan melayani rakyat. Proses *bottom up* tersebut sebaiknya dimulai dari proses persiapan musyawarah ke tingkat masyarakat, terutama masyarakat petani hutan, sampai pada kegiatan pelaksanaannya, baik di tingkat dusun maupun desa.

Workshop desa merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam musyawarah di tingkat desa. Metode workshop desa diyakini, bisa membangun prinsip kebersamaan dan kesetaraan dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. Melalui prinsip tersebut diharapkan semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan informasi yang sama dan setara serta mengungkapkan informasi dengan setara pula.

B. Pengertian

Workshop desa adalah metoda dalam pertemuan musyawarah para pihak di desa yang dilakukan secara intensif (dilaksanakan 1-2 hari) guna membangun kesepakatan-kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dibangun merupakan hasil kompromi masyarakat dengan para pihak lain yang terlibat sebagai peserta, seperti Perhutani (KRPH), KCD,

PKL, PPL, dll. Workshop ini dilakukan dengan mengacu pada kaidah Pendidikan Orang Dewasa dan menerapkan metode-metode yang menyenangkan, memotivasi orang untuk berbicara, serta memanfaatkan berbagai permainan (*game*) untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran tertentu.

C. Tujuan

Workshop desa ini bertujuan untuk:

1. Memfasilitasi masyarakat dalam memahami kondisi lingkungannya;
2. Memfasilitasi masyarakat dalam membangun kepedulian dan rasa memiliki terhadap PHBM;
3. Memfasilitasi masyarakat dalam menyelaraskan rencana persiapan PHBM;
4. Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan kompromi untuk menentukan agenda kegiatan bersama;
5. Menentukan pembagian peran yang jelas dalam pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilakukan secara bersama.

D. Output

Kesepakatan desa dalam bentuk dokumen rencana kegiatan untuk menyiapkan desa dalam implementasi PHBM.

E. Tahap-tahap Kegiatan

a. Persiapan Workshop (Workshop Need Assesment)

1. Penjajagan workshop

Proses penjajagan workshop diawali dengan membangun penyamaan pemahaman di tataran masyarakat dan fasilitator lain tentang tujuan dan perlunya workshop serta manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaannya. Pemahaman ini diperlukan untuk menjajagi kebutuhan para pihak akan pelaksanaan workshop. PHBM merupakan hal baru bagi semua pihak, oleh sebab itu proses penyamaan pemahaman tentang PHBM maupun tahap penjajagan ini perlu terus dilakukan secara berkesinambungan. Metode yang dapat digunakan oleh fasilitator (dalam hal ini inisiator pertama) bisa melalui pendekatan individu maupun pendekatan kelompok. Proses penjajagan kebutuhan untuk pelaksanaan workhsop ini dapat dilakukan berbarengan dengan proses pengenalan PHBM.

2. Pembentukan tim fasilitator

Pembentukan Tim Fasilitator dilakukan setelah masyarakat dan calon fasilitator lain menganggap bahwa workshop desa perlu diadakan. Tujuannya adalah untuk membangun kebersamaan dan kesetaraan sesama anggota tim, yang nantinya akan bekerja bersama dalam memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan workshop. Anggota tim sebaiknya terdiri dari unsur masyarakat, aparat desa, LSM, KCD Hutbun dan PKL, KCD Pertanian dan PPL, serta Staf Perhutani. Tim ini selanjutnya menyepakati pembagian peran dan tugas masing-masing secara dinamis.

Muatan dalam Penjajagan Workshop

- *Perkenalan personal dan lembaga*, dimaksudkan untuk memperkenalkan identitas dan asal usul pihak inisiator, baik identitas diri maupun identitas kelembagaannya. Materi ini juga dimaksudkan untuk menjelaskan misi kedatangan inisiator ke desa tujuan, yaitu dalam upaya mempersiapkan desa menerapkan PHBM.
- *Pemaparan prinsip dan kriteria PHBM*, dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang PHBM. **[lihat : Bab Pendahuluan]** Dengan dipahaminya prinsip dan kriteria PHBM, para pihak yang akan terlibat dalam PHBM nantinya dapat mengetahui di mana peran dan tugas masing-masing serta persiapan apa yang harus dilakukan.
- *Pemaparan kriteria desa siap PHBM dan langkah-langkahnya*, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana, sebuah desa dinyatakan siap mengimplementasikan PHBM. Kegiatan penyiapan desa tersebut ditata dengan tahapan yang jelas dan teratur.
- *Penjajagan kebutuhan akan workshop*, dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masyarakat maupun fasilitator lain akan pelaksanaan workshop. Inisiator mengawali dengan memaparkan maksud dan tujuan serta manfaat workshop. Kejelasan dan keteraturan sebuah desa dalam mempersiapkan dirinya, dapat digali melalui sebuah workshop di tingkat desa. Oleh karenanya, dengan dipahaminya maksud dan tujuan serta manfaatnya tersebut, masyarakat dan fasilitator dapat menganggap perlu dengan diadakannya workshop desa. Pada akhirnya diharapkan mereka jadi mengetahui peran dan tugas masing-masing dalam perencaanaan workshop yang harus dilakukan.

3. **Penyiapan materi / bahan**

   Bahan atau materi yang perlu disiapkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan workshop di antaranya kertas plano, metaplan, selotip, alat-alat tulis, kerangka acuan/modul workshop, dll.

4. **Pengumpulan data keadaan umum desa**

   Pengumpulan data keadaan umum desa merupakan tahap pengumpulan data dan informasi yang ada di desa. Tujuan pengumpulan data keadaan umum desa adalah untuk:

   - Mengumpulkan data demografi dan monografi desa;
   - Mengetahui karakteristik sosial-budaya masyarakat dan aparat desa;
   - Menginventarisir persepsi dasar yang bersifat pribadi tentang kondisi

masyarakat dan lingkungannya;

- Mengetahui kondisi hubungan masyarakat dengan aparat desa, petugas Perhutani, maupun petugas instansi lain;
- Mengetahui kondisi hubungan masyarakat dengan sumberdaya alam (hutan);
- Mendapatkan tokoh kunci (key person) di setiap dusun dan atau menghubungi kembali tokoh kunci yang sudah dikenal sebelumnya pada proses sosialisasi program.

Idealnya tahap pengumpulan data tidak hanya dilakukan di tingkat desa tapi juga ke setiap dusun. Tahap pengumpulan data keadaan umum desa ini perlu dilakukan karena dapat menentukan strategi proses-proses selanjutnya. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh tim fasilitator untuk mengumpulkan data keadaan umum desa ini adalah melalui :

i. **Pendekatan personal**

Dilakukan di tataran masyarakat kepada para penggarap, tokoh kunci, aparat desa, maupun pihak lain yang ada di desa. Metodenya dilakukan dengan cara *anjangsana* atau silaturahmi secara pribadi.

Untuk menentukan orang-orang yang akan ditemui dapat digunakan metode bola salju (*snowball*), yaitu sebuah metode sederhana untuk memperoleh responden secara acak. Caranya dengan menanyakan nama responden yang harus ditemui kepada responden pertama, selanjutnya fasilitator menemui orang yang disebut oleh responden pertama tersebut. Demikian selanjutnya, sehingga fasilitator dapat menemui banyak responden.

Nama responden juga dapat diperoleh dari nama-nama orang yang disebutkan oleh seorang responden ketika ia bercerita kepada fasilitator. Nama-nama yang akan ditemuai dapat di-*cross check* kepada tiap responden yang ditemui, maksudnya untuk menghindarkan terjadinya bias informasi.

ii. **Pertemuan-pertemuan informal**

Pertemuan informal dilakukan bersama-sama dengan anggota masyarakat di tingkat dusun, yang melibatkan juga tokoh-tokoh kunci dan para petani hutan. Pelaksanannya bisa memanfaatkan media pertemuan yang telah ada di masyarakat, seperti pertemuan keagamaan, arisan ibu-ibu, pertemuan kelompok tani, rapat karang taruna, dll.

5. **Penentuan calon peserta, waktu, dan tempat**

i. **Penentuan peserta**

Penentuan peserta yang dilakukan secara partisipatif penting dilakukan karena dapat menjamin berlangsungnya proses *bottom up*, selain untuk membangun demokrasi di desa. Penentuan peserta hendaknya dilakukan di setiap dusun dan untuk memastikan bahwa pencalonannya betul-betul hasil partisipasi masyarakat, kondisikan agar masyarakat menentukan sendiri wakil-wakilnya.

Peserta harus mencakup perwakilan dari semua unsur masyarakat yang ada desa, seperti : para penggarap, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, gender, aparat

desa, maupun lembaga-lembaga yang ada di desa (lembaga ekonomi desa, PKK, LKMD, BPD). Kelompok-kelompok tertentu yang punya peran penting di masyarakat pun dapat dilibatkan, misalnya kelompok tukang ojek, pedagang, dll. Peserta lain adalah unsur aparat pemerintah terkait, seperti Perhutani/KRPH, KCD, PKL, PPL, ataupun pihak swasta yang bergerak dibidang kehutanan atau bisnis hasil hutan.

Saat penentuan peserta, fasilitator dapat mengarahkan agar keterwakilan unsur penggarap bisa lebih banyak, karena penggaraplah yang nantinya akan secara langsung berinteraksi dengan hutan. Begitupun dengan keterwakilan perempuan, sehingga dalam prosesnya nanti tidak terjadi bias gender. Karena, pada kenyataannya perempuan pun banyak terlibat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

ii. Penentuan waktu dan tempat

Penentuan waktu pelaksanaan workshop sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan waktu masyarakat, sehingga kegiatan workshop nantinya tidak mengganggu kesibukan masyarakat sehari-hari ataupun sebaliknya. Penentuan tempat pelaksanaan pun sebaiknya diputuskan berdasarkan kesepakatan masyarakat, walaupun biasanya untuk sebuah musyawarah desa masyarakat akan melakukannya di Balai Desa.

6. Konfirmasi peserta

Konfirmasi peserta dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon peserta, baik dari masyarakat maupun dari pihak lain, tidak lupa dan pasti akan menghadiri workshop. Konfirmasi juga dilakukan kepada para pejabat pemerintahan tingkat kecamatan yang akan diundang untuk menghadiri pelaksanaan workshop. Tahap ini juga dimaksudkan untuk mengingatkan peserta agar mempersiapkan diri tentang apa-apa yang akan disampaikan selama workshop.

7. Konfirmasi waktu dan tempat

Konfirmasi waktu dan tempat dimaksudkan untuk menentukan kepastian hari-H dan kepastian lokasi pelaksanaan workshop yang telah ditentukan. Konfirmasi ini juga diperlukan untuk menguhubungi kembali calon-calon peserta apabila ada perubahan waktu dan tempat. Undangan untuk mengikuti workshop dapat juga disampaikan bersamaan dengan tahapan ini. Undangan ada baiknya dibuat oleh kepala desa setempat atau dibuat oleh fasilitator, tapi kepala desa ikut mengetahui atau turut mengundang.

8. Desain session

Fasilitator menyusun desain session (skenario) pelaksanaan workshop berdasarkan pada catatan-catatan hasil proses penjajagan. Session workshop harus didesain untuk mengakomodir issu-issu yang ada, masalah yang muncul, tujuan yang ingin dicapai, dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah

yang ada.

Desain workshop harus disesuaikan dengan komposisi peserta yang akan hadir sehingga dapat mengakomodir kepentingan semua unsur peserta. Selain itu juga berisi tentang tugas dan peran dari setiap fasilitator dan panitia yang akan terlibat di dalamnya. Metode yang akan dipakai dalam tiap session juga ditentukan pada desain session ini.

b. Pelaksanaan Workshop

Di awal pelaksanaan, fasilitator dapat memandu peserta untuk memperjelas materi-materi yang ingin dibahas, serta proses dan kesepakatan yang akan dibangun. Agar berlangsung efektif dan terarah, fasilitator dapat menggunakan media gambar, foto, dan catatan-catatan hasil proses penjajagan yang ditempel di dinding tempat workshop berlangsung.

Materi yang dimaksud di antaranya tentang (1) peran masyarakat dan para pihak lain dalam pengelolaan sumberdaya hutan selama ini; (2) permasalahan yang dihadapi; (3) potensi yang dimiliki; (4) keberadaan dan fungsi kelembagaan yang ada, terutama kelembagaan petani hutan; dan lain sebagainya. Sedangkan kesepakatannya berupa kegiatan-kegiatan penyiapan desa yang harus dibangun untuk mengimplementasikan sistem PHBM. Misalnya : (1) adanya lembaga di desa yang bisa mewadahi para pihak untuk berkolaborasi dalam psdh; (2) kejelasan batas antar desa di hutan; (3) adanya kelompok tani hutan yang kuat dan mandiri; (4) adanya aturan desa yang dapat memihak kepentingan masyarakat banyak.

Metode yang dipakai pada pelaksanaan workshop adalah :

1. **Fasilitasi partisipatif.** Proses pemanduan diskusi-diskusi yang berlangsung dalam workshop ini mengacu pada kaidah-kaidah Pendidikan Orang Dewasa. Seluruh peserta yang ada adalah narasumber. Fasilitator hanya berperan sebagai pengatur lalulintas pembicaraan, membuat kesimpulan sementara untuk dilempar kembali kepada peserta (*parafrase*), memotivasi peserta yang tidak aktif untuk berbicara, dan mengeliminir (mengurangi) dominasi pembicaraan oleh orang-orang tertentu. Fasilitator tidak boleh menggurui, tapi hanya memberikan klarifikasi bila ada pemahaman peserta yang tidak benar.
2. **Memperbanyak diskusi-diskusi kelompok.** Apabila peserta cukup banyak sebaiknya dibagi dalam kelompok-kelompok diskusi yang lebih kecil. Diskusi kelompok dapat membahas materi yang sama untuk setiap kelompok, atau masing-masing kelompok membahas hal yang berbeda. Pilihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan. Metode diskusi kelompok ini akan mengefektifkan proses diskusi dan memacu seluruh peserta untuk aktif. Setiap kelompok diskusi sebaiknya beranggotakan peserta yang bervariasi, artinya mengandung perwakilan dari setiap unsur peserta.

3. **Menggunakan model-model presentasi yang variatif,** seperti *delphi*, *fish bowl*, dll.

Tahapan presentasi model *Delphi* adalah seperti berikut:

- Kelompok diskusi dibagi menjadi beberapa grup kecil sejumlah kelompok diskusi yang ada.
- Dibentuk kelompok diskusi baru yang setiap kelompoknya berisikan grup-grup kecil dari setiap kelompok diskusi sebelumnya.
- Setiap kelompok baru membahas hasil diskusi kelompok yang lama.
- "Tuan rumah" (grup kecil yang materi hasil diskusi di kelompok lama sedang dibahas) harus mempresentasikannya kepada anggota yang berada di kelompok barunya.
- Setelah selesai, kelompok baru tersebut pindah ke hasil diskusi kelompok yang lainnya.

Fish bowl adalah model presentasi oleh perwakilan setiap kelompok dalam satu forum diksusi umum, tahapannya:

- Setiap kelompok diskusi menunjuk 1 atau 2 orang wakilnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, pada forum diskusi umum.
- Perwakilan setiap kelompok, duduk dalam satu meja forum diskusi umum. Jumlah tempat duduk disesuaikan dengan jumlah kelompok ditambah satu tempat duduk yang kosong.
- Setiap perwakilan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan perwakilan yang lain menanggapinya.
- Peserta lain di luar forum diskusi umum yang hendak berpendapat, terlebih dahulu harus menempati tempat duduk yang kosong tadi. Baru kemudian menyampaikan pendapatnya.
- Bila sudah selesai, peserta lain di luar forum diskusi umum tersebut harus kembali ke tempat duduknya semula.

4. **Menggunakan *game*** (permainan) di antara setiap sesi sehingga tidak membuat peserta menjadi bosan. Game ini juga dapat digunakan sebagai pengantar untuk masuk ke sesi yang baru.

Tahapan atau session skenario pelaksanaan workshop:

1. **Tahap seremoni**

Tahap ini hanya berisi seremonial pertemuan-pertemuan formal yang telah terbiasa dilakukan oleh masyarakat desa, seperti sambutan-sambutan dari panitia dan para pejabat pemerintah setempat. Bisa diusahakan agar tahapan ini tidak berlangsung terlalu lama.

2. **Dialog interaktif**

Sesi ini dipakai sebagai media tukar informasi antar peserta atau media untuk

menampung aspirasi masyarakat dan membangun pemahaman bersama dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan. Beberapa orang dari lembaga yang berkompeten, dapat menjadi nara sumber dalam proses dialog ini. Tahap ini juga merupakan ajang diskusi antara peserta dengan aparat pemerintah yang hadir sebagai undangan dalam workshop, misalnya Muspika, Asper Perhutani, dll. Dialog bersifat interaktif agar proses diskusi berjalan timbal balik dan informasi yang terungkap tersampaikan secara timbal balik pula.

3. **Orientasi workshop**

Orientasi workshop yang dilakukan setelah tahap dialog adalah tahap yang digunakan oleh fasilitator untuk memandu diskusi atau menjelaskan kembali tentang (a) tujuan workshop desa; (b) output yang akan dihasilkan; (c) alur proses yang akan dijalani; (d) menyepakati beberapa norma yang akan diberlakukan selama workshop; dan (e) memandu perkenalan peserta. Peserta yang datang dari desa yang sama umumnya sudah saling kenal. Namun perkenalan peserta lebih ditujukan untuk pencairan suasana sehingga dapat membuat semua peserta merasa lebih akrab.

4. **Eksplorasi dan konfirmasi data informasi**

Eksplorasi dilakukan untuk melihat ikhtisar atas data-data yang dihasilkan dalam proses penjajagan oleh tim fasilitator. Pemaparan data bisa dilakukan dengan menempelkan data-data di tembok ruangan, sehingga peserta bisa membaca sebelum acara dimulai, sambil menunggu peserta lain datang. Fasilitator kemudian mengkonfirmasikan informasi yang didapatkannya kepada peserta untuk dicek kebenarannya, bila ada tambahan atau pengurangan peserta bisa mengungkapkannya.

5. **Penggalian harapan**

Adalah sesi untuk menggali harapan atau kondisi ideal ke depan yang diinginkan oleh masyarakat berkenaan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Peserta workshop, baik masyarakat maupun aparat pemerintah, mengungkapkan setiap harapannya terhadap pengelolaan sumberdaya hutan ke depan. Caranya, fasilitator memandu peserta agar menuliskan harapannya di atas metaplan (kertas karton berukuran 10 x 21 cm). Satu metaplan hanya berisi satu harapan.

Harapan yang telah ditulis, oleh fasilitator dikumpulkan dan disusun berdasarkan klasifikasi harapan. Fasilitator bisa meminta kepada peserta untuk membatasi harapannya. Hanya harapan yang berkaitan dengan pelaksanaan workshop 2 (dua) hari itu saja yang ditulis. Namun, bila peserta menuliskan harapan yang tidak berkaitanpun, fasilitator hendaknya tetap menempelkannya di papan, sebagai wujud penghargaan kepada peserta.

6. **Penggalian potensi desa**

Fasilitator memfasilitasi peserta untuk mengungkapkan data dan informasi potensi yang ada di desanya. Potensi yang diungkap bisa dari aspek lingkungan (sumberdaya hutan) maupun dari aspek manusianya. Pengungkapan potensi ini dapat dilakukan secara lisan oleh peserta dan fasilitator menuliskan poin-poin pentingnya pada kertas plano. Peserta dapat juga mengungkapkan pemikirannya melalui media kertas metaplan seperti pada tahap penggalian harapan.

7. **Penggalian masalah**

Adalah sesi bagi para peserta untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi selama ini dalam pengelolaan sumberdaya hutan, baik dari faktor lingkungannya (hutan) maupun faktor manusianya. Fasilitator hendaknya mengarahkan agar masalah yang diungkap hanyalah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Proses menggali masalah bisa dilakukan dengan cara yang sama dengan penggalian harapan atau bisa dilakukan dengan cara diskusi kelompok.

8. **Analisa masalah**

Adalah sesi yang dilakukan untuk mencari akar permasalahan yang terungkap pada tahap penggalian masalah. Dalam sesi analisa masalah ini, akan dilihat juga keterkaitan satu masalah dengan yang lainnya berdasarkan hubungan sebab akibat. Pada akhirnya, solusi kegiatan yang akan diprioritaskan dapat merujuk pada kedekatan hubungan sebab akibat dengan akar masalahnya.

9. **Penggalian alternatif kegiatan pemecahan masalah**

Adalah tahapan untuk mengungkapkan solusi kegiatan yang harus dilakukan guna memecahkan setiap permasalahan yang ada. Fasilitator hendaknya memfasilitasi agar kegiatannya adalah dalam kerangka penyiapan desa untuk mengimplementasikan sistem PHBM.

Peserta dapat mengungkapkan solusi kegiatannya berdasarkan masalah utama yang didapat serta keterkaitan satu dengan yang lainnya, kemudian menuliskannya dalam kertas metaplan (satu kertas satu ide). Fasilitator menempelkannya di dinding tembok atau di papan tulis kemudian memandu peserta untuk memilih kegiatan-kegiatan yang akan diprioritaskan terlebih dahulu pelaksanaannya.

10. **Penyusunan rencana kegiatan desa**

Adalah sesi untuk menyusun prioritas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisa masalah. Rencana kegiatan juga disusun berdasarkan pada informasi harapan yang telah diungkap oleh peserta workshop. Rencana kegiatan yang disusun tidak hanya memuat jenis kegiatannya saja, tapi juga memuat tentang pembagian peran dan tugas masing-masing pihak dalam menjalankannya. Termasuk juga di dalamnya tentang alat dan bahan yang diperlukan, perkiraan kebutuhan biaya dan sumbernya, serta penentuan waktu pelaksanaannya.

Fasilitator dapat menawarkan format yang akan dipakai untuk membuat rencana

kegiatan. Panduan pokoknya adalah dengan menggunakan lima pertanyaan penolong : (1) Apa yang akan dilakukan? {kegiatan/program}; (2) Siapa yang akan melakukan? {pelaksana}; (3) Di mana kegiatan akan dilakukan? {lokasi}; (4) Kapan kegiatan akan dilakukan? {waktu}; (5) Bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut, siapa pihak-pihak yang akan mendukung/terlibat? {pendukung & sasaan}.

c. Setelah Workshop

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan workshop selesai:

1. Memberikan salinan outputnya/menyebarluaskannya kepada setiap masyarakat.
2. Menganalisa dan mengkonsolidasikan output workshop kepada anggota masyarakat lain secara partisipatif guna mencek kebenaran hasil.
3. Menggunakan output tersebut sebagai perencanaan selanjutnya.

F. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang dibutuhkan untuk tahapan pra workshop bergantung pada kesiapan dan kondisi desa sasaran. Namun sebagai perkiraan kurang lebih dibutuhkan waktu sekitar 1–1,5 bulan. Sedangkan untuk pelaksanaannya minimal 2 (dua) hari, bergantung pada materi dan kesepakatan yang ingin dicapai. Tetapi pada prinsipnya, penentuan waktu tersebut sebaiknya mengikuti kesiapan dari masyarakatnya.

(Contoh Rencana Kerja Hasil Workshop Desa)
RENCANA KERJA DESA SUKASARI
dalam Penyiapan Desa Mengimplementasikan PHBM

NO	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	PELAKSANA	WAKTU	SASARAN	TOLOK UKUR KEBERHASILAN	BIAYA
1.	Pembentukan Forum PHBM Desa	Kades	BPD, TOGA, PKK, Karang Taruna, LSM, Ayanal Kemutanan, LAD	Masyarakat	Akhir April 2001	Masyarakat, Kades / Ayanal Desa, KRPH, Ayanal kemutanan	Terbentuknya Forum PHBM Desa secara demokratis	Swadaya
2.	Pembentukan Struktur organisasi	Ketua Forum PHBM	Masyarakat, PHT, BPD, LSM, LAD	Ketua Forum PHBM dan anggota	Akhir April 2001	Anggota Forum PHBM	Adanya agenda acara	Swadaya
3.	Pelatihan/pembekalan Forum PHBM	Ketua Forum PHBM	Masyarakat, PHT, LSM	Tim PHBM & LSM	Awal Mei 2001	S d a	1. Adanya kesepakatan bersama 2. Materi terbatasi 3. Komunikasi berjalan lancar	4. Swadaya 5. Tim PHBM
4.	Menyusun rencana kerja Forum PHBM	Ketua Forum PHBM	S d a	S d a	Akhir Mei atau Awal Juni	S d a	6. Adanya rencana kerja yang jelas 7. Pembagian tugas yang jelas 8. Tanggung jawab yang jelas	Swadaya
5.	Restrukturisasi Pengurus Koperasi Wana Suka	Kades	LSM, Dephut, PHT	Masyarakat	Awal Juli 2001	Pengurus lama dan anggota, calon pengurus, penggarap		Swadaya & PHT
6.	Pembekalan anggota koperasi	Ketua koperasi	S d a	Dephut, LSM	Akhir Juli 2001	Seluruh pengurus		Swadaya
7.	Pengorganisasian KTH	Forum PHBM, PHT	LSM	Forum PHBM, PHT	Agustus 2001	Seluruh penggarap		PHT dan instansi terkait
8.	Mensosialisasikan informasi	Kades	LSM, Ayanal Desa, instansi terkait, BPD, KRPH	PPL (PHT), instansi terkait, masyarakat	Maret 2001	KTH, Masyarakat	Tahu, mau ikutsert, dan mulai rumuskan informasi yang dibutuhkan	Negosiasi dengan instansi terkait
9.	Penggalian potensi SDA	PHT, Kades	Instansi terkait, BPD, LAD	Tim tingkat desa, (tim teknis dari masyarakat dengan instansi terkait)	April 2001	Masyarakat	1. Manajemen pengorganisasian sudah 2. Data lengkap	3. Negosiasi 4. Swadaya
10.	Rehabilitasi hutan	Ketua Forum PHBM, PHT (KRPH), KTH	Forum PHBM, PHT, LAD	Masyarakat / penggarap	September 2001	5. Hutan gundul 6. PHT	Hutan dilestarikan	7. PHT 8. Swadaya
11.	Membuat peraturan desa	Forum PHBM, BPD, Kades	LSM, Masyarakat, LAD	Masyarakat	Mei 2001 (akhir / tengah)	Desa sekitarnya	Dalamnya Peraturan Desa	Swadaya

Keterangan :

PHBM → Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat; PHT → Perhutani; LAD → Lembaga Adat Desa; TOGA → Tokoh Agama

Membentuk dan Membangun Forum PHBM Desa

Oleh: Novie Murdianasari

A. Pengantar

Forum PHBM merupakan salah satu wujud dari bentuk prinsip kebersamaan para pihak dalam konsep sistem pengelolaan sumberdaya hutan kolaboratif. Di dalam forum ini berisi atau beranggotakan para pihak yang menggambarkan keterwakilan semua unsur masyarakat. Keterkaitannya dengan konsep otonomi daerah, keberadaan forum ini dalam konsep sistem PHBM adalah mulai dari *level* kabupaten sampai *level* desa. Pada *level* desa, keanggotaan forum ini terdiri atas perwakilan para KTH, petugas Perhutani, pamong desa, dan *stakeholders* lain di desa, baik yang berkepentingan langsung maupun tidak dalam pengelolaan hutan desa. Forum PHBM Desa dibentuk dengan harapan agar dapat mengembangkan proses-proses pengambilan keputusan tingkat desa yang lebih demokratis dan kolaboratif.

B. Pengertian

Forum PHBM Desa adalah wadah perwakilan *stakeholders* di desa yang merupakan media kerjasama multi *stakeholders* dalam pengelolaan sumberdaya hutan kolaboratif di tingkat desa. Keanggotaannya harus mencerminkan keterwakilan semua komponen yang ada di masyarakat desa, seperti wakil-wakil KTH, pemerintah desa, perwakilan masyarakat (BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, Pontren, dll.), petugas kehutanan tingkat desa (KRPH, Mandor, PKL, PPL, dll.), badan usaha ekonomi tingkat desa (Koperasi), dan unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

C. Tujuan

Tujuan dari pembentukan Forum PHBM tingkat desa adalah:

1. Sebagai prasyarat untuk implementasi sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (sebagai wujud prinsip kebersamaan).
2. Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat terutama para penggarap ke tingkat yang lebih tinggi, dalam hal ini Forum PHBM kecamatan dan Forum PHBM kabupaten.
3. Sebagai wadah untuk mendiskusikan dan memusyawarahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem PHBM.
4. Sebagai media untuk saling bertukar pengalaman dan pembelajaran antar *stake-*

holders.

5. Untuk membangun hubungan yang harmonis antar *stakeholders* yang terlibat dalam implementasi PHBM.
6. Untuk membantu mengkoordinir masyarakat khususnya para penggarap, agar mampu melaksanakan kegiatan secara terorganisir dan terprogram.

D. Output

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terbangunnya Forum PHBM Desa yang dapat menjalankan fungsi koordinasi, negosiasi, menjalin kerjasama, pengelolaan informasi, penyelesaian konflik, penampungan aspirasi, dan legislasi.

1. **Fungsi Koordinasi**
   Yaitu harus dapat mengkoordinir berbagai kepentingan yang ada, baik itu kepentingan para penggarap maupun kepentingan pihak Perhutani sehingga terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain mengkoordinir berbagai kepentingan, forum juga harus dapat mengkoordinir berbagai program dan *stakeholders* yang terlibat dalam sistem PHBM.
2. **Fungsi Negosiasi**
   Yaitu harus dapat membantu para penggarap bernegosiasi dengan para *stakeholders* dari luar desa. Misalnya membantu bernegosiasi dengan investor yang datang ke desa, atau bernegosiasi dengan Perhutani dalam masalah lahan garapan, pemanfaatan hasil hutan, dll.
3. **Fungsi Menjalin Kerjasama**
   Yaitu berfungsi sebagai sarana menjalin kerjasama antar *stakeholders* yang berada di tingkat desa, kecamatan maupun yang ada di tingkat kabupaten.
4. **Fungsi Pengelolaan Informasi**
   Yaitu berfungsi sebagai pusat informasi perkembangan sistem PHBM, baik di tingkat kabupaten maupun yang ada di tingkat kecamatan, desa, dan bahkan dusun.
5. **Wahana Penyelesaian Konflik**
   Yaitu berfungsi sebagai sarana dalam mengelola permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan sistem PHBM.
6. **Fungsi Penampungan Aspirasi**
   Yaitu berfungsi sebagai penampung segala aspirasi masyarakat khususnya para penggarap karena mereka yang mempunyai kepentingan langsung terhadap hutan.
7. **Fungsi Legislasi**
   Yaitu berfungsi juga sebagai tempat untuk merumuskan dan memproses kesepakatan yang berkenaan dengan sistem PHBM yang nantinya akan menjadi aturan-aturan yang bersifat mengikat dan menjadi landasan hukum dan landasan gerak atau operasional bagi semua pihak yang akan terlibat di dalamnya.

E. Tahap-tahap Kegiatan

Proses pembentukan Forum PHBM Desa terdiri atas tahap persiapan dan tahap

pendampingan. Tahap persiapan dilakukan untuk menjajaki keinginan dari masyarakat tentang perlunya pembentukan Forum PHBM Desa, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pembentukan forum dan pemilihan pengurus forum. Sedangkan tahap pendampingan ditujukan untuk memfasilitasi forum agar dapat berjalan mencapai tujuan yang telah disepakati.

Yang dapat menjadi inisiator proses pembentukan Forum PHBM desa adalah bisa dari fasilitator luar atau masyarakat desa sendiri. Yang dimaksudkan fasilitator luar adalah orang dari luar desa yang bertugas untuk mendampingi masyarakat dalam implementasi PHBM, misalnya LSM, PKL, KRPH, dll. Fasilitator luar menjadi inisiator pembentukan forum dapat disebabkan karena masyarakat belum merasakan perlunya keberadaan Forum PHBM desa tersebut.

Namun akan lebih baik bila gagasan untuk membentuk Forum PHBM Desa berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dapat terjadi bila masyarakat bisa merasakan kebutuhan dan pentingnya akan keberadaan forum tersebut. Oleh karena itu, pemberian pemahaman tentang forum ini kepada masyarakat harus betul-betul dilakukan secara serius. Komponen masyarakat yang potensial untuk tampil sebagai inisiator misalnya aparat desa, BPD, pesantren, atau tokoh masyarakat. Disini peran fasilitator hanya membantu kelancaran proses dan mengamati bagaimana pembentukan forum itu dilaksanakan.

a. Tahap Persiapan

1. Pengenalan (sosialisasi) Forum PHBM Desa

Sosialisasi merupakan tahapan yang sangat penting dan merupakan salah satu kunci sukses dalam proses pembentukan Forum PHBM Desa. Dengan sosialisasi, informasi tentang maksud dan tujuan serta pentingnya keberadaan Forum PHBM Desa dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak. Pemahaman ini diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para *stakeholders* untuk mendukung dan turut terlibat di dalam forum yang akan dibentuk. Idealnya, pengenalan program atau sosialisasi ini dilakukan sampai *stakeholders* yang akan terlibat di dalamnya betul-betul memahami fungsi dan manfaat Forum PHBM tingkat desa ini.

Sasaran sosialisasi pembentukan Forum PHBM desa adalah (1) penggarap, (2) aparat desa, (3) tokoh masyarakat, (4) tokoh agama, (5) pemuda, (6) ibu-ibu PKK, dan (7) komponen masyarakat lainnya yang nantinya akan menjadi anggota Forum PHBM desa.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan metoda sebagai berikut:

i) <u>Perbincangan informal (secara personal)</u>

Pertama adalah melalui metoda perbincangan (ngobrol) informal secara personal dengan setiap pihak di desa. Perbincangan ini dapat dilakukan dengan santai di rumah-rumah penduduk, di warung, atau di tempat para penggarap bekerja (sawah atau ladang). Ngobrol dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan momen-momen khusus di masyarakat, misalnya pada waktu selesai tahlilan, saat siskamling, dll.

ii) **Pelibatan tokoh masyarakat**

Metode lain yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani atau sesepuh desa tersebut. Dalam metode ini fasilitator terlebih dahulu menyampaikan rencana pembentukan Forum PHBM desa kepada para tokoh masyarakat tersebut, untuk kemudian nantinya mereka yang akan menyampaikan rencana tersebut kepada masyarakat dalam satu pertemuan formal maupun informal. Dalam pertemuan bersama masyarakat nantinya fasilitator tetap mendampingi tokoh masyarakat tersebut dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya dialog interaktif apabila masyarakat masih kurang jelas terhadap usulan rencana yang telah disampaikan.

iii) **Pertemuan dusun**

Pertemuan tingkat dusun merupakan salah satu metoda lanjutan dalam sosialisasi. Artinya, setelah *ngobrol* secara personal atau penyampaian melalui tokoh masyarakat, sosilaisasi disampaikan meningkat melalui *rembugan* bersama di dusun. Dari pengalaman selama ini, umumnya tidak mudah untuk mengumpulkan masyarakat khususnya para penggarap (KTH) di siang hari karena sebagian besar petani tengah sibuk bekerja di sawah, ladang atau hutan. Oleh sebab itu waktu pertemuan harus ditentukan bersama masyarakat, agar dapat disesuaikan dengan agenda kegiatan masyarakat.

Dalam pertemuan dusun inilah rencana pembentukan Forum PHBM Desa disampaikan kepada masyarakat untuk didiskusikan. Fasilitator harus mengupayakan agar dalam pertemuan ini terjadi komunikasi dua arah. Yakni bukan hanya fasilitator yang berbicara menyampaikan maksudnya, akan tetapi harus diupayakan pula agar masyarakat merespons dengan memberikan komentar, pendapat, gagasan atau keberatannya. Fasilitator dapat pula memotivasi masyarakat untuk menyusun sendiri rencana pembentukan Forum PHBM desa.

Sosialisasi dapat dikatakan berhasil jika:

- Masyarakat dapat memahami arti penting, maksud dan tujuan dibentuknya Forum PHBM Desa serta fungsi dari keberadaan Forum PHBM itu sendiri.
- Adanya perkembangan wacana di masyarakat tentang keberadaan Forum PHBM Desa.
- Adanya umpan balik dari masyarakat terhadap fasilitator. Umpan balik dapat berupa permintaan penjelasan atau informasi yang lebih detail lagi tentang rencana pembentukan Forum PHBM desa, atau bahkan masyarakat menyampaikan gagasan mereka sendiri untuk membentuk Forum PHBM Desa.

2. Koordinasi multipihak

Langkah selanjutnya adalah koordinasi dengan *stakeholders* lain dalam upaya pembentukan Forum PHBM desa itu sendiri. *Stakeholders* yang akan terlibat dalam pembentukan forum ini adalah:

- Forum PHBM tingkat kabupaten
- Forum PHBM tingkat kecamatan
- Aparat kecamatan (Camat/Perwakilan Camat)
- Perhutani (KRPH/Mandor hutan)
- Aparat desa
- Tokoh masyarakat
- Penggarap
- Unsur masyarakat desa lainnya, seperti BPD, LPM, PKK, karang taruna, pontren, dll.
- Pihak-pihak lain dari luar desa yang akan terlibat dalam implementasi PHBM seperti investor, pedagang hasil hutan, pengusaha hasil hutan (kayu/non kayu).

Manfaat koordinasi multi pihak adalah supaya pihak-pihak yang terkait dapat pula memahami tentang pentingnya keberadaan Forum PHBM tingkat desa dan dapat memberikan dukungan baik moril maupun materi.

Forum PHBM tingkat kabupaten diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pembekalan bagi calon anggota Forum PHBM tingkat desa. Karena dengan adanya Forum PHBM, baik itu tingkat desa, kecamatan, maupun tingkat kabupaten, akan memudahkan bagi *stakeholders* untuk saling bertukar informasi tentang perkembangan sistem PHBM di semua tingkatan.

3.Musyawarah pembentukan Forum PHBM Desa

Setelah pemahaman tentang forum benar-benar dipahami masyarakat, bahkan mereka memang membutuhkan keberadaannya, dan koordinasi antar pihak terjalin baik maka sebagai *gong* untuk meresmikan pembentukannya dapat dilakukan musyawarah besar di desa. Fasilitator mengupayakan agar musyawarah besar ini menjadi agenda pemerintah desa. Selain agar kontribusi pemdes dalam proses PHBM terlihat nyata, juga karena Kepala Desa nantinya akan menjadi penanggung jawab Forum PHBM Desa bila sudah terbentuk.

Peserta yang harus hadir pada musyawarah pembentukan Forum PHBM tingkat Desa adalah (1) penggarap/KTH; (2) aparat desa; (3) tokoh masyarakat; (4) tokoh agama; (5) pemuda/karang taruna; (6) PKK; (7) Perhutani/KRPH; (8) perwakilan Forum PHBM kabupaten; (9) aparat kecamatan; (10) pengusaha hasil hutan seperti pengrajin dan pedagang hasil hutan; (11) koperasi. Karena penggarap merupakan ujung tombak dalam implementasi sistem PHBM maka keterwakilan mereka dalam musyawarah ini dapat dihadirkan lebih banyak.

Metoda yang digunakan dalam musyawarah desa ini adalah dengan metoda yang dapat menjamin proses pembentukan forum berlangsung partisipatif dan demokratis, misalnya dengan cara pemungutan suara atau *voting*. Sebelumnya peserta dibuka tingkat

pemahamannya tentang forum dengan fasilitasi fasilitator, untuk kemudian secara bersama menyamakan persepsi dan tingkat kebutuhan akan pembentukan forum ini. Setelah ini tercapai barulah forum dibentuk dengan ditandai pemilihan suara/*voting* untuk pemilihan ketua dan pengurus forum lainnya.

Guna menjalankan roda organisasinya, biaya operasional Forum PHBM Desa dapat berasal dari *sharing* hasil hutan yang diatur dalam perdes, iuran tiap KTH, APBDes, atau bantuan dana dari lembaga lain seperti Perhutani, Pemda, atau lembaga donor.

b. Tahap Pendampingan

1. Fasilitasi pertemuan rutin Forum PHBM Desa

Setelah kepengurusan forum terbentuk, selanjutnya dijadwalkan agar forum ini mempunyai agenda pertemuan rutin. Pertemuan rutin ini diadakan dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan rencana yang ada dalam pengimplementasian sistem PHBM. Selain itu fasilitator harus dapat pula memfasilitasi Forum PHBM desa dalam membangun kesepakatan-kesepakatan yang akan diadopsi oleh BPD dan pemdes agar menjadi peraturan-peraturan desa.

2. Membangun komunikasi antar anggota Forum PHBM Desa

Selain memfasilitasi pertemuan-pertemuan rutin forum, fasilitator juga harus dapat membangun komunikasi yang baik di antara anggota forum. Di dalam keanggotaan forum yang terdiri dari perwakilan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa, seringkali terjadi mereka masih merasa bahwa duduk di Forum PHBM Desa bukan untuk memperjuangkan nasib para penggarap, tapi membawa kepentingan lembaganya masing-masing.

3. Membangun komunikasi antara Forum PHBM Desa dengan KTH

Fasilitator juga harus dapat menjaga supaya komunikasi antara anggota Forum PHBM desa dan anggota KTH dapat tetap terjalin dengan baik. Misalnya pada pertemuan rutin Forum PHBM desa, diundang juga perwakilan dari KTH supaya anggota KTH mengetahui perkembangan yang terjadi dalam pengimplementasian sistem PHBM. Pertemuan-pertemuan rutin KTH juga dapat dihadiri oleh anggota Forum PHBM desa untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan hal-hal yang harus dilakukan atau yang menjadi keputusan Forum PHBM desa. Komunikasi antara Forum PHBM Desa dan KTH ini juga berguna untuk menggali bahan-bahan yang akan dijadikan peraturan desa.

4. Memfasilitasi pertemuan antara Forum PHBM Desa dan KTH dengan stakeholders lain dalam implementasian sistem PHBM

Fasilitator juga bertugas untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara forum PHBM desa, KTH dengan *stakeholders* lain dalam pengimplementasian sistem PHBM. Dalam masalah pemanfaatan hasil hutan dan lahan garapan, fasilitator harus mampu memfasilitasi pertemuan antara penggarap, Forum PHBM Desa, dan Perhutani. Dalam pertemuan itu fasilitator hanya mengamati dan memberikan masukan jika diminta.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan tahapan ini adalah adanya atau terbentuknya lembaga Forum PHBM Desa secara demokratis dan partisipatif, berdasarkan kebutuhan para pihak di desa. Indikator lain adalah bahwa lembaga ini dapat berjalan atau bekerja sebagaimana mestinya sesuai fungsi dan tugasnya.

Membangun Kelembagaan Kelompok Tani Hutan

Oleh Beni Sarbini

A. Pengantar

Membangun kelompok-kelompok tani hutan (KTH) merupakan salah satu rangkaian proses yang harus dilalui dalam implementasi sistem PHBM. Faktor keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada adanya KTH-KTH yang kuat, tangguh, terorganisir, dan mandiri. KTH yang ada selama ini hanya sebagai organisasi pekerja/ buruh pihak tertentu saja. Melalui sistem PHBM, KTH harus menjadi komponen terdepan (ujung tombak) yang akan langsung berinteraksi dengan hutan.

B. Pengertian

KTH adalah organisasi atau kumpulan dari para petani penggarap yang berinteraksi langsung dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Kelembagaan KTH tidak hanya mencakup organisasi KTH. Kelembagaan juga harus mencakup peraturan-peraturan yang dibuat oleh anggota KTH agar organisasi dapat mencapai tujuan yang disepakati dan hubungan kerjasama dengan organisasi lain, baik sesama KTH maupun bukan. Sebagai organisasi, KTH mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi pertukaran informasi

Dengan banyaknya personil KTH maka penyerapan informasi dari luar akan sangat banyak dan bervariasi. Hal ini disebabkan karena tempat tinggal anggota KTH menyebar, bahkan tidak menutup kemungkinan ada yang tinggal di luar desa, tapi memiliki lahan garapan di desa tempat ia menjadi anggota KTH. Dengan demikian informasi yang didapat anggota sangat beragam sehingga diharapkan akan terjadi *sharing* informasi antar anggota.

2. Fungsi peningkatan kapasitas petani penggarap

Maksudnya adalah KTH diharapkan dapat menjadi tempat latihan keterampilan anggotanya. Pelatihan disini lebih dititikberatkan kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota KTH dalam bidang teknis pertanian di lahan kehutanan.

3. Fungsi media untuk bertukar pikiran dan pengalaman
   Karena KTH merupakan institusi terkecil dalam implementasi PHBM maka secara otomatis segala aspirasi masyarakat penggarap akan ditampung terlebih dahulu di KTH, sebelum diteruskan kepada Forum PHBM desa ataupun pihak-pihak terkait lainnya.
4. Fungsi pelayanan dan penyaluran bantuan
   Maksud pelayanan dan penyaluran bantuan berarti: (a) kelompok dapat membuat unit simpan pinjam sehingga anggota KTH yang membutuhkan bantuan (misalnya pupuk atau uang) dapat dilayani dengan segera; (b) melihat pada pengalaman yang sudah-sudah, bila datang bantuan bagi masyarakat maka prioritas pemberian bantuan ditujukan kepada kelompok yang telah berjalan dan tertata dengan baik, bukan pada personal.
5. Fungsi penyelesaian masalah
   Bagi kebanyakan orang bila memecahkan suatu masalah akan lebih mudah bila ada orang lain yang membantunya. Begitu juga halnya para penggarap, karena KTH merupakan kumpulan para penggarap maka alangkah tepatnya bila lembaga ini dijadikan sebagai tempat pemecahan masalah bagi anggotanya. Bila ada seorang anggota yang menghadapi suatu masalah tentu anggota yang lain dapat membantu, walaupun hanya sekedar sumbang saran.

C. Tujuan

Dalam membangun kelembagaan ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai, di antaranya:

1. Masyarakat, khususnya para penggarap mampu melaksanakan kegiatan secara terorganisir dan terprogram.
2. Tercipta keharmonisan hubungan di antara pihak-pihak berkepentingan (*stake holders*) yang terlibat dalam PHBM.
3. KTH mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap pihak luar, misalnya Perhutani, pengusaha, pedagang, dan lain-lain.
4. KTH dapat menangkap peluang usaha dan permodalan yang datang dari luar melalui lembaga.
5. KTH memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian hutan.

D. Output

Output yang diharapkan dapat dicapai dalam kegiatan ini adalah terbentuknya organisasi KTH yang kuat, yaitu organisasi yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) mempunyai visi dan misi yang jelas; (2) aturan kelompok yang mangatur sistem insentif dan dis insentif; (3) mempunyai mekanisme kerja yang didukung semua anggota; (4) mempunyai struktur organisasi yang jelas; (5) adanya kejelasan peran, hak, dan kewajiban anggota; (6) mampu menjalin hubungan interaktif dengan lembaga lain; (7) sumberdaya manusia/SDM yang handal dan solid; dan (8) mempunyai sarana dan prasarana yang memadai.

E. Langkah-langkah Kegiatan

Dalam membangun KTH, diperlukan juga dukungan dari lembaga lain dan dukungan kebijakan tingkat desa, di antaranya:

1. *Forum PHBM Desa*; Forum ini terbentuk atas kesepakatan dan kebutuhan masyarakat sebagai langkah awal implementasi sistem PHBM. Dalam bab sebelumnya disebutkan bahwa Forum PHBM desa mempunyai beberapa fungsi, di antaranya: (a) fungsi koordinasi; (b) fungsi negosiasi; (c) fungsi aspirasi; dan lain-lain. Forum PHBM desa, dengan segala fungsinya tersebut, memiliki tanggung jawab untuk untuk ikut serta membangun, membina, dan mendampingi KTH-KTH.
2. *LSM, Penyuluh Pertanian Lapangan, dan Penyuluh Kehutanan Lapangan*; LSM berperan sebagai mediator antar pihak-pihak berkepentingan, sedangkan PPL dan PKL berperan sebagai penyuluh dalam peningkatan keterampilan teknis para penggarap.
3. *Peraturan Desa (Perdes)*; Perdes merupakan kebijakan lokal yang di antaranya akan mengatur KTH dalam implementasi sistem PHBM. Hal ini sangat penting karena akan mengatur hak dan kewajiban KTH, kerjasama antar pihak berkepentingan, dan bagi hasil (*sharing*). Perdes sebaiknya dibuat atas dasar masukan dari masyarakat penggarap yang bersangkutan. Prosesnya dapat difasilitasi oleh Forum PHBM Desa beserta aparat desa, sebelum diserahkan kepada BPD untuk dibahas dan kemudian disahkan oleh Kepala Desa. Fasilitator juga dapat ikut memfasilitasi selain berperan sebagai nara sumber.

Proses membentuk dan membangun kelembagaan ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pendampingan. Tahap persiapan bertujuan untuk membentuk KTH dan memilih pengurus. Sedangkan tahap pendampingan dilakukan setelah kelembagaannya terbentuk untuk mendampingi anggota KTH agar dapat menjalankan organisasi. Berikut adalah langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan KTH:

a. Tahap Persiapan

1. Pengenalan rencana pembentukan KTH

Pengenalan ini dilakukan untuk berbagi pemahaman dan pengalaman tentang maksud dan tujuan membangun KTH. Metode yang dipakai pada tahapan ini adalah dengan wawancara dan tanya jawab. Pengenalan dilakukan oleh Forum PHBM desa dan fasilitator dengan maksud memberikan gambaran tentang pentingnya peran KTH.

Sasaran tahap pengenalan/sosialisasi dilakukan kepada:

i. Masyarakat petani penggarap hutan

Langkah pertama adalah mengidentifikasi nama-nama tokoh penggarap hutan yang ada, dilakukan dengan cara mencari informasi di tingkat desa maupun dusun. Di tingkat dusun, yang pertama dikunjungi adalah kepala dusun, diharapkan dari kepala dusun ini

didapatkan nama-nama tokoh penggarap dan tokoh sesepuh dusun.

Setelah nama-nama tokoh penggarap diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat penggarap, formal di balai pertemuan maupun informal dengan *anjangsana* ke rumah-rumah atau lahan garapan. Dalam pertemuan ini perlu diterangkan manfaat yang didapat dari KTH yang kuat dan mandiri. Selain itu pada kesempatan ini dapat dimanfaatkan pula sebagai media penggalian potensi, masalah yang dihadapi dan keinginan-keinginan masyarakat penggarap.

Waktu untuk pertemuan dengan penggarap tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh fasilitator, tetapi harus atas kesepakatan dari para penggarap. Akan tetapi jika memperhatikan kegiatan para penggarap maka waktu yang ideal untuk pertemuan ini adalah sore atau malam hari saat masyarakat telah berada di rumah. Adapun tempat pertemuan ditentukan oleh masyarakat sendiri, bisa di musholla, balai pertemuan atau rumah salah seorang masyarakat.

ii. **Pemerintahan desa**

Aparat-aparat desa dihubungi untuk meminta masukan dan meminta mereka untuk terlibat dalam proses pembentukan KTH. Karena peran desa dalam implementasi sistem PHBM sangat besar bagi keberhasilan rencana yang akan dijalankan. Dengan dukungan pemdes diharapkan akses fasilitator kepada masyarakat akan lebih terbuka dan leluasa. Sosialisasi kepada aparat desa dapat dilakukan pada pagi hari saat jam kerja atau (agar lebih leluasa) dapat dilakukan dengan kunjungan rumah.

iii. **Tokoh-tokoh kunci di masyarakat**

Maksudnya adalah seorang figur yang disegani dan berpengaruh di semua lapisan masyarakat. Misalnya kepala dusun, alim ulama, tokoh pemuda atau tokoh masyarakat lainnya, baik yang tergabung dalam Forum PHBM desa maupun belum. Dengan kata lain pengenalan ini bisa dikatakan sebagai pencarian dukungan dari kalangan masyarakat luas.

Model pendekatan yang dibangun tidak jauh berbeda dengan pendekatan yang dilakukan kepada aparat desa, hanya pendekatan ini lebih spesifik mengarah kepada rencana detail pembentukan kelompok.

2. **Koordinasi multi pihak**

Maksudnya adalah untuk membangun kesepahaman dan membuka

komunikasi antar *stakeholders* terkait tentang rencana membangun KTH, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi dan menghindari kesalahpahaman. Pihak-pihak yang perlu dihubungi adalah:

i. Aparat desa

Koordinasi dengan aparat desa ini perlu dilakukan karena dalam sistem PHBM ini, kerjasama aparat desa dan Forum PHBM desa sangat berperan sebagai penentu kebijakan implementasi sistem PHBM di tingkat desa.

ii. KRPH (Kepala Resort Pemangkuan Hutan)

Koordinasi dengan KRPH penting untuk dilakukan dengan alasan: (a) mengetahui respon Perhutani terhadap PHBM; (b) mengetahui kondisi lahan garapan; (c) membangun kolaborasi; (d) mencari tahu rencana teknik tahunan (RTT) Perhutani.

3. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat penggarap

Pertemuan yang difasilitasi oleh Forum PHBM desa dan pendamping ini dilakukan menggunakan metode diskusi partisipatif. Pertemuan diadakan di balai pertemuan dusun atau tempat lain yang disepakati. Karena masyarakat penggarap umumnya baru dapat ditemui pada sore hari maka waktu yang tepat untuk pertemuan adalah sore hari.

Pertemuan ini dilakukan dengan tujuan untuk: (a) membuka forum diskusi partisipatif tentang tujuan dari pembentukan KTH dan manfaat yang akan didapat oleh masyarakat penggarap; (b) menggali permasalahan yang ada di masyarakat penggarap; (c) menampung aspirasi masyarakat dalam hal pengelolaan hutan; (d) mencari kesepakatan tentang rencana pembentukan KTH; (e) menentukan waktu tentang pembentukan dan pemilihan ketua KTH atas kesepakatan bersama; (f) meminta kepada para peserta yang hadir untuk menyampaikan hasil-hasil pertemuan kepada penggarap yang lainya.

4. Pembentukan KTH

Pembentukan KTH merupakan tahap tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan bersama para penggarap. Pada musyawarah pementukan ini yang diundang dari masyarakat di antaranya: (a) Kepala Dusun; (b) tokoh masyarakat; (c) petugas lapangan Perhutani; (d) masyarakat penggarap. Waktu dan tempat untuk mengadakan musyawarah ini dibangun berdasarkan kesepakatan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, seperti lama waktu pertemuan, dan lain-lain. Musyawarah dapat ini difasilitasi oleh Forum PHBM desa atau oleh pendamping, baik LSM, PPL, ataupun PKL.

Berikut adalah contoh susunan acara pembentukan KTH: (1) pemaparan

rencana pembentukan KTH berdasarkan letak blok lahan garapan; (2) pembacaan nama-nama anggota KTH yang lahan garapannya saling berdekatan, maksudnya agar memudahkan penyampaian informasi timbal balik antara anggota, Forum PHBM desa, dan institusi lain yang terlibat dalam PHBM; (3) koreksi atas nama-nama yang telah dibacakan bila ada yang kurang sesuai, belum masuk daftar atau terdaftar di dua kelompok; (4) tanya jawab, ini diadakan untuk memberi kesempatan bagi masyarakat yang masih merasa belum jelas tentang KTH yang akan dibentuk; (5) penetapan KTH berdasarkan letak lahan. Satu KTH sebaiknya beranggotakan 20-25 orang sekaligus memberi nama KTH.

5. **Pemilihan Ketua KTH**

Pemilihan ketua ini merupakan rangkaian proses yang dilakukan setelah terbentuknya KTH. Pemilihan ketua ini diharapkan dapat berjalan secara demokratis atau berdasarkan suara terbanyak. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya KTH pasif yang diakibatkan karena ketuanya tidak mendapat dukungan penuh dari anggotanya. Sebaliknya ketua terpilih dituntut untuk dapat membawakan aspirasi kelompoknya.

Proses pemilihannya sebagai berikut: (1) penentuan nama-nama calon ketua dari setiap blok garapan yang diajukan oleh anggota KTH; (2) konfirmasi ulang nama-nama calon yang sudah terdaftar kepada para penggarap yang hadir, maksudnya bila masih ada yang merasa keberatan dengan nama-nama calon yang ada atau keberatan untuk dicalonkan; (3) pemungutan suara secara demokratis untuk memilih ketua KTH masing-masing blok garapan oleh anggotanya.

6. **Penyusunan struktur kepengurusan KTH**

Struktur kepengurusan ini harus disusun se-efisien dan se-efektif mungkin agar organisasi KTH berjalan sesuai dengan fungsinya. Struktur kepengurusan KTH terdiri dari:

i. Ketua; berfungsi sebagai koordinator, juru bicara kelompok, dan penyampai aspirasi anggota kepada Forum PHBM desa atau sebaliknya. Figur seorang ketua sebaiknya yang mampu mengayomi seluruh anggotanya, jangan sampai keberadaannya hanya mengakomodir sebagian anggota saja.

ii. Sekretaris; bertugas untuk mencatat semua data/informasi yang didapat dari anggota ataupun informasi yang datangnya dari forum atau pihak lain. Karena itu orang yang akan ditunjuk sebagai sekretaris harus mempunyai kecakapan menyusun administrasi dengan baik dan rapi.

iii. Bendahara; merupakan pengurus keuangan kelompok. Bendahara diharapkan dapat mengelola keluar masuknya keuangan sebaik mungkin. Karena itulah orang yang akan ditunjuk sebagai bendahara harus yang berdedikasi tinggi dan dapat dipercaya oleh semua anggota. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak timbul kecurigaan di kemudian hari.

iv. Penghubung (humas); berperan sebagai penghubung yang akan bertugas

menyebarkan informasi, undangan ataupun tugas-tugas lain.

b. Tahap Pendampingan

Setelah KTH terbentuk maka tugas fasilitator berikutnya adalah melakukan pendampingan kepada kelompok/KTH. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam proses pendampingan di antaranya:

1. Penataan administrasi

Administrasi yang teratur dengan baik dan sistematis tentu sangat berguna bagi rekaman proses kegiatan kelompok dan akan menjamin ketertiban organisasi kelompok. Peran fasilitator dalam penataan administrasi ini harus dapat memberi arahan tentang bagaimana administrasi kelompok yang baik dan efisien. Berikut beberapa contoh penataan administrasi yang dapat diterapkan:

(a) Data anggota penggarap di tiap-tiap KTH; (b) Data luas lahan di tiap-tiap anggota KTH; (c) Rencana kerja KTH; (d) Catatan-catatan pertemuan; (e) Data keuangan KTH; (f) Catatan komoditas/jenis tanaman yang ditanam pada tiap musim; (g) Catatan hasil panen dan penjualan; dan (h) Catatan/data lain yang diperlukan.

2. Penyusunan aturan KTH

Selain penataan administrasi, hal lain yang juga penting dalam membangun kelembagaan ialah adanya perangkat peraturan kelompok yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan kelompok. Peraturan ini sebaiknya dikembangkan berdasarkan kesepakatan/kebutuhan kelompok. Alangkah baiknya jika yang memfasilitasi pengembangan peraturan ini adalah ketua KTH dengan dibantu para pengurus lainnya. Forum dan pendamping (LSM, PPL atau PKL) berperan sebagai saksi atau nara sumber.

Peraturan ini dikembangkan setelah terbentuknya KTH dan tertatanya kepengurusan KTH. Metode yang dipakai adalah diskusi interaktif antara pengurus KTH dengan anggotanya atau disesuaikan dengan kebutuhan. Adakalanya kebutuhan untuk membuat peraturan dirasa perlu setelah ada persoalan yang muncul. Dalam pengembangan peraturan kelompok ini tentu saja harus melibatkan semua anggota KTH.

Beberapa hal dapat dicantumkan dalam peraturan ini di antaranya: (1) Hak dan kewajiban anggota; (2) Sanksi-sanksi; (3) Aturan iuran anggota; (4) Jadwal pertemuan rutin; (5) Peraturan pengelolaan lahan garapan; (6) Pengadaan sarana produksi pertanian; (7) Penjualan hasil panen; dan lain-lain.

3. Fasilitasi pertemuan rutin

Pertemuan rutin sangatlah penting dalam suatu organisasi/kelompok, karena pertemuan ini dapat dijadikan sebagai media perencanaan kegiatan dan evalusasi kegiatan kelompok KTH yang telah berjalan. Fasilitator dituntut untuk dapat memotivasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pertemuan ini.

Penentuan waktu dilaksanakannya pertemuan diserahkan pada ketua KTH dan anggotanya, karena peran fasilitator dalam kelompok harus sudah mulai

dikurangi. Maksudnya agar tidak menghambat proses belajar masyarakat dalam berorganisasi secara terorganisir dan mandiri. Beberapa alternatif tempat yang dapat dipergunakan untuk pertemuan: (a) balai pertemuan dusun atau mushola; (b) rumah salah satu anggota KTH; atau (c) lahan garapan pada saat para penggarap berada di lahan. Tempat pertemuan ini tidak harus ditentukan di tempat yang tetap, tetapi bergantung kesepakatan dari KTH itu sendiri.

Bila pertemuan ini memerlukan biaya (misal biaya konsumsi anggota yang hadir pada pertemuan) maka pengadaannya harus atas dasar kesepakatan anggota. Misalnya dengan mengadakan arisan KTH, anggota yang mendapat arisan akan menjadi tuan rumah pertemuan sekaligus sebagai penyandang biaya konsumsi pertemuan.

Pemimpin pertemuan ini bisa berganti-ganti, bisa langsung ketua atau bergantung pada kesepakatan semua anggota. Sedangkan pencatat prosesnya adalah sekretaris KTH.

4. **Peningkatan kapasitas teknis**

Kegiatan ini dapat difasilitasi oleh Forum PHBM desa atau para pendamping masyarakat yang bekerja di lapangan. Ada beberapa institusi yang dapat berperan aktif, di antaranya:

a. Forum PHBM desa, ini penting karena forum merupakan suatu institusi yang menampung semua aspirasi KTH dan dapat dikatakan sebagai induk semangnya.
b. PPL maupun PKL, karena sudah merupakan tugas kerjanya.
c. Pendamping masyarakat, seperti dari LSM, pontren, atau lembaga lainnya.

Pembinaan atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan ini dapat dilakukan melalui cara:

a. Pelatihan-pelatihan, di antaranya berupa: (1) Pelatihan teknis pertanian; (2) Pelatihan teknis kehutanan; (3) Pelatihan agroindustri; (4) Pelatihan manajemen organisasi; (5) Penyediaan bahan-bahan bacaan. Bacaan yang dimaksud di sini bisa berupa buku-buku tentang teknik pertanian, kehutanan, konservasi, pelestarian perlindungan, dan lain-lain. Bacaan-bacaan ini dapat disediakan oleh Forum PHBM desa, pendamping, PPL, PKL, dan lain sebagainya.
b. Studi banding; bisa dilakukan dalam bentuk pengiriman wakil anggota KTH ke KTH lain dalam satu desa, antar desa, atau bahkan ke daerah lain yang memiliki kegiatan serupa. Ataupun dengan mendatangkan wakil kelompok petani dari daerah lain.

5. **Proses membangun kesadaran**

Maksud dari proses penyadaran ini di antaranya:

a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya membangun kerjasama antar anggota KTH ataupun antar KTH yang lainnya.

b. Mendiskusikan tentang manfaat reboisasi lahan-lahan kritis yang ada di hutan sekitar desa.
c. Membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai anggota KTH/anggota masyarakat dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam.
d. Sebelum pembentukan kelompok yang baru, pada saat sebelumnya pernah ada KTH yang telah dibentuk oleh Perhutani. Untuk menghindari konflik yang mungkin timbul dengan adanya perubahan KTH ini maka tidak ada salahnya dilakukan penyadaran akan kesamaan dan perbedaan dari KTH baru dengan yang terdahulu.

6. Melakukan kegiatan alternatif lain

Pada saat kelompok sudah dapat berjalan sesuai dengan fungsinya maka untuk menghindari kegiatan yang monoton perlu ada suatu kegiatan alternatif lain bagi kelompok dampingan. Maksudnya agar ada variasi kegiatan kelompok yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mempererat hubungan antar anggota dan keluarganya. Adapun jenis-jenis kegiatan alternatif yang dapat ditawarkan seperti:
a. Budidaya tumbuhan obat (bagi ibu-ibu anggota kelompok).
b. Pengembangan *home industri* hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil hutan.
c. Arisan keluarga KTH.

7. Membangun jaringan antar KTH

Setelah semua KTH dapat berjalan maka untuk membangun kerja sama antar KTH dimungkinkan untuk membentuk jaringan antar KTH. Jaringan KTH ini bisa dibentuk dalam satu dusun apabila dusun-dusun yang ada di satu desa terpisah-pisah, misal dibentuk Forum KTH tingkat dusun. Forum KTH tingkat dusun ini bisa juga berfungsi untuk mewakili KTH dalam Forum PHBM tingkat desa.

Apabila jumlah KTH di satu desa tidak terlalu banyak (di bawah 25 KTH) atau letak dusun tidak terlalu berjauhan maka jaringan KTH ini bisa terwakili dalam Forum PHBM desa. Yang lebih luas lagi adalah membangun jaringan KTH dengan desa lain atau daerah lain. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kerjasama yang lebih luas sebagai ajang pembelajaran bersama dalam skala yang lebih besar.

Teknik Pemetaan Hutan Desa

Oleh Jarno [1]
Nurhayati [2]

A. Peta-peta Pendukung dalam Pemetaan Hutan Desa

Peta-peta pendukung yang diperlukan dalam melakukan pemetaan hutan desa, di antaranya :

- Peta desa setempat dan peta desa-desa tetangga.
- Peta kawasan hutan (Perhutani)
- Peta rupa bumi atau topografi (Bakosurtanal, Jawatan Topografi)
- Peta tata guna lahan (BPN)

B. Alat-alat Pengukuran di Lapangan

Alat-alat ini adalah alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pengukuran geodesi di lapangan. Beberapa alat mungkin harus dibeli atau dapat pula disewa dari Perhutani, Dinas Pekerjaan Umum atau kontraktor sipil.

1. **Meteran**, berfungsi untuk mengukur jarak di lapangan. Pada umumnya meteran yang digunakan dalam pemetaan adalah meteran gulung yang memiliki panjang 50 meter.

   Sebagai pengganti meteran dapat digunakan tali atau tambang yang telah ditandai. Sebaiknya dipilih tambang dari bahan yang tidak elastis, tidak melar apabila ditarik atau terkena panas matahari. Bisa tali rami atau (plastik) nilon dengan diameter 0,5 cm dan panjang 50 meter lebih sedikit (51-52 m). Tali ini kemudian diberi tanda-tanda jarak yang mudah dilihat pada tiap-tiap 10 m, sampai 50 meter. Tanda-tanda ini hendaknya tidak mudah hilang. Pada 10 meter terakhir dibuat tanda jarak 5 meter dan pada setiap meternya. Jangan lupa untuk menyisakan tali pada masing-masing ujungnya sebagai pegangan.
2. **Kompas**, berfungsi untuk mengukur atau menentukan sudut arah (azimuth) dari

titik-titik tertentu terhadap titik acuan. Sebaiknya digunakan kompas yang berisi cairan, sehingga jarum kompas di dalamnya lebih stabil dan lebih mudah dibaca dengan akurat. Beberapa merk kompas yang baik di antaranya adalah Brunton dan Suunto.

Kompas yang akurat cukup mahal harganya dan tidak mudah diperoleh di kota-kota kecil. Anda mungkin harus meminjamnya ke Perhutani, dinas PU atau kontraktor sipil. Kadang-kadang perkumpulan pecinta alam juga memilikinya.

3. **Clinometer**, yakni alat pengukur kelerengan atau kemiringan medan. Alat ini ada yang tersendiri dan ada pula yang tergabung dalam kompas (misalnya Brunton, dan Silva).

   Clinometer sederhana dapat pula dibuat sendiri dari busur derajat besar yang terbuat dari kayu. Busur ini biasa dipakai guru di sekolah-sekolah, dan dapat dengan mudah dibeli di toko-toko alat sekolah.

   Pertama-tama busur derajat harus dimodifikasi dulu. Pada busur setengah lingkaran biasanya sudah tertera besar sudut 0°–180°. Angka-angka inilah yang diubah: angka besar sudut pada bagian tengah lingkaran busur (90°) diubah menjadi 0°, selanjutnya ke samping kanan berturut-turut ditandai angka 10°, 20°, 30°, dan terakhir pada ujung bahu busur 90°. Demikian pula diperbuat ke sebelah kirinya.

   Busur kemudian dipakukan pada tongkat sepanjang ± 1,50 meter di pusat lingkaran dengan memposisikan bulatan busur di sebelah bawah. Busur harus dapat digerakkan ke depan dan belakang, karena itu cukup dipaku satu kali dan paku disisakan kira-kira 0,5 cm. Pada paku itu lalu diikatkan sebuah bandul pemberat (unting-unting) dengan tali yang tidak mudah putus. Panjang bandul tidak melebihi lebar bulatan bawah busur dan upayakan ujung bandul lancip serta menunjuk pada garis-garis sudut. (Lihat Gambar ...)

4. **Lembar isian data** (tally sheet), yakni lembar untuk mencatat data hasil pengukuran di lapangan. Contoh lembar data dapat dilihat pada Gambar ...
5. **Pensil** atau pena tinta, untuk menulis data hasil pengukuran. Sebaiknya digunakan pensil yang cukup hitam (B, 2B) karena tidak mudah luntur apabila terkena air atau cairan kimia lain.
6. **Flip board** atau papan media tulis, untuk menjepit lembar-lembar data dan sekaligus sebagai alas untuk memudahkan menulis data di lapangan. Biasanya terbuat dari triplek atau *hardboard* yang di atasnya diberi penjepit kertas.
7. **Golok**, untuk merintis jalan dan membuat patok. Golok mungkin perlu beberapa buah.
8. **Patok-patok** kayu atau bambu sepanjang ± 1.5 m, untuk menandai titik-titik stasiun pengukuran. Patok dapat saja dicari dan dibuat di hutan, bila terdapat banyak semak belukar di sana.
9. **Cat & kuas**, berfungsi untuk mencat ujung patok tanda stasiun. Sebaiknya digunakan cat minyak agar tidak luntur apabila terkena air. Warna cat disarankan merah atau kuning agar menyolok (mudah terlihat di lapangan).

Gambar ... **Lembar Data Pengukuran Lapangan**

Tanggal :
Lokasi/ Desa :
Tema :
Tim :
Titik-titik Ikat :

Stasiun	Azimuth	Back azimuth	Kemiringan	Jarak	Keterangan	
					Kiri	Kanan
P1	348-P2	-	...			
P2	007-P3	168-P1				
P3	...					
P4						
P5						
dst						

Keterangan mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dalam lembar data adalah sebagai berikut :

Hari & Tanggal : hari dan tanggal pelaksanaan pemetaan

Desa : nama desa yang dipetakan

Tema : tema wilayah yang dipetakan, misalnya Batas Hutan Negara Desa Cileuya

Tim Pemetaan : nama-nama personil yang terlibat dalam pemetaan, dapat juga nama lembaga/ instansi

Titik Ikat : nama tanda-tanda lapangan, tanda alam dan atau tempat yang diposisikan sebagai acuan titik awal pemetaan. Misalnya, T1 (jembatan Cileuya); T2 (pal batas hutan no. B 197).

Stasiun : nomor stasiun pengukuran, yang dicantumkan secara berurutan. Misalnya P1.

Azimuth : angka besar sudut arah yang diukur dengan kompas dari stasiun pengukuran ybs. Misalnya, 087-T1 (87° ke arah T1); 195-T2 (195° ke arah T2); 348-P2 (348° ke arah stasiun kedua); dan seterusnya.

Back azimuth : besar sudut arah ke stasiun sebelumnya. Misalnya, dari P2: 168-P1 (168° ke arah P1). Back azimuth ini untuk mengontrol, apakah pengukuran azimuth di stasiun sebelumnya (misalnya dari P1 ke arah P2) sudah tepat. Note: tidak ada pengukuran back azimuth di stasiun P1.

Kelerengan : besar sudut kelerengan (kemiringan medan) ke arah stasiun berikutnya. Misalnya, di stasiun P2: 9° (9° naik ke arah P3). Tanda negatif (minus) digunakan apabila arahnya menurun.

Jarak : jarak langsung hasil pengukuran dengan meteran. Satuan dalam meter (m).

Keterangan : berisikan keterangan nama tempat, situasi serta kondisi titik-titik stasiun dan sekitarnya. Dapat juga menginformasikan keadaan lapangan di kanan dan kiri titik-titik stasiun.

Untuk kepentingan penggambaran peta, pada saat pengolahan lembar data di atas disalin dan ditambahi dengan kolom-kolom:

Jarak Datar : berisi jarak konversi yaitu jarak datar (proyeksi) yang diperoleh dengan mengolah jarak langsung menggunakan sudut kelerengan (lihat pada Bagian E, cara pengolahan data hasil pengukuran).

Jarak Peta : merupakan konversi jarak datar dengan menggunakan skala peta. Lihat pula pada bagian pengolahan data.

C. Cara Pengukuran di Lapangan

Pada dasarnya pengukuran geodesi adalah menyederhanakan bentuk-bentuk di lapangan ke dalam ruasgaris-ruasgaris yang mudah diukur, namun sedapat mungkin mendekati garis bentuk aslinya. Pengukuran penyederhanaan ini disebut *transverse* atau pengukuran *poligon*. Di sini dikenal dua macam transverse atau poligon:

a. *Transverse tertutup* atau poligon tertutup, yakni apabila titik akhir pengukuran berimpit dengan titik awal, sehingga rangkaian ruasgaris itu mengelilingi (menutupi) suatu bidang lahan.

b. *Transverse (poligon) terbuka*, yakni apabila titik akhir tidak berimpit dengan titik awal. Rangkaian ruasgaris itu hanya menggambarkan suatu garis panjang; misalnya garis bentuk sebuah sungai.

Dalam pengukuran geodesi ini setiap ruasgaris dibuat sepanjang mungkin, selama arahnya masih mewakili garis bentuk aslinya di lapangan. Artinya apabila garis bentuk aslinya (misalnya, sungai) berbelok, maka ruasgaris ybs. diakhiri pada titik belokan tersebut dan dilanjutkan dengan ruasgaris yang baru yang memiliki arah sesuai belokan (lihat Gambar ...). Titik-titik di mana ruasgaris berubah disebut stasiun pengukuran dan dilambangkan dengan P bernomor sesuai nomor urut stasiun.

1. Penentuan Titik Ikat

Titik ikat adalah titik tertentu di lapangan yang relatif tetap dan mudah dikenali (menyolok, mudah terlihat) baik di lapangan maupun di peta, yang akan digunakan sebagai patokan dalam pemetaan. Misalnya titik-titik percabangan di mana sungai-sungai kecil bermuara ke sebuah sungai besar, persilangan atau percabangan jalan, jembatan, puncak gunung atau bukit, atau lebih baik lagi patok TTG[1]. Patok batas hutan yang bernomor dapat pula digunakan, apabila tersedia peta hutan yang memuat pal batas itu.

Disebut titik ikat karena titik ini akan digunakan untuk 'mengikat' transverse atau poligon yang akan diukur sehingga dapat ditentukan dan digambarkan posisinya di peta. Mengikat atau merujuk ini yakni dengan cara mengukur sudut arah dan jarak titik awal poligon (stasiun pertama, P1) ke arah titik ikat itu (apabila hanya ada satu titik ikat), atau

dengan mengukur sudut arah-sudut arah beberapa titik ikat yang terlihat dari P1. Semakin banyak titik ikat dapat diperoleh, semakin baik dan akurat posisi stasiun tersebut.

2. Penentuan Titik-titik Stasiun

Stasiun yang pertama adalah awal –dan diletakkan di ujung– garis bentuk yang dipetakan. Seperti telah disebutkan, agar titik awal ini dapat digambarkan di peta, ia harus diikatkan ke titik ikat yang telah diketahui sebelumnya di peta. Posisi stasiun-stasiun berikutnya ditentukan oleh arah garis bentuk yang dipetakan dan keleluasaan pandangan di lapangan.

Tim pengukuran lapangan perlu memperhatikan kondisi medan (datar, tanjakan, turunan, lurus atau berbelok) dalam menentukan titik-titik stasiun berikutnya. Titik stasiun sebaiknya menandai perubahan kelerengan yang menyolok atau belokan. Titik ini sebaiknya juga mudah terlihat oleh pemegang kompas, sehingga sudut arah dan kelerengannya dapat diukur. Tiap titik stasiun ditandai dengan patok setinggi 1□ m yang diberi nomor dan dicat ujung atasnya. Apabila pada titik stasiun sasaran terdapat pohon atau obyek alam yang kemungkinan tidak akan berpindah tempat maka dapat dijadikan sebagai tanda stasiun.

3. Pengukuran-pengukuran pada Titik Stasiun

Pada tiap titik stasiun dilakukan pengukuran-pengukuran jarak, sudut arah dan sudut kemiringan medan. Jarak diukur dari stasiun asal ke stasiun yang baru. Sudut arah diukur dari stasiun asal ke arah stasiun berikutnya, dan ke arah stasiun sebelumnya (*back azimuth*). Jika ada, baik pula untuk mengukur sudut arah titik ikat yang nampak dari stasiun asal ini. Sudut kemiringan medan diukur ke arah stasiun berikutnya.

Pengukuran jarak

Dalam pengukuran jarak, tim harus memperhatikan *posisi titik 0* dan *kencang-kendurnya* meteran. Titik nol pengukuran adalah posisi patok stasiun asal, dan pembacaan jarak dilakukan pada titik stasiun berikutnya. Apabila jarak antar stasiun lebih dari 50 meter, pada tiap-tiap titik 50 m dibuatkan patok-patok bantu pengukuran. Kemudian untuk mendapatkan ketepatan jarak dalam setiap pengukuran, meteran harus dalam kondisi kencang. Untuk mengukur jarak pada lahan miring, meteran diupayakan kencang dan sejajar permukaan tanah. Jarak yang terukur ini kemudian diucapkan oleh pemegang meteran dengan suara keras, agar dicatat oleh pencatat.

Pengukuran azimuth

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh tim dalam pengukuran azimuth adalah *posisi pengambilan data, sasaran bidik, pembidikan* dan *pembacaan kompas*. Untuk mengukur sudut arah, pemegang kompas harus berdiri tepat pada titik stasiun dan dapat melihat sasaran dengan jelas. Titik sasaran adalah titik stasiun berikutnya dan stasiun sebelumnya yang ditandai dengan patok-patok bercat. Dalam membidik sasaran, kompas harus dipegang sedatar mungkin agar jarum kompas tidak bergesek dengan dasar kompas dan menyebabkan kekeliruan pembacaan.

Pengukuran balik (*back azimuth*) dan pengukuran arah titik ikat adalah untuk

meningkatkan akurasi posisi stasiun. Dengan *back azimuth*, pengukuran sudut arah sebelumnya dikontrol dan diperbaiki.

Pengukuran kelerengan

Untuk mengukur kelerengan, perlu diperhatikan *titik sasaran bidik*. Bila klinometer dipegang setinggi mata, maka yang harus dibidik pada sasaran adalah titik setinggi mata pula. Untuk penggunaan klinometer buatan sendiri, perlu diperhatikan pula bahwa bandul harus bebas bergerak dan berayun, sehingga dapat menunjukkan sudut kelerengan dengan tepat.

Semua sudut-sudut yang diukur ini harus disebutkan dengan jelas, dan dicatat oleh pencatat.

Keterangan lain-lain

Keterangan lain-lain mungkin perlu dicatat untuk memudahkan pengenalan dan pengecekan. Keterangan-keterangan ini misalnya nama tempat, situasi dan kondisi lapangan yang khas, serta tanda lain di sekitar titik stasiun.

D. Alat-alat untuk Menggambar Peta

1. **Kertas milimeter blok** sebagai media untuk menggambar peta awalan (draf) dan alat bantu dalam menghitung luas.
2. **Busur derajat** berfungsi untuk mengukur dan menggambarkan sudut di peta. Busur derajat ada yang berbentuk lingkaran penuh (360°) dan setengah lingkaran (180°). Untuk memudahkan dalam penggambaran peta sebaiknya digunakan busur dengan lingkaran penuh (360°) yang terbuat dari bahan transparan/tembus pandang (mika/plastik).
3. **Penggaris** merupakan alat bantu untuk menggambar jarak dalam pembuatan peta. Ukuran panjang penggaris bervariasi, karena itu untuk menggambar garis harus disesuaikan dengan panjang ukuran garis yang akan dibuat. Untuk garis yang berukuran panjang (lebih dari 30 cm) sebaiknya digunakan penggaris yang panjang supaya menghasilkan garis yang lurus dan bagus.
4. **Pensil** untuk menggambar. Pensil yang digunakan hendaknya mempunyai ujung yang tidak mudah patah dengan ketebalan (kepekatan) sesuai kebutuhan.
5. **Pena gambar** untuk menggambar peta jadi. Dalam menggambar peta jadi digunakan pena khusus yang standard dengan ketebalan yang bervariasi.
6. **Gunting** untuk membantu memotong kertas
7. **Kertas karbon** berguna untuk menjiplak, perbanyakan dan menyalin peta.
8. **Spidol kecil warna-warni** digunakan dalam penggambaran peta akhir untuk membedakan obyek; misalnya warna untuk sungai akan berbeda dengan jalan dan sebagainya
9. **Kalkulator** digunakan sebagai alat bantu dalam pengolahan data, terutama dalam

penghitungan mengubah jarak dari jarak miring ke jarak datar dan dari jarak lapangan menjadi jarak skala peta.

E. Pengolahan Data Hasil Pengukuran

1. Menyalin dan Merapikan Data

Pencatatan di lapangan biasanya dilakukan dengan kalimat-kalimat singkat atau kode-kode yang hanya dimengerti oleh pencatat. Hal ini dapat dimaklumi karena situasi dan kondisi lapangan yang memerlukan pencatatan dengan cepat. Di desa, catatan-catatan ini kemudian disalin, dirapikan susunannya dan dilengkapi agar mudah dibaca oleh siapa saja. Jangan lupa untuk menambahkan dua kolom baru dalam tabel data yang dibuat: jarak datar dan jarak peta.

2. Mengubah Jarak Miring Menjadi Jarak Datar

Fasilitator dan tim penggambaran peta perlu memperhatikan bahwa dalam penggambaran peta, jarak yang digunakan adalah jarak datar. Jarak datar adalah jarak horizontal permukaan bumi, sehingga semua jarak yang diperoleh dari hasil pengukuran di lahan miring harus diubah menjadi jarak datar. Jarak yang harus diubah adalah jarak yang diambil dari hasil pengukuran dengan kemiringan lahan lebih dari 10°, sedangkan lahan dengan kemiringan kurang dari 10° bisa dianggap datar sehingga jarak yang diperoleh tidak perlu diubah lagi menjadi jarak datar.

Untuk mengubah jarak miring menjadi jarak datar digunakan persamaan berikut ini :

Jarak datar = *Cosinus* sudut kemiringan x jarak di lapangan

Contoh :

Jarak langsung dari stasiun P1 ke P2 adalah 45 meter dengan kemiringan medan 15°. Maka jarak datar antara P1 dan P2 adalah:

jd = cos 15° x 45 m ▶ *cosinus* 15° = 0,9659
= 0,9659 x 45 m
= 43,4655 m

Untuk memudahkan dalam penggambaran peta dilakukan pembulatan satu desimal (satu angka di belakang koma), jadi jarak datar P1 – P2 adalah 43,5 meter. Tabel cosinus dilampirkan di belakang.

3. Mengubah jarak datar menjadi jarak gambar di peta

Skala peta adalah perbandingan antara jarak (keadaan) di peta dengan jarak (keadaan) yang sesungguhnya di lapangan. Skala 1:10.000 menunjukkan bahwa jarak 1 cm di peta menggambarkan jarak sesungguhnya 10.000 cm (100 m) di lapangan. Jarak lapangan ini adalah jarak datar, proyeksi dari kondisi yang sebenarnya bergelombang atau naik turun.

Sebaliknya untuk menggambarkan jarak di lapangan ke dalam peta, maka jarak

datar harus diubah menjadi jarak peta sesuai dengan skala yang diinginkan. Untuk mengubah jarak datar lapangan menjadi jarak gambar di peta digunakan persamaan sebagai berikut :

jarak di peta = jarak datar x skala

Contoh :

Jarak datar antara P1 – P2 = 43.5 meter. Apabila peta yang hendak dibuat berskala 1 : 5000, maka jarak gambar di peta adalah :

jp = 43,5 m x 1/5000
= 4350 cm : 5000
= 0,87 cm

Untuk memudahkan dalam penggambaran peta (disesuaikan dengan jarak minimal yang tercantum pada penggaris yaitu jarak dalam satuan milimeter), maka dilakukan pembulatan satu desimal (satu angka dibelakang koma).

Jadi jarak gambar di peta adalah 0,87 cm = 0,9 cm = 9 milimeter

F. Menggambar Peta (tanya Nana lagi).

Membuat Peta Baru dengan Pengukuran di Lapangan

1. **Menentukan skala peta**

   Untuk menggambar peta dari data hasil pengukuran di lapangan terlebih dahulu harus menentukan skala yang akan digunakan.

2. **Membuat peta dasar**

   Peta dasar adalah peta tempat memplotkan, menggambarkan hasil-hasil pengukuran (tanya NanaL). Yang penting, ada kontur, ada garis bentuk lansekap, ada titik-titik ikat.

3. **Menggambarkan data hasil pengukuran lapangan**

   Peta sebaiknya dibuat di atas kertas grafik agar lebih mudah dibaca. Menggambar peta dimulai dari titik ikat. Untuk menggambar posisi berikutnya digunakan busur derajat dan jarak antara stasiun-stasiun diukur dengan menggunakan penggaris sesuai data yang diperoleh. Busur harus selalu diletakkan pada arah utara peta (0 = Utara). Misalnya, titik ikat ke stasiun P1, P2, P3, P4 ...dst. Untuk menentukan titik P1, letakkan busur pada posisi titik ikat, posisi titik P2 ditentukan dari titik P1, posisi titik P3 ditentukan dari titik P2, titik P4 ditentukan dari titik P3 begitu seterusnya.

E. Pembetulan Gambar

Pada umumnya dalam penggambaran peta, titik awal tidak menyambung/bertemu dengan titik akhir yang diinginkan. Hal seperti ini wajar dan bahkan banyak ditemui oleh para pembuat peta yang sudah ahli dan mahir. Apabila tingkat kesalahan melebihi batas kewajaran maka perlu dilakukan pengecekan ulang terutama kesalahan penghitungan jarak, pengambilan pengompasan dan kemiringan. Tingkat kesalahan yang dimaksud tidak

lebih dari 3%. Untuk mengetahui tingkat kesalahan dalam menggambar peta digunakan persamaan sebagai berikut:

Persentase Kesalahan = [Jarak antara titik awal dengan titik akhir(cm) / keliling peta (cm)] x 100 %

Langkah-langkah sebelum mencari persentase kesalahan dalam menggambar peta seperti tersebut diatas, yaitu:

diukur jarak kesalahan antara titik awal dan titik akhir (dalam cm)

diukur jarak seluruh rangkaian data (keliling peta) dalam cm dari titik awal/titik yang diinginkan sebagai titik awal sampai titik terakhir.

Jumlah jarak kesalahan dibagi jumlah seluruh jarak rangkaian data (keliling peta) dikali 100%

Apabila kesalahan tidak menutupnya gambar peta setelah dihitung kurang dari 3% maka pembetulan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

Cara 1: pembetulan jarak

Dicari titik/stasiun yang mempunyai posisi kedudukan sama dengan posisi kedudukan stasiun terakhir ke stasiun awal, kemudian jarak kesalahan (dalam cm) dibagi dengan jumlah stasiun yang memiliki sudut kedudukan sama atau mendekati. Hasil baginya dijumlahkan/dikurangkan ke dalam jarak setiap stasiun tadi.

Cara 2: pembetulan sudut

Diukur posisi kedudukan dari stasiun terakhir ke stasiun awal, kemudian dibagi oleh jumlah seluruh stasiun. Hasil baginya dijumlahkan/dikurangkan ke semua stasiun.

Apabila kesalahan lebih dari 3% maka harus dilakukan pengecekan ulang pada stasiun-stasiun yang diperkirakan ada kesalahan dalam pengukuran dan pengompasan. Paling tidak setelah dilakukan perbaikan, kesalahan tidak lagi diatas 3% dan setelah itu dilakukan proses pembetulan seperti cara diatas.

F. Menghitung Luas

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa milimeter blok berfungsi sebagai media untuk menggambar peta dan sekaligus media menghitung luas.

Cara untuk menghitung luas peta sebagai berikut ;

Untuk peta yang digambar di atas kertas non milimeter blok sebaiknya disalin terlebih dahulu ke dalam milimeter blok

Atau dengan meletakkan milimeter blok transparan di atas peta dengan catatan jangan sampai menggeser atau merubah kedudukan milimeter blok transparan dengan peta di bawahnya sebelum penghitungan selesai.

Kemudian dihitung jumlah kotak penuh yang menunjukkan 1 cm^2

Dihitung jumlah kotak ukuran 1 mm^2 pada kotak yang tidak penuh ukuran 1 cm^2 yaitu

kotak yang terpotong oleh garis batas.

Untuk menghasilkan keakuratan luas, perlu diperhatikan dalam penghitungan kotak ukuran 1 mm^2. Apabila terpotong lebih dari tiga perempat maka diabaikan dan tidak perlu dimasukkan dalam hitungan.

1 cm = 10 mm

1 cm x 1 cm = 10 mm x 10 mm

1 cm^2 = 100 mm^2

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap kotak 1 cm^2 memiliki 100 kotak ukuran 1mm^2

1 ha = 100 m x 100 m

1 ha = 10.000 m^2 = 100.000.000 cm^2 = 10.000.000.000 mm^2

Contoh : peta dengan skala 1 : 50.000

1 cm di peta sebanding dengan 50.000 cm di lapangan

1 cm = 50.000 cm

1 cm = 500 m

1 cm x 1 cm = 500 m x 500 m

1 cm^2 = 250.000 m^2

1 cm^2 = ... ha

1 cm^2 = 250.000 m^2 : 10.000 m^2 (1 ha)

1 cm^2 = 25 ha

1 mm^2 = ... ha

Oleh karena 1 cm^2 memiliki 100 kotak ukuran 1 mm^2 maka

1 mm^2 = 25 ha : 100

1 mm^2 = 0,25 ha

Lampiran 1. Tabel Cosinus

Sudut Kemiringa	Cosinus	Sudut Kemiringan	Cosinus
10°	0.9848	31°	0.8572
11°	0.9816	32°	0.8480
12°	0.9781	33°	0.8387
13°	0.9744	34°	0.8290
14°	0.9703	35°	0.8192
15°	0.9659	36°	0.8090
16°	0.9613	37°	0.7986
17°	0.9563	38°	0.7880
18°	0.9511	39°	0.7771
19°	0.9455	40°	0.7660
20°	0.9397	41°	0.7547
21°	0.9336	42°	0.7431
22°	0.9272	43°	0.7314
23°	0.9205	44°	0.7193
24°	0.9135	45°	0.7071
25°	0.9063	46°	0.6946
26°	0.8988	47°	0.6819
27°	0.8910	48°	0.6691
28°	0.8829	49°	0.6560
29°	0.8746	50°	0.6427
30°	0.8660	51°	0.6293

1. Menyiapkan Peralatan

Menggambar peta membutuhkan ketelitian dan ketenangan, karena itu diusahakan dalam kondisi rileks (tidak terburu-buru). Fasilitator dan tim penggambaran peta sebaiknya menyiapkan peralatan yang diperlukan sebelum mulai menggambar peta karena ketersediaan peralatan sangat mendukung hasil penggambaran yang maksimal.

2. Menggambar Peta

Membuat Peta dengan Memperbaiki Peta yang Sudah Ada

Mengkopi peta

Ada dua cara, yaitu :

Memfotokopi peta

Sebuah peta dapat disalin dengan memfotokopi peta aslinya. Bagian-bagian peta yang tidak diinginkan dapat dihapus, sebaliknya garis-garis yang tidak begitu jelas namun penting dapat ditegaskan kembali dengan menggunakan pena hitam.

Menjiplak peta dengan menggunakan kertas penjiplak

Sebuah peta skala dapat disalin pada kertas penjiplak dengan cara sebagai berikut : bentangkan selembar kertas penjiplak transparan (yang terbaik menggunakan kertas kalkir) di atas peta dan gambarlah empat tanda (misalnya tanda "+") di sudut-sudut peta dan kertas penjiplak yang dibentangkan di atasnya, sebagai titik-titik patokan untuk membetulkan posisi kertas penjiplak terhadap peta asli apabila bergeser atau dilepaskan sementara. Gunakan pita selotip atau penjepit gambar di sudut-sudut kedua lembar kertas supaya tetap terhimpit dengan tepat sementara jiplakan dilakuka. Setelah lembaran-lembaran kertas tadi diselotip atau dijepit bersama di atas sebuah permukaan yang halus dan rata, salinlah informasi-informasi yang diinginkan dari peta ke atas kertas jiplak dengan menggunakan pensil yang dipertegas dengan pena hitan permanen.

Mengubah skala peta hasil salinan

Untuk mendapatkan peta dalam ukuran yang diinginkan dengan cara memperbesar atau memperkecil skala. Skala adalah perbandingan antara gambar dengan obyek yang sebenarnya di lapangan atau perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya di lapangan. Skala sangat penting dalam pembuatan peta, karena dengan adanya skala dapat diketahui besar dan luasan wilayah yang dipetakan serta informasi yang tercakup di dalamnya. Sebagai gambaran umum, skala yang terbaik menurut luas wilayah adalah :

kurang dari 2.500 hektar menggunakan skala 1 : 5.000

2.500 – 7.500 hektar menggunakan skala 1 : 10.000

7.500 – 25.000 hektar menggunakan skala 1 : 25.000

lebih dari 25.000 hektar menggunakan skala 1 : 50.000

Untuk wilayah dengan hamparan tidak terlalu luas (misalnya desa), maka dapat digunakan skala 1 : 10.000 atau 1 : 5.000. Dengan demikian gambar peta yang dihasilkan besar dan informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan detail. Apabila hamparan wilayah yang dipetakan sangat luas misalnya meliputi satu kecamatan atau beberapa kecamatan

maka skala peta yang digunakan minimal 1 : 25.000.

Mengembangkan hasil salinan

Untuk melengkapi peta dasar hasil salinan ditambahkan informasi dari peta-peta lain, survei lapangan (pengukuran atau GPS) serta penduduk atau peta-peta sketsa mereka

Menambahkan ciri-ciri dasar peta

Hal-hal yang harus ditambahkan pada peta sebagai ciri-ciri dasarnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Ciri-ciri Dasar Peta

POINT	LETAK	KETERANGAN
Judul peta	Di atas gambar peta	Disesuaikan dengan tema peta dengan menggunakan kalimat yang singkat dan informatif
Skala	Samping kanan atas	
Keterangan / Legenda	Samping kanan bawah	Mencantumkan informasi simbol-simbol yang ada di dalam peta
Penunjuk arah	Di atas penempatan skala	Arah utara bumi biasanya disimbolkan dengan gambar mata angin dengan arah utara menunjuk ke posisi atas
Sumber	Di bawah legenda	Mencantumkan peta-peta yang menjadi acuan dan atau kegiatan yang menghasilkan data peta
Kolom Pengesahan	Di bawah gambar peta	Mencantumkan ; Lembaga-lembaga, nama-nama personal dan tanda tangan yang mengesahkan. Tanggal, bulan dan tahun, saat peta di sahkan. Tempat, hari dan jam saat peta disahkan

Catatan

1 aktifis LATIN, fasilitator pemetaan di Desa Cilesya dan Sukasari

2 aktifis KANOPI

3 *TTG* atau titik tinggi geodesi adalah patok-patok bantu pemetaan yang dibuat Pemerintah, untuk menandai titik-titik poligon pemetaan nasional. Pada patok atau tugu yang terbuat dari semen ini tertera nomor TTG, yang terdiri dari huruf yang menunjukkan kelasnya, P (primer), S (sekunder) atau T (tersier), dan tiga angka di belakangnya yang menunjuk pada nomor urutnya. Titik posisi dan nomor TTG ini tertera pada peta-peta rupabumi atau topografi, dan sering pula dirujuk pada peta-peta kehutanan.

Pemetaan Hutan Desa Secara Partisipatif

Oleh Jamo [1]
Nurhayati [2]

A. Pengantar

Pada dasarnya permukaan bumi bukanlah merupakan bidang datar tetapi berbentuk elips. Untuk mengetahui gambaran bentuk permukaan bumi yang lebih lengkap beserta semua benda penting yang terdapat di atasnya maka digunakan peta. Jadi peta merupakan hasil pengukuran dan penyelidikan yang dilaksanakan baik langsung maupun tidak langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permukaan bumi. Peta ada berbagai jenis, salah satunya peta topografi yang merupakan suatu tipe peta yang akan memberikan gambaran keadaan suatu areal tertentu pada permukaan bumi.

Tata batas administratif yang tergambar di peta desa biasanya hanya menggambarkan tata batas wilayah hak milik di desa (pemukiman, lahan pertanian dan lain-lain) sedangkan wilayah-wilayah yang statusnya milik negara (misalnya kawasan hutan dan perkebunan) sering tidak tercantum di dalam peta desa. Kawasan-kawasan tersebut biasanya hanya terdaftar di dalam data statistik desa dan batas wilayah-wilayah tersebut tidak nampak dalam peta desa. Sebaliknya, peta-peta kawasan hutan seringkali juga hanya menampakkan tanda-tanda lapangan dan batas-batas wilayah pengelolaan hutan. Batas administratif antar desa tidak selalu nampak atau digambarkan.

Dalam kondisi yang paling buruk, kemungkinan akan diperlukan kegiatan pemetaan partisipatif untuk menggambarkan batas-batas wilayah hutan desa, yakni kawasan hutan

negara yang akan dikelola bersama oleh warga desa dalam kerangka PHBM.

B. Pengertian

Pemetaan adalah aktivitas/kegiatan membuat peta yang menggambarkan bentuk rupa bumi beserta informasi yang dinyatakan dengan simbol-simbol, tanda-tanda serta keterangan dalam skala tertentu.

Pemetaan hutan desa secara partisipatif adalah suatu kegiatan memeriksa atau membuat peta hutan desa dengan melibatkan masyarakat desa dan pihak-pihak lain yang terkait; misalnya aparat desa dan perwakilan desa (BPD) yang bertetangga, dan pihak kehutanan. Pendekatan partisipatif multipihak ini diperlukan agar batas-batas yang diperiksa dan digambarkan kelak memang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga sengketa batas yang tidak perlu dapat diminimkan.

Hutan desa adalah hutan yang secara administratif termasuk ke dalam suatu wilayah desa tertentu. Hutan desa yang dimaksud dalam konteks PHBM adalah wilayah yang menjadi bagian dari kawasan hutan negara (yang dikelola oleh Perhutani) yang akan dimasukkan atau yang dianggap termasuk ke dalam wilayah administratif desa. Hutan desa ini dalam PHBM akan dikelola secara partisipatif dan bersama, oleh Perhutani dan masyarakat desa.

C. Tujuan

Sesuai dengan kondisi di atas, maka pemetaan hutan desa partisipatif ini pertama-tama ditujukan untuk memperjelas batas-batas wilayah hutan desa yang akan dikelola dalam PHBM. Upaya memperjelas batas-batas ini harus dilakukan sedemikian rupa agar prosesnya dihadiri dan disaksikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan kemudian hasil-hasilnya dapat disepakati bersama.

Berkaitan dengan hal di atas maka pemetaan hutan desa secara partisipatif ini bertujuan untuk :

- mengetahui kejelasan tata batas hutan desa
- mengetahui kejelasan batas wilayah antar desa dan menghindarkan terjadinya konflik dalam pengelolaan hutan
- mengetahui potensi sumberdaya hutan desa dan menyadarkan masyarakat mengenai keadaan desanya
- mencatat dan mengesahkan pengetahuan lokal masyarakat mengenai keadaan hutan dan desanya
- bahan perencanaan pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lainnya di desa.

D. Output

Keluaran dari proses ini adalah peta yang menggambarkan secara jelas batas-batas wilayah hutan desa atau hutan yang akan dikelola desa dalam kerangka PHBM. Keluaran ini harus disertai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan menyangkut keabsahan peta yang dihasilkan itu.

E. Tahap-tahap Kegiatan

1. Penggalian kesepakatan desa

Fasilitator pertama-tama diminta menggali kesepakatan desa mengenai perlunya dilakukan pemetaan partisipatif untuk memperjelas batas-batas hutan desa. Penggalian ini dapat dilakukan dalam Forum PHBM yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh wakil-wakil KTH, wakil pamong desa dan wakil BPD (badan perwakilan desa); karena akan menyangkut tata batas yang membutuhkan kesepakatan bersama dari semua pihak. Di dalam pertemuan ini fasilitator diharapkan dapat melakukan hal-hal berikut:

1. **Fasilitator menerangkan kegunaan peta dalam konteks PHBM.**
   Kegunaan peta ini antara lain :
   a. memperlihatkan kejelasan tata batas, baik batas hutan negara dengan lahan milik maupun batas antar wilayah desa di dalam hutan
   b. memberikan informasi mengenai potensi desa dan hutan desa
   c. bahan negosiasi dan untuk mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak menyangkut pengelolaan sumberdaya hutan
   d. untuk menghindarkan konflik dalam pengelolaan sumberdaya hutan, dan
   e. bahan perencanaan kegiatan PHBM selanjutnya.

2. **Fasilitator menerangkan "situasi umum" kondisi peta-peta yang ada[1], yakni biasanya di dalam peta-peta tersebut tidak terdapat batas-batas yang jelas antar desa di dalam hutan. Dengan demikian akan terdapat tiga kemungkinan opsi/pilihan kegiatan:**
   - Peta-peta yang tersedia atau yang bisa diperoleh *telah menyajikan semua informasi yang diperlukan*, termasuk batas-batas hutan desa. Dalam hal ini yang masih perlu dilakukan bersama kemudian ialah memeriksa batas-batas hutan desa, apakah sesuai antara yang tergambar di peta dengan yang ada di lapangan.
   - Peta telah menyediakan semua informasi, namun *masih perlu dilakukan revisi pada sebagian batas yang meragukan.* Dalam keadaan ini perlu dilakukan pengukuran-pengukuran lapangan pada sebagian batas yang dipersengketakan atau yang belum jelas, ditambah dengan pemeriksaan pada bagian-bagian lain yang diperlukan.
   - Peta belum menggambarkan batas-batas wilayah yang diperlukan, atau tidak tersedia peta sama sekali. Dalam kondisi ini pengukuran-pengukuran lapangan perlu dilakukan untuk menggambarkan batas-batas itu setepatnya.

3. **Fasilitator membangun kesepakatan-kesepakatan forum mengenai :**
   a. Perlu tidaknya dilakukan kegiatan pemetaan batas-batas hutan desa, atau jika perlu pembuatan peta seluruh desa termasuk wilayah hutannya
   b. Pendekatan yang akan dipakai di dalam penetapan batas. Batas-batas antar desa dan batas-batas wilayah hutan desa dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (1) sejarah desa, (2) administrasi pemerintahan, atau (3) administrasi kehutanan (umpamanya, batas-batas blok dan petak). Pendekatan ini hendaknya didiskusikan betul-betul sehingga tercapai kesepakatan.
   c. Pembentukan *tim inti* yang akan bertindak sebagai pengarah dan mengendalikan

kegiatan pemetaan dari awal sampai selesai. Tim inti ini sekurang-kurangnya terdiri dari orang-orang yang akan mewakili berbagai pihak, antara lain fasilitator pemetaan, perwakilan dari KTH dan Forum PHBM; dan jika mungkin juga dari aparat desa dan BPD. Akan tetapi yang juga penting adalah anggota-anggota tim ini mau dan mampu[4] bekerja sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan pemetaan partisipatif ini.

d. Pembiayaan kegiatan, antara lain untuk menutupi kebutuhan :
   - pembelian peta-peta
   - modifikasi dan penggambaran peta
   - pelatihan, termasuk sewa alat
   - pengukuran lapangan, termasuk sewa alat
   - persiapan logistik untuk pengukuran lapangan.

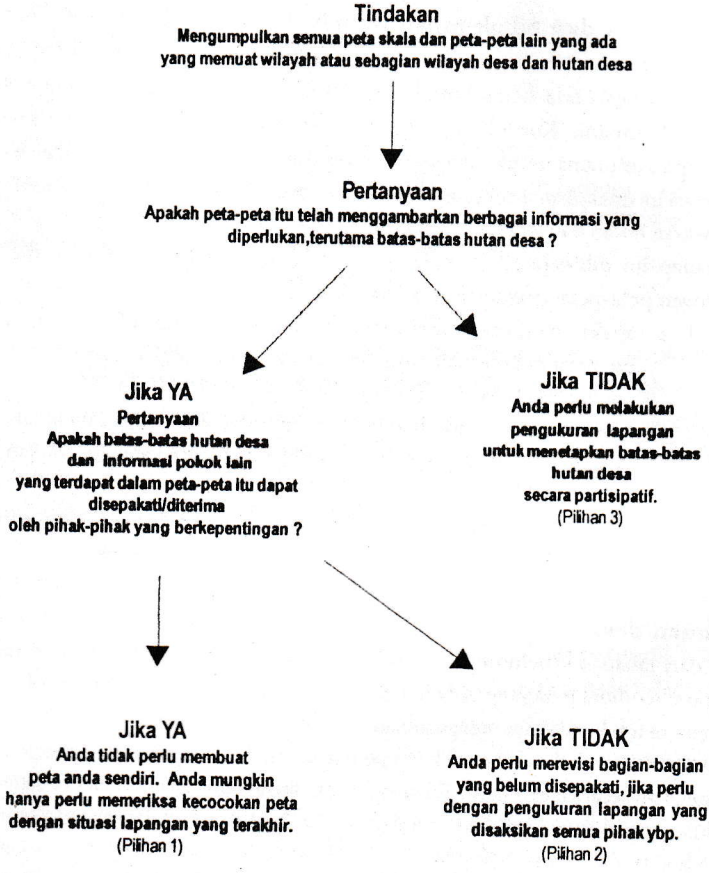
e. **Rentang waktu pelaksanaan kegiatan pemetaan**
   Fasilitator hendaknya mencatat seluruh proses diskusi dalam membangun kesepakatan desa ini. Hal-hal penting mungkin muncul dalam diskusi, seperti misalnya pandangan orang desa terhadap hutannya –dulu dan sekarang-, klaim-klaim dan konflik menyangkut penguasaan dan pengelolaan hutan, atau pun orang-orang atau tokoh yang perlu dirujuk untuk melancarkan kegiatan pemetaan ini. Sebagai tambahan, diskusi atau pertemuan ini bisa jadi tidak cukup sekali saja dilaksanakan. Alternatifnya, dapat pula lebih dahulu dilaksanakan diskusi kecil-kecil di dusun-dusun untuk menjajagi dan mendorong kesepakatan, sebelum pada akhirnya dilakukan pertemuan (forum) tingkat desa.

2. Penyusunan rencana kerja

Tim inti yang telah terbentuk kemudian menyusun rencana kerja terinci mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, perkiraan jumlah biaya yang diperlukan dan lain-lain.

3. Pengumpulan dan penyiapan peta-peta

Tim inti dengan dipimpin fasilitator kemudian mengumpulkan dan menyiapkan peta-peta yang dibutuhkan, yakni semua peta yang bisa diperoleh yang menyangkut wilayah desa setempat. Jika mungkin, usahakan untuk mendapatkan peta-peta berskala besar; misalnya skala 1:50.000, 1:25.000 atau yang lebih besar lagi[5]. Peta yang umum dirujuk adalah peta rupa bumi yang diproduksi oleh Bakosurtanal, yang menggambarkan topografi, jaringan jalan, sungai dan berbagai tanda lapangan lainnya. Peta topografi umum dapat pula diperoleh dari jawatan topografi tentara atau direktorat geologi. Peta-peta kawasan hutan dapat diperoleh dari dinas kehutanan atau Perhutani, atau direktorat Intag di kehutanan pusat. Sedangkan peta (atau denah) wilayah desa biasanya tersedia di desa. Pengumpulan dan penyiapan peta-peta ini dilakukan oleh orang yang telah ditunjuk di dalam tim inti, misalnya fasilitator pemetaan.



Gambar 6.1. Bagan pengambilan keputusan untuk memutuskan pilihan kegiatan dalam pemetaan partisipatif.

Setelah peta-peta itu terkumpul, tim kemudian mempelajarinya. Beberapa pertanyaan penting di sini adalah: Apakah peta-peta itu keseluruhannya telah dapat memperlihatkan hal-hal yang ingin diketahui (dan yang dibutuhkan dalam perencanaan) ? Misalnya, batas-batas antar desa, batas antara desa dengan kawasan hutan, batas-batas bagian yang berhutan dengan yang tidak, tanda-tanda lapangan di dekat pemukiman di desa yang dapat dijadikan sebagai *titik ikat*[6], dan seterusnya. Juga, apakah peta-peta itu memiliki skala yang sesuai sebagai peta kerja (yakni peta yang cukup rinci untuk digunakan dalam kegiatan pemetaan di lapangan) ? Jika tidak, barangkali tim perlu untuk menyalin atau memfotokopi salah satunya, untuk digunakan sebagai peta dasar bagi pemetaan ini. Lihat bagan pengambilan keputusan pada Gambar 6.1.

4. Penyiapan desa dan pihak-pihak terkait

Fasilitator bersama tim inti melakukan konsultasi ke berbagai pihak yang berkepentingan dengan tata batas hutan desa, misalnya ke desa-desa tetangga yang berbatasan dan Perhutani. Konsultasi ini ditujukan untuk membahas kondisi peta-peta yang telah didapat, terutama untuk mengambil keputusan sesuai Gambar 6.1. Karena itu, dalam konsultasi ini dilakukan inventarisasi kasus-kasus konflik yang ada yang menyangkut tata batas kawasan hutan dan tata batas antar desa.

Dalam tahap ini dibicarakan mengenai kesepakatan bersama yang akan diambil berkaitan dengan peta-peta yang telah tersedia, yaitu :

Pilihan 1 : apakah hanya akan menyetujui peta yang ada (secara umum) dan memeriksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan (misalnya dengan memeriksa beberapa titik pokok) ?

Pilihan 2 : apakah akan memperbaiki peta yang sudah ada dengan melakukan pengukuran lapangan pada lokasi-lokasi tertentu yang meragukan atau diperselisihkan ?

Pilihan 3 : apakah akan membuat peta (atau garis-garis tatabatas di peta) yang baru dengan melakukan pengukuran geodesi di lapangan ?

5. Pertemuan desa

Apabila dari tahapan sebelumnya diperoleh kesepakatan perlu dilakukan perbaikan atau bahkan perlu dibuat peta yang baru dengan melakukan pengukuran di lapangan maka fasilitator atau tim inti hendaknya mengusulkan agar dilakukan pertemuan desa. Pertemuan ini diadakan untuk membahas rencana kerja pemeriksaan dan pengukuran lapangan, yang akan dilangsungkan secara partisipatif. Di samping itu diusulkan pula agar dalam pertemuan desa ini disusun tim luas (yang akan membantu tim inti) untuk pelaksanaan pemetaan partisipatif, yang terdiri dari:

- tim kerja pengukuran lapangan
- tim saksi (pihak Perhutani dan wakil-wakil desa tetangga yang berbatasan)
- tim pembuatan peta (kartografi)

Sekaligus, dalam pertemuan desa ini juga dapat dibahas:

ü revisi tata waktu definitif, mencakup: waktu-waktu pelaksanaan pelatihan, pemeriksaan lapangan awal, pengukuran lapangan, pembuatan peta dan lain-lain.

ü penyiapan perlengkapan dan bahan untuk kegiatan pemetaan (alat-alat ukur, cat, patok, logistik dan lain-lain).

ü kesepakatan pembiayaan (antara lain, sumber-sumber pendanaan)

6. Pelatihan

Fasilitator dan tim inti menyiapkan kegiatan pelatihan yang akan diikuti oleh tim kerja pengukuran lapangan. Pelatihan dilakukan apabila dari hasil analisis peta-peta yang ada diperoleh kesepakatan perlu dilakukan perbaikan atau bahkan perlu dibuat peta yang baru dengan melakukan pengukuran di lapangan. Materi yang perlu disampaikan oleh fasilitator

dalam pelatihan meliputi :

Pengenalan dan cara penggunaan alat

Di dalam kegiatan ini dikenalkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan pemetaan serta cara penggunaannya.

Praktek pemetaan

Praktek pemetaan mencakup cara pengambilan data di lapangan, cara pencatatan data, pengolahan data hasil pengukuran serta pembuatan peta dari data yang telah diperoleh.

Teknik pemetaan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran ..

7. Pemeriksaan lapangan awal (survey lapangan)

Fasilitator, tim inti, perwakilan tim pengukuran lapangan dan tim saksi melakukan pemeriksaan lapangan awal untuk mengenali keadaan lapangan. Apabila Pilihan 1 yang diambil, maka pemeriksaan awal ini bisa sekaligus digunakan untuk mengecek kesesuaian peta yang ada dengan kondisi lapangan, dan menyepakati batas-batas yang telah tertera di peta.

Untuk Pilihan 2 dan 3, kegiatan ini adalah untuk memeriksa dan menyepakati batas-batas hutan desa di lapangan, dan menyepakati bagian-bagian yang akan diukur atau harus diukur ulang. Pada saat pemeriksaan lapangan awal ini tim inti hendaknya mengamati dan mencatat tanda-tanda alam dan nama tempat yang penting untuk dijadikan pedoman atau patokan saat melakukan pengukuran lapangan nanti. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan tersesat arah atau disesatkan dalam pengukuran lapangan.

8. Pengukuran lapangan

Pengukuran lapangan atau disebut juga pengukuran geodesi adalah aktivitas pengambilan data batas-batas kawasan dan informasi lain yang gayut (relevan). Dalam pengukuran ini, batas-batas kawasan disederhanakan menjadi serangkaian titik stasiun, yang kemudian diukur jarak, sudut arah (sudut kompas), dan sudut kelerengan di antaranya. Data jarak dan sudut-sudut inilah yang dicatat dan kemudian digambarkan pada peta.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim kerja pengukuran lapangan yang sudah dibentuk sebelumnya. Tim ini sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1 orang pemandu jalan,
- 1 orang pemberi tanda titik stasiun,
- 1 orang penarik meteran,
- 1 orang pemegang kompas,
- 1 orang pencatat data.

Pemandu jalan atau penunjuk arah bertugas menunjukkan arah atau lokasi yang benar dari batas-batas yang sedang diukur. Pemberi tanda bertugas menandai titik-titik stasiun dengan memancangkan tonggak atau patok tanda yang diberi cat. Penarik meteran bertugas untuk mengukur jarak antar stasiun. Pemegang kompas bertugas mengukur sudut arah dan sudut lereng (kemiringan medan). Pencatat data mencatat data yang disebutkan oleh

penarik meteran dan pemegang kompas dalam buku atau tally sheet pengukuran. Pemandu jalan, pemberi tanda stasiun, dan penarik meteran dapat merangkap sebagai perintis jalan (*menyacar*), dan menyiapkan patok tanda.

Untuk menunjuk pemandu sebaiknya fasilitator memilih orang yang dapat dipercaya, mampu mengemban amanat serta mengetahui tata batas yang telah disepakati bersama pada saat pertemuan desa. Pemandu dapat berasal dari tokoh masyarakat, mandor yang sudah lama bekerja di Perhutani, sesepuh desa maupun warga masyarakat yang memenuhi kriteria tersebut di atas.

Pengukuran ini dihadiri oleh tim inti dan saksi-saksi. Jika diperlukan, sebagian tim inti juga dapat merangkap menjadi tim pengukur. Untuk mendukung kelancaran pemetaan, fasilitator sebaiknya selalu mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan hal-hal yang penting kepada tim inti, tim kerja pengukuran lapangan dan tim saksi. Di samping itu, kelengkapan peralatan baik alat pengambilan data maupun alat pendukung hendaknya selalu dicek dan dipersiapkan.

Apabila terjadi ketidaksepahaman atau keberatan mengenai tata batas dari pihak lain, fasilitator sebaiknya menghentikan kegiatan pengukuran lapangan untuk sementara dan mencari penyelesaiannya. Kegiatan pemetaan dapat dilanjutkan kembali setelah kata sepakat dicapai. Untuk teknis pengukuran lapangan yang lebih detil dapat dilihat pada Lampiran ..

9. Pengolahan data dan penggambaran peta

Data hasil pengukuran lapangan yang dilakukan oleh tim kerja pengukuran kemudian diolah dan digambar oleh tim penggambaran peta. Jika mungkin, fasilitator sebaiknya meminta bantuan seorang kartografer (ahli pembuat peta) dalam pembuatan dan penyelesaian peta akhir. Uraian teknis pengolahan data dan penggambaran peta dapat dilihat di Lampiran ..

10. Penyampaian hasil dan revisi peta

Setelah peta selesai digambar, tim inti hendaknya mengadakan pertemuan desa terbuka atau mendatangi pihak-pihak yang terkait untuk menyampaikan hasil pengukuran lapangan dan petanya. Pertemuan dusun, terutama di dusun-dusun yang berbatasan dengan hutan, dan pertemuan dengan para penggarap lahan hutan (pertemuan-pertemuan ini bisa digabungkan) perlu dilakukan untuk mengkonfirmasikan hasil-hasil pemetaan. Selain itu, dalam pertemuan-pertemuan ini juga dapat dilakukan pelengkapan informasi dan revisi. Informasi-informasi detil yang dapat ditambahkan di antaranya adalah potensi hutan (kualitatif), nama-nama tempat dan bentang alam (sungai, bukit, dll.), lokasi-lokasi mata air, tempat-tempat keramat dan tempat penting lainnya, dan berbagai informasi detil yang tidak diperoleh dalam pemetaan.

Dalam pertemuan tingkat desa tim hendaknya mengundang pihak-pihak desa yang berbatasan dan pihak Perhutani. Keberatan-keberatan atau saran perbaikan yang muncul pertama-tama dikembalikan kepada kesepakatan awal sebelum pengukuran. Apabila

kekeliruan atau kekurangan itu terjadi pada saat pengukuran atau penggambaran, maka revisi peta harus dilakukan bahkan bila perlu dilakukan pengukuran ulang di lapangan. Fasilitator hendaknya mengkonfirmasikan kembali peta hasil revisi sampai peta betul-betul dapat disetujui dan diterima oleh semua pihak yang terkait sebelum diproses ke tahap penyelesaian akhir.

11. Persetujuan/pengesahan dan pengukuhan peta

Persetujuan dan pengesahan peta merupakan puncak dari kegiatan pemetaan partisipatif. Dalam kegiatan ini fasilitator dan tim inti hendaknya mengundang semua pihak yang berkepentingan sekali lagi untuk menyepakati dan menandatangani hasil pemetaan serta berita acara bermeterai. Pihak-pihak yang harus hadir dalam pertemuan desa ini adalah aparat desa, forum desa dan BPD dari desa yang dipetakan, wakil-wakil desa tetangga yang berbatasan dan Perhutani. Sebelum acara penandatanganan, fasilitator perlu menyampaikan kepada semua pihak yang hadir mengenai isi dan informasi peta yang telah dibuat. Semua pihak diusahakan untuk mendapatkan salinan peta dan berita acara serta data-data pendukungnya.

Untuk pengukuhannya, tim inti hendaknya menghubungi pihak Pemda (Bupati) dan administratur Perhutani. Terhadap pihak Pemda, tim inti mengajukan permohonan agar kawasan hutan desa dikukuhkan sebagai wilayah administratif desa; sedangkan terhadap Perhutani dimohonkan pengukuhan desa bersangkutan sebagai wilayah PHBM.

Catatan editor: untuk pengukuhan ini, siapa yang paling berhak atau berwenang mengajukan permohonan atas nama desa ? tim inti, forum PHBM desa, atau Pemdes ?

F. Indikator Keberhasilan

Pemetaan partisipatif ini dikatakan berhasil apabila pihak-pihak yang berkepentingan bersedia turut serta aktif di dalam pemeriksaan dan pengukuran lapangan, dan dalam pembahasan peta yang dihasilkan. Pemetaan dikatakan berhasil pula apabila masyarakat bisa memahami kegunaannya, dan menggunakannya baik untuk perencanaan maupun untuk menyelesaikan konflik-konflik di lapangan

Catatan

1 aktifis KANOPI

2 aktifis LATIN, fasilitator pemetaan di Desa Cileuya dan Sukasari

3 pada tahap ini fasilitator diasumsikan belum berbekal peta apapun; namun apabila contoh peta desa atau peta hutan tersedia, boleh digunakan sebagai peraga.

4 hendaknya anggota tim inti dipilih bukan sekedar karena jabatan (*ex officio*); para pejabat biasanya terlalu sibuk untuk mengurusi kerja-kerja praktis penyiapan pemetaan. Hendaknya pula dipilih anggota tim inti yang memiliki kemampuan untuk bekerja sebagai tim pengarah pemetaan.

5 skala ialah besar perbandingan antara gambar dengan kenyataan sebenarnya. Makin besar skala, makin besar gambar dibanding kenyataannya. Pada peta, semakin besar skala diperlihatkan oleh semakin kecilnya angka pembanding (angka penyebut), yakni angka di belakang tanda : (titik dua). Skala 1:25.000 lebih besar dari skala 1:50.000.

6 titik ikat atau titik pasti adalah tanda-tanda lapangan yang jelas dan tidak bergerak, yang dapat digunakan untuk patokan dalam pemetaan. Titik ikat ini harus tergambar di peta dasar dan mudah dicari di lapangan, misalnya persilangan jalan, jembatan, muara sungai, puncak bukit, dll.

Pendataan Penggarapan Lahan Hutan

Oleh Ajun Juhantara

A. Pengantar

Situasi atau kondisi di lapangan yang dihadapi dengan adanya program PHBM kebanyakan adalah upaya pengaturan ulang lahan-lahan garapan di hutan, sebagai akibat dari adanya 'penjarahan' atau penyerobotan lahan kehutanan. Jika di masa lalu pemberian hak garap lahan kehutanan itu diatur lewat suatu kontrak kerja antara Perhutani dan penggarap (misalnya kontrak tanaman tumpangsari), dalam banyak kasus yang dihadapi PHBM sekarang hak garap itu belum jelas atau belum diatur lagi. Kenyataannya, lahan-lahan hutan itu sudah dikuasai dan sudah dibagi-bagi oleh petani, meskipun belum tentu diklaim pemilikannya. Kebanyakan petani hanya meminta hak untuk menggarap lahan hutan itu untuk bertani, disamping memelihara tanaman kehutanan.

Kenyataan lain yang turut merumitkan situasi adalah, di lapangan sering kali dijumpai adanya penggarap hutan yang menguasai lebih dari satu bidang lahan garapan. Penguasaan tersebut biasanya dikarenakan ada petani yang membuka lahan (hutan) beberapa kali atau membeli hak garap lahan dari penggarap lainnya. Sehingga petani yang kaya atau mampu, cenderung 'membeli' lahan garapan untuk dikerjakan sendiri atau diburuhkan. Apabila penumpukan lahan semacam ini tidak dikendalikan maka sistem PHBM tidak akan mampu menyelesaikan masalah keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Untuk menata ulang penguasaan lahan ini dan mengaturnya agar lebih adil, diperlukan data dan informasi dari petani menyangkut penguasaan dan pemilikan lahan dan sumberdaya lain yang dimilikinya.

B. Pengertian

Pendataan penggarapan lahan hutan adalah suatu kegiatan yang meliputi pencarian, penelusuran, dan pencatatan data dan informasi tentang pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di desa, terutama yang berada di kawasan hutan negara. Fokus yang demikian adalah karena hutan negara merupakan titik sentral dalam implementasi sistem PHBM.

Namun demikian, dalam pendataan ini juga ditangkap informasi-informasi menyangkut pengelolaan hutan oleh rakyat di luar kawasan hutan negara. Data dan informasi tentang hutan rakyat akan digunakan untuk menggali pengetahuan lokal pengelolaan hutan yang dimiliki masyarakat (teknik/cara penanaman, sistem penganekaragaman tanaman di hutan, dll.) dan nilai-nilai/cara pandang mereka terhadap hutan.

C. Tujuan

Pendataan penggarapan lahan hutan mempunyai tujuan untuk menghimpun data dan informasi potensi desa di hutan yang dapat digunakan untuk:

1. Memperjelas kawasan hutan yang digarap oleh masyarakat.
2. Penataan kembali pengusahaan lahan garapan di hutan oleh masyarakat.
3. Penyusunan perencanaan masyarakat tentang rencana-rencana pengelolaan sumberdaya hutan di waktu yang akan datang oleh Forum PHBM Desa.
4. Mempermudah dinas/instansi lain dalam menentukan program dan kelompok sasaran. Instansi yang terkait dalam PHBM (Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Perhutani) akan mengetahui program yang dapat diterapkan di lahan garapan tersebut termasuk peningkatan kemampuan teknis petani.

Melalui proses pendataan terhadap semua penggarap hutan yang dilakukan tanpa membedakan status legal atau ilegal (ada atau tidak adanya izin menggarap lahan dari Perhutani), diharapkan akan memberikan manfaat kepada masyarakat penggarap, yaitu dapat meminimalkan kecemburuan antar warga masyarakat karena:

1. Adanya kejelasan batas lahan garapan antar penggarap sehingga tanggung jawab setiap penggarap jelas.
2. Dapat menghindari penumpukan jumlah lahan garapan pada beberapa orang saja.
3. Memberikan kesempatan penggarapan bagi masyarakat yang belum terbagi lahan dan mempunyai minat untuk menggarap di hutan.

D. Output

Data dan informasi tentang potensi pengelolaan sumberdaya hutan yang ada di desa, baik di hutan negara maupun hutan milik/rakyat, termasuk potensi sumberdaya manusianya.

E. Metoda

Metoda yang dapat digunakan dalam kegiatan ini adalah metoda kuisioner dan pengecekan di lapangan (*ground check*). Metoda tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa data yang dihasilkan akan lebih terarah dan akurat serta dapat menjangkau semua kelompok sasaran. Hambatannya, tidak semua petani terbiasa baca tulis. *Ground check* dilakukan sebagai proses klarifikasi antara data tertulis dengan data riil lapangan. Fasilitator dapat berperan dalam penentuan desain metode yang digunakan dan menampung masukan dari masyarakat lewat Forum PHBM Desa dan perwakilan KTH untuk kegiatan tersebut. Mereka ini sebagai penanggung jawab dan pelaksana dalam penggalian dan pencatatan informasi langsung dari kelompok sasaran.

Pendataan ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari berbagai *stakeholders* yang ada di desa. Tim ini bisa langsung Forum PHBM Desa atau sebuah tim baru yang dibentuk khusus, tapi yang penting keterlibatan wakil-wakil KTH sebagai anggotanya perlu lebih diperbanyak. Pelibatan wakil KTH ini sangat penting karena beberapa alasan:

1. Pengetahuan wakil KTH terhadap pekerjaan dan keadaan desanya lebih baik daripada orang-orang lainnya;
2. Akan menumbuhkan tanggung jawab anggota KTH terhadap kegiatan ini karena dilibatkan sejak awal;
3. Penggalian informasi dapat lebih cepat dan lebih lengkap karena dilakukan antar anggota masyarakat.

F. Tahap-tahap Kegiatan

1. Tahap persiapan

Tahap persiapan ini bertujuan untuk membekali diri fasilitator dengan informasi menyangkut pengelolaan hutan yang ada di desa. Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

i) Melakukan pengamatan lapangan di hutan

Kegiatan ini dapat dilakukan oleh fasilitator sendiri atau lebih baik lagi jika ditemani oleh warga masyarakat atau anggota KTH yang mengetahui seluk beluk kondisi hutan. Dalam pengamatan lapangan ini fasilitator melakukan pencatatan kondisi lapangan yang penting di antaranya kondisi lahan hutan (apakah kritis atau tidak), tahap pengolahan lahan, jenis tanaman yang ditanam petani (tanaman pokok, tanaman tumpang sari), teknik yang dipakai, dll.

ii) Wawancara dengan petani atau warga masyarakat lainnya

Wawancara ini adalah wawancara informal (*ngobrol*) dengan warga masyarakat terutama petani setempat untuk mengetahui pemahaman dan persepsi masyarakat tentang pengelolaan hutan. Beberapa informasi yang penting misalnya pengalaman-pengalaman menyangkut pengelolaan hutan rakyat, pengalaman petani dalam menggarap lahan hutan, dan kebijakan Perhutani dalam pengelolaan hutan negara yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat sekitar hutan. *Ngobrol* dapat dilakukan saat bertemu masyarakat baik di sawah, rumah, warung atau mesjid.

Fasilitator kemudian merancang kuisioner berdasarkan informasi-informasi tersebut. Kuisioner disusun dengan mengklasifikasikan data yang ada, seperti identitas obyek data (data diri penggarap, kondisi lahan, lahan milik, jenis tanaman). Kebutuhan waktu untuk pelaksanaan tahapan ini sekitar satu minggu.

2. Pembentukan tim pendataan

Tahap pembentukan tim dilakukan dalam 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan Forum PHBM Desa untuk menyepakati rencana pendataan dan pertemuan untuk pembentukan tim itu sendiri.

i) Pertemuan Forum PHBM Desa

Dalam rangka menyusun tim pendataan, fasilitator sebaiknya meminta Forum

PHBM Desa untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan itu, fasilitator perlu menjelaskan hal-hal mengenai kegiatan pendataan penggarapan lahan hutan. Kemudian perlu pula didiskusikan manfaat-manfaat yang bisa didapat dan harapan-harapan masyarakat pada kegiatan ini, serta metode kuisioner yang akan digunakan. Beberapa keputusan yang perlu diambil dalam pertemuan ini adalah:

- Perlu tidaknya dilakukan pendataan penggarapan lahan hutan.
- Metoda yang akan dipakai dalam pendataan. Salah satu metoda yang dapat dipilih adalah dengan menggunakan kuisioner, untuk mendapatkan cakupan data yang lebih lengkap dan dapat menjangkau semua kelompok sasaran pendataan.
- Kelompok sasaran pendataan. Sasaran pendataan ini biasanya petani penggarap lahan hutan, baik yang berasal dari desa yang bersangkutan maupun penggarap dari luar desa.
- Pembentukan tim pendataan. Tim ini akan dipimpin oleh fasilitator dan beranggotakan wakil dari tiap-tiap KTH. KTH yang dilibatkan termasuk KTH dari penggarap luar desa yang menggarap di lahan hutan desa tersebut. Fasilitator dapat menjalankan fungsi supervisi.

Pembuatan draft awal kuisioner berdasarkan desain kueisoner yang telah disiapkan fasilitator. Anggota forum diminta memberikan masukan untuk melengkapi draft tersebut. Pemberian tugas kepada perwakilan KTH di forum untuk menjelaskan kegiatan pendataan kepada anggota KTH-nya. Fasilitator sebagai pendamping dapat menyampaikan penjelasan yang menyangkut rencana pendataan dalam salah satu pertemuan rutin KTH.

ii) **Pertemuan pembentukan tim**

Pertemuan calon anggota tim kerja difasilitasi oleh Forum PHBM Desa dan fasilitator untuk menyepakati pembentukan tim kerja pendataan. Pembahasan dalam pertemuan meliputi:

- Penyamaan pemahaman tentang pendataan dan metode yang digunakan dalam pendataan melalaui penjelasan kembali pendataan dan metode kuisioner.
- Pembentukan tim kerja, Forum PHBM Desa membentuk tim pendataan secara resmi. Fasilitator dapat menjelaskan tugas-tugas tim pendataan di antaranya melengkapi *draft kuisioner* dan menyepakatinya sebagai kuisioner dan pendataan di tiap KTH.
- Merumuskan kebutuhan data untuk isi kuisioner dengan melihat desain kuisioner. Seluruh anggota tim diminta masukan untuk melengkapi draft kuisioner hingga disepakati kuisioner siap digunakan pendataan.
- Rencana pelatihan pengisian kuisioner, penekanannya pada penyiapan kemampuan teknis anggota tim pendataan di lapangan. Pemenuhan kebutuhan teknis tersebut dapat dilakukan dengan pelatihan singkat tentang penyebaran dan pengisian kuisioner.
- Pengumpulan data, kesepakatan tentang waktu pendataan dan pengumpulan

kuisioner serta penunjukan koordinator pendataan di masing-masing dusun yang akan menampung seluruh kuisioner dari tiap-tiap anggota tim.

3. **Pembuatan kuisioner**

Pembuatan kuisioner selain dibuat berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat juga harus melihat hasil pemetaan partisipatif. Pembuatan kuisioner disesuaikan dengan pengetahuan dan kemampuan tim yang akan mengisinya. Kesederhanaan format pengisian, isi, dan bahasa menentukan keakuratan pengisian kuisioner. Pembuatan kuisioner bisa dilakukan dengan ditulis tangan, diketik dengan mesin tik atau bila ada dengan komputer. Fasilitator dan Forum PHBM Desa bertanggung jawab dalam pembuatan dan perbanyakan kuisioner. Isi kuisioner meliputi: (a) Data petani penggarap (data diri, tanggungan keluarga, lama menggarap, pendidikan, domisili, resmi (KTH)/tidak resmi, kepemilikan lahan milik); (b) Data lahan garapan di hutan (RPH, blok/petak, jenis garapan, jumlah lokasi, luas, batas lokasi, sketsa kondisi lahan); (c) Data tanaman (tanaman pokok, tumpangsari, jumlah, produktivitas).

4. **Penyebaran dan pengisian kuisioner**

Kegiatan ini dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu pelatihan singkat agar pendata dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan penyebaran dan pengisian kuisioner.

i) Pelatihan kuisioner

Fasilitator memfasilitasi pelatihan pengambilan data dan pengisian kuisioner. Peserta pelatihan adalah anggota tim pendataan yang terdiri dari wakil-wakil KTH. Pelatihan tersebut dapat dilaksanakan di tingkat desa atau tiap dusun berdasarkan kondisi desanya. Pertimbangan yang digunakan adalah: (a) adanya desa yang memiliki dusun/blok yang jauh dari balai pertemuan desa sehingga pelatihan tiap dusun akan lebih efektif; (b) adanya desa yang dusun/blok-bloknya berdekatan memungkinkan pelatihan dilakukan untuk tingkat desa.

Materi pelatihan adalah : (a) penyebaran dan pengisian kuisioner, yang diarahkan pada cara memasukkan data dalam kuisioner dan simulasi antar peserta; (b) pengecekan kuisioner.

Materi diarahkan pada pengecekan kelengkapan kuisioner dan kecocokannya dengan data yang ada di kelompok. Penjelasan penggunaan data kuisioner, diarahkan pada pembacaan data seperti jumlah penggarap riil di hutan, komoditi pertanian, lahan hutan yang masih tersisa.

ii) Penyebaran dan pengisian kuisioner

Penyebaran dan pengisian kuisioner dilakukan oleh tim pendataan melalui pendekatan masing-masing anggota tim di dalam kelompoknya. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dari rumah ke rumah, pertemuan kelompok atau di lahan garapan. Fasilitator dapat berperan dalam supervisi dengan mengunjungi tiap KTH atau cukup berdialog dengan pendata di KTH. Kebutuhan waktu untuk

pelaksanaan tahapan ini sekitar 10 hari.

5. **Pengumpulan dan pengolahan data**

Semua data kuisioner dikumpulkan dalam satu format berupa tabulasi data penggarapan wilayah kelola hutan desa yang dipilah-pilah berdasarkan kategori data yang ada. Pengumpulan dimulai dari tiap kelompok oleh wakil tim. Yang harus diperhatikan oleh anggota tim: (a) jumlah kuisioner yang disebarkan dan dikumpulkan harus sama; (b) kecocokan data pribadi dalam kuisioner dengan data sebenarnya di kelompok/akurasi data; (c) pengecekan data yang sudah dan belum diisi; (d) pelengkapan data yang kurang.

Pengumpulan kuisioner KTH tingkat dusun diserahkan ke forum dengan toleransi waktu 3 hari setelah selesainya tahapan penyebaran. Data tersebut diolah dalam bentuk tabulasi data oleh fasilitator dan Forum PHBM Desa dalam waktu 2 hari.

6. **Penjelasan kuisioner**

Tabulasi data dibahas dalam pertemuan tim, difasilitasi oleh forum dan fasilitator. Bahan bahasannya adalah:

i) **Evaluasi kegiatan**

Beberapa hal yang dapat diungkap dalam bahasan ini adalah: (a) kendala-kendala yang ada di lapangan; (b) masukan-masukan dari anggota KTH.

ii) **Interpretasi/pembacaan hasil pendataan bersama**

Beberapa hal yang dapat dibaca dari data kuisioner: (a) jumlah penggarap sebenarnya; (b) tanaman tumpangsari yang paling banyak dibudidayakan; (c) blok hamparan yang ada tanaman pokok kehutanan (jati, pinus); (d) jumlah penggarap dengan lahan lebih dari satu lokasi; (e) lahan garapan rata-rata; (f) perbandingan lahan hutan keseluruhan dengan lahan yang sedang digarap masyarakat.

iii) **Rencana pengecekan di lapangan**

Bahasan ini dapat mencakup: (a) teknis pelaksanaan; (b) pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam pengecekan lapangan (KTH, Forum PHBM Desa, fasilitator); (c) teknis penyelesaian ketidakakuratan data dengan fakta lapangan.

7. **Pengecekan di lapangan (ground check)**

i) **Pengecekan di lapangan**

Ada 2 pilihan dalam pelaksanaan tahapan ini: (a) Pengecekan data di lapangan dilakukan untuk seluruh data (seluruh KTH) oleh perwakilan forum, fasilitator, dan anggota KTH; (b) Pengecekan data hanya dilakukan terhadap data-data yang diragukan keakuratannya. Contoh data tersebut adalah luas lahan tidak sebanding dengan produktivitas rata-rata tanaman, jumlah lokasi garapan, sketsa lahan. Fasilitator berperan sebagai saksi sekaligus mencatat temuan-temuan yang ada di lapangan. Pengecekan lapangan dilakukan selama 2 minggu. Tabulasi data dijadikan pedoman

dalam tahapan ini.

ii) Penyelesaian ketidakakuratan data

Ketidakakuratan antara data kuisioner dengan fakta di lapangan merupakan hal yang sering terjadi. Alternatif-alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan adalah:

a. Penyelesaian di tingkat KTH

Penyelesaian yang menyangkut anggota dalam satu KTH dapat diselesaikan secara intern KTH. Nilai/norma yang berlaku di masyarakat dapat dijadikan pedoman penyelesaian seperti kekeluargaan, saling menghargai dan menghormati, tenggang rasa. Tokoh masyarakat yang disegani dapat dijadikan penengah atau tempat meminta nasehat. Forum dan fasilitator hanya sebagai pemantau, dalam arti sebagai pihak yang hanya cukup mengetahui proses dan hasil yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan jika kasusnya menyangkut antara dua atau lebih KTH.

b. Penyelesaian di tingkat Forum PHBM desa

Penyelesaian di tingkat forum dilakukan jika penyelesaian di tingkat KTH tidak tercapai. Forum dapat menggunakan pendekatan persuasif yaitu melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah. Isi dialog berupa mendengarkan pendapat maupun duduk persoalan dari masing-masing pihak dan penjelasan aturan-aturan PHBM dikaitkan dengan kasus tersebut.

Pendekatan dengan menggunakan kewenangan pengelola hutan negara dilakukan jika pendekatan persuasif tidak berhasil, berupa keputusan tegas yang adil atas pertimbangan dan rekomendasi dari forum yang diketahui oleh seluruh KTH. Proses ini dapat berlangsung di desa atau dusun.

G. Indikator Keberhasilan

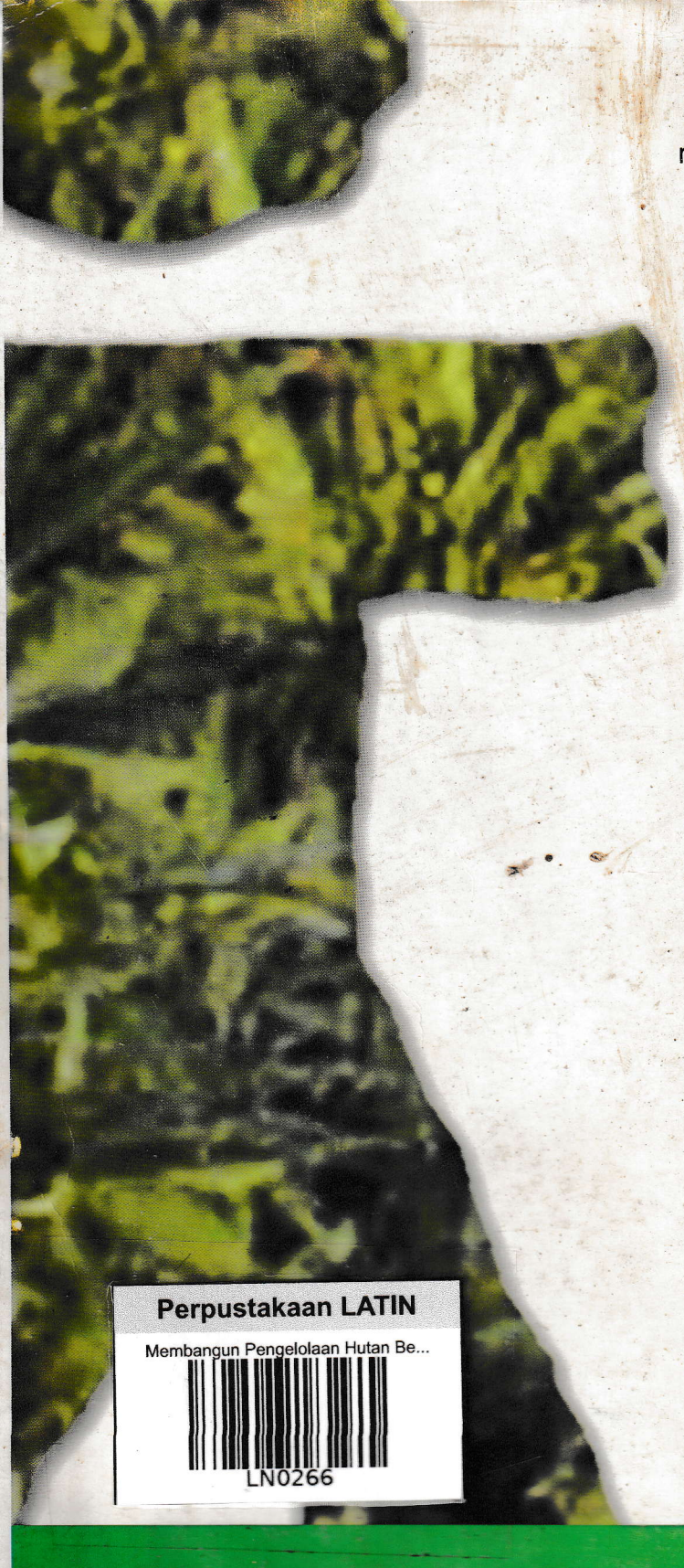
Terkumpukkannya data dan informasi mengenai potensi pengelolaan sumberdaya hutan dan potensi sumberdaya manusia yang ada di desa.

LATIN

Didirikan di Bogor, 5 Oktober 1989, LATIN memandang bahwa pengelolaan hutan, seperti juga pengelolaan sumberdaya alam yang lainnya, harus dibangun berdasarkan asas kelestarian dan keadilan. Untuk itu, sejak 1998 LATIN berupaya mendorong pengembangan wacana dan implementasi pengelolaan hutan yang berbasis rakyat di Indonesia, yang dikemas dalam terminologi luas *Komuniti Forestri* (KF). PHBM Kuningan bagi LATIN adalah salah satu bentuk kongkret implementasi KF, yang bukan melulu berbicara di aras teknik pengelolaan hutan di tingkat petani. Melalui proses-proses kolaboratif para pihak di desa sampai kabupaten, LATIN turut mendorong terjadinya dialog aktif untuk membangun kebijakan dan kelembagaan sosial yang lebih mengapresiasi posisi dan kepentingan petani hutan.

KANOPI

KANOPI merupakan sebuah lembaga non profit dan independen yang berkedudukan di Kabupaten Kuningan Jawa Barat, didirikan pada tanggal 4 Nopember 2000. Visinya adalah untuk *mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam kolaboratif yang lestari dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. Para pendirinya adalah orang-orang dari berbagai macam latar belakang pendidikan yang mempunyai kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Sejak berdirinya, KANOPI telah aktif berpartisipasi dalam menggagas lahirnya sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Kuningan termasuk dalam kegiatan pengimplementasiannya. Kegiatan yang telah dan sedang dilakukan saat ini di antaranya berupa fasilitasi pendampingan dan penguatan kelembagaan masyarakat, advokasi perubahan kebijakan yang dapat mendukung pengelolaan sumberdaya alam yang lebih kolaboratif, dan lain-lain.



Buku *Perencanaan H*
Kerakyatan adalah prosiding y
merekam perkembangan pemik
dan praktek pegiat ORNO
Jawa, Kalimantan dan Sum
dalam perencanaan hutan y
berorientasi kepada rakyat.
koleksi kepustakaan yang terbi
langka karena memanc
masalah kehutanan dari persp
yang sangat berbeda. Pengala
bertahun-tahun serta dinan
dalam menggeluti masalah h
kerakyatan di Indon
tergambarkan dengan jelas da
prosiding ini. Buku ini, se
khusus, penting dan berguna u
dibaca oleh peminat mas
kehutanan dan lingkun
utamanya bagi penentu kebija
peneliti, pengajar, praktisi, pe
ORNOP kehutanan/lingkun
maupun penduduk yang berm
di dalam dan sekitar kawa
h

Perpustakaan LATIN
Membangun Pengelolaan Hutan Be...
LN0266

P

LATIN (Lembaga Alam
adalah organisasi nirlaba
yang didirikan pada tangg
di Bogor, Jawa Barat, Indo
LATIN bertujuan mengembangkan mana
sumberdaya alam t
yang adil dan